



**PROBLEMATIKA PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL ASING**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA
NIM.: B4A099036

PEMBIMBING :

PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, S.H

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

**PROBLEMATIKA PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

Disusun Oleh :

DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA
NIM.: B4A099036

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 10 Juni 2002

Tesis Ini Telah Diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP. 130.368.053

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,



Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130.350.519

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena berkat kasih karuniaNya Penulis dapat menuntaskan penulisan tesis ini.

Setelah mengalami beberapa kendala dalam membuat dan menyusun tesis ini, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesis yang diberi judul : “Problematika Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing”.

Penulis menyadari bahwa dalam memenuhi kehendak untuk menuliskan hal-hal yang ingin disampaikan ke dalam tesis ini, ternyata Penulis bukanlah termasuk orang yang mudah menuliskan gagasan dan pikirannya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat selesai karena tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Untuk itu adalah sangat tepat apabila Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing yaitu Ibu Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH., yang dengan sabar dan tulus hati bersedia untuk membimbing Penulis dalam penelitian dan penulisan tesis ini, sementara beliau disibukkan oleh tugas yang selalu menyertainya.

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih atas dorongan dan bantuan yang telah diberikan selama ini, sehingga sudah sepatutnya Penulis mengucapkan

rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc., Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Bapak Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak Prof. DR. Muladi, SH., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah mendorong usaha-usaha peningkatan SDM di Departemen Kehakiman Dan HAM RI, terutama semasa beliau menjabat Menteri Kehakiman.
4. Bapak Prof. DR. Erman Rajagukguk, SH., Wakil Sekretaris Kabinet, yang telah merintis kerjasama dengan Universitas Diponegoro – Semarang dalam rangka peningkatan SDM di Departemen Kehakiman Dan HAM RI, terutama semasa beliau menjabat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan – Departemen Kehakiman RI.
5. Bapak Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH. LLM., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan HAM RI, yang telah memberikan berbagai fasilitas untuk mendorong penyelesaian Program Pendidikan Pasca Sarjana, terutama pada saat beliau menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum – Departemen Kehakiman Dan HAM RI.
6. Para pejabat dilingkungan Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM RI, pejabat dilingkungan

BKPM serta Notaris, dan Konsultan Hukum yang telah bersedia memberikan data-data dan informasi serta wawancara berkaitan dengan penulisan tesis ini.

7. Orangtua yang Penulis cintai, Ibu : Ny. Asnah Silitonga br. Sirait yang selalu berdo'a untuk kesuksesan Penulis, Bapak : Almarhum Oberlin Silitonga, SH. yang semasa hidupnya sangat bersemangat memberi dorongan untuk kemajuan Penulis.
8. Isteri tercinta, Ny. Rosa Yunita Hutagalung, SE., dan anak tersayang David Manumpak Hasiholan Silitonga.
9. Dosen / Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
10. Karyawan dan Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
11. Semua sahabat dan rekan yang selama penulisan tesis ini memberikan bantuan dan semangat.

Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan bagi yang memerlukannya.

Semarang, Juni 2002.

Penulis

RINGKASAN

Salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia dalam keterbatasan finansial, teknologi, skill dan kemampuan manajemen adalah dengan mengundang modal asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang dijalankan dalam rangka PMA tersebut harus berbentuk Badan Hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan Hukum yang dimaksud disini adalah Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas pada umumnya termasuk PT. PMA memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri Kehakiman, dan perubahan anggaran dasar dari PT. yang bukan PMA menjadi PT. PMA setelah perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan Menteri Kehakiman. Salah satu syarat untuk PT. PMA dalam proses pengesahan maupun persetujuan perubahan anggaran dasar PT. PMA di Departemen Kehakiman Dan HAM RI adalah Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tetapi dalam prakteknya terdapat permasalahan dalam proses tersebut. Salah satu yang utama adalah panjangnya birokrasi di Departemen Kehakiman Dan HAM RI dalam

memproses permohonan yang ada sehingga tidak efektif dan efisien serta beberapa permasalahan lain yang terkait dalam proses tersebut.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron antara satu instansi dengan instansi lain yang terkait dengan PT. PMA, dalam hal ini antara BKPM dengan Departemen Kehakiman Dan HAM RI turut mempersulit lancarnya PT. PMA untuk mendapat pengesahan maupun persetujuan perubahan anggaran dasar PT. PMA. Ditambah lagi dengan masalah koordinasi antar instansi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Implikasi dari permasalahan dalam proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. dalam rangka PMA tersebut terhadap investor asing berpengaruh atau berdampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan investasi di Indonesia sehingga pemanfaatan modal asing dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi tidak maksimal.

ABSTRACT

One of the efforts to be able to improve the Indonesian Economy in its financial, technological, skill and management capability limitations is by inviting foreign investors to invest their capital in Indonesia. The Foreign Capital Investment (PMA) covers a direct foreign capital investment performed in accordance with the relating prevailing laws used for operating a company in Indonesia. A company operated in the framework of a Foreign Capital Investment (PMA) shall be established in the form of a Legal Entity pursuant to the Indonesian laws and shall have its domicile in Indonesia. The Legal Entity meant here is a Limited Liability Company (PT).

In general, a Limited Liability Company including a Limited Liability Foreign Capital Investment Company (PT. PMA) shall obtain the status of a Legal Entity after the deed of establishment has been legalized by the Minister of Justice, and the amendments to the statutes of the Limited Liability Company, which is a non-Foreign Capital Investment Company becomes a Limited Liability Foreign Capital Investment Company after the amendments to the statutes have obtained the approval of the Minister of Justice. One of the requirements for a Limited Liability Foreign Capital Investment Company in the process of obtaining legalization as well as approval of the amendments to the statutes of a PT. PMA from the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia is by a Letter of Approval

from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM). However, in practice there are problems in the process of it. One of the main problems in the long line of bureaucracy at the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in processing the existing applications so that it is either ineffective or inefficient and there are still some other relating problems in the process.

The implementation of the legislation which is not synchronized between one agency and another in relation with a PT. PMA, in this case between the BKPM and the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia also makes the process complicated to obtain legalization for as well as approval of the amendments to the statutes of the PT. PMA. Furthermore, there are problems in the coordination of the interconnected agencies which are not operating as it should be.

The implication of the problems in the process of the legalization of the deed of establishment and the approval of the amendments to the statutes of a Limited Liability Company in the framework of said PMA to foreign investors shall have an effect or impact which is not in favour to the development on investments in Indonesia so that taking advantage of foreign capitals in the effort to improve the economy fails to reach the maximum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Kerangka Teori	9
D. Tujuan Penelitian	25
E. Kontribusi Penelitian	26
F. Metode Penelitian	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PROBLEMATIKANYA	35
A. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas Dan Pengesahan Serta Perubahan Anggaran Dasarnya	35
1. Pengesahan Perseroan Terbatas	35
2. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas	39

a. Tanggung Jawab Terbatas	39
b. Status Badan Hukum	43
c. Tempat Kedudukan	49
3. Organ-Organ Perseroan Terbatas	51
a. Rapat Umum Pemegang Saham	51
b. Direksi	54
c. Komisaris	61
4. Permodalan Dan Saham Dalam Perseroan Terbatas	67
4.1. Permodalan	67
a. Struktur Permodalan	67
b. Penyetoran Modal	70
c. Perlindungan Modal Dan Kekayaan Perseroan	75
d. Penambahan Modal	79
e. Pengurangan Modal	82
4.2. Saham	86
a. Klasifikasi Saham	86
b. Nilai Nominal Saham	88
c. Pemindahan Hak Atas Saham	89
d. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas	93
5. Syarat-Syarat Dan Prosedur Pengesahan Akta Pendirian ...	96
5.1. Persyaratan	96
a. Perjanjian Antara Dua Orang Atau Lebih	96
b. Dibuat Dengan Akta Autentik	98

c. Modal Perseroan	99
d. Kewajiban Mengambil Bagian Saham	101
5.2. Prosedur :	101
a. Pembuatan Akta Dihadapan Notaris	101
b. Pengesahan Oleh Menteri Kehakiman	104
c. Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan	106
d. Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara ...	107
6. Syarat-Syarat Dan Prosedur Perubahan Anggaran Dasar ...	109
6.1. Persyaratan	109
a. Penyelenggaraan RUPS	109
b. Pemanggilan RUPS	110
c. Korum Untuk RUPS	113
d. Keputusan RUPS	114
6.2. Prosedur :	117
a. Perubahan Anggaran Dasar Dengan Akta Notaris .	117
b. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Oleh Menteri Kehakiman	118
c. Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan	119
d. Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara ...	120
B. Peranan Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi Serta Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	121
1. Pengertian Dan Bentuk Penanaman Modal Asing	121
a. Pengertian Penanaman Modal Asing	121

b. Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing	121
2. Peranan Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi	128
a. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia ..	128
b. Maksud Dan Tujuan Penanaman Modal Asing	136
3. Peraturan Pokok Perundang-undangan Berkaitan Dengan Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	138
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967	138
b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994	142
c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995	145
C. Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Dan Problematikanya	148
1. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ...	148
a. Keputusan Presiden Tentang BKPM	148
b. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi BKPM	150
2. Surat Persetujuan BKPM Untuk Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	152
2.1. Persetujuan Penanaman Modal Asing	152
2.2. Persetujuan Penanaman Modal Asing Berkaitan Dengan Undang-undang Perseroan Terbatas	156
a. Nama Perseroan Serta Bidang Usaha	156
b. Permodalan	158
c. Direksi Dan Komisaris	159
3. Peranan Departemen Kehakiman	161

3.1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Sebagai Dasar Hukum	161
3.2. Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	163
a. Tata Cara Pengajuan Permohonan	163
b. Proses Pemberian Pengesahan Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ...	169
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI PROBLEMATIKA PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING	175
A. Hasil Penelitian	175
1. Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA	176
2. Sinkronisasi Penerapan Peraturan Perundang-undangan Dalam Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA	240
3. Implikasi Problematika Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terhadap PT Dalam Rangka PMA	258
B. Pembahasan	262
1. Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA	263
2. Sinkronisasi Penerapan Peraturan Perundang-undangan Dalam Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA	290

3. Implikasi Problematika Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA	298
BAB IV : P E N U T U P	308
A. Kesimpulan	308
B. Saran	311
DAFTAR PUSTAKA	314
L A M P I R A N	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1 Jumlah Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dengan Sistem Manual	193
2. Tabel 2 Jumlah Permohonan Dan Hasil Proses Sistem Manual	194
3. Tabel 3 Uraian Pekerjaan Dan Jumlah Hari Yang Diperlukan Dalam Sistem Manual	195
4. Tabel 4 Jumlah Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PMA	200
5. Tabel 5 Jumlah Permohonan Dan Hasil Proses PT. PMA	202
6. Tabel 6 Jumlah Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Melalui SISMINBAKUM Maret 2001 – Maret 2002	227
7. Tabel 7 Jumlah Permohonan Dan Hasil Proses Melalui SISMIN- BAKUM Maret 2001 – Maret 2002	228
8. Tabel 8 Jumlah Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PMA Melalui SISMINBAKUM Maret 2001 – Maret 2002	230
9. Tabel 9 Jumlah Permohonan PT. PMA Melalui SISMINBAKUM Dan Hasil Prosesnya Maret 2001 – Maret 2002	231

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional kita harus mempunyai modal dasar. Modal dasar pembangunan ekonomi Indonesia adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak hanya mensyaratkan tersedianya modal dasar pembangunan. Pembangunan ekonomi berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, kemampuan manajemen dan peningkatan ketrampilan.¹ Hal tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Salah satu upaya untuk dapat secepatnya melaksanakan dan mewujudkan pembangunan ekonomi dalam keadaan keterbatasan finansial, teknologi, skill dan kemampuan manajemen, yang merupakan kendala untuk pembangunan ekonomi tersebut, adalah dengan mengundang modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia.

Pemanfaatan modal asing di Indonesia didasari oleh suatu keyakinan bahwa Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disebut PMA) dapat

¹ Zudan Arif Fakrulloh dan H. Hadi Wuryan, *Hukum Ekonomi*, Karya Abditama, Surabaya, 1997, hal.60

membantu percepatan modernisasi ekonomi dan struktur ekonomi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.²

Penanaman Modal Asing dapat berperan dalam meningkatkan produksi, memberikan perluasan kesempatan kerja, mengolah sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negeri. Sehingga secara menyeluruh penanaman modal asing diharapkan berperan dalam mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya.³

Dengan dasar tersebut, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia melalui penanaman modal asing. Untuk itu kemudian pada tahun 1967 pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang Penanaman Modal Asing yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah kemudian mengeluarkan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan mengeluarkan beberapa peraturan serta kebijakan lain dalam rangka menunjang pemanfaatan modal asing dimana salah satu diantaranya misalnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam

² Ibid, hal. 61

³ Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hal. 27

Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Didalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang PMA tersebut secara eksplisit ditegaskan bahwa modal asing dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

Penanaman modal asing Indonesia mulai terlihat berkembang hingga dekade tahun delapan puluhan, sebelum maraknya pesaing Indonesia dalam menarik investasi asing.

Sejak awal dasawarsa sembilan puluhan, RRC dan Vietnam muncul menjadi pesaing berat ASEAN dalam memperebutkan investasi modal yang berasal dari negara-negara maju, khususnya Jepang, Korea, Taiwan, Amerika Serikat dan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).⁴

Penanaman Modal Asing berdasarkan ketentuan Pasal 1 undang-undang tersebut meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.

Perusahaan yang didirikan dan dijalankan dalam rangka PMA tersebut

⁴ Ibid, hal. 199

sebagaimana ditentukan Pasal 3 Undang-Undang PMA harus berbentuk Badan Hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan Hukum yang tepat sebagaimana dimaksud UU PMA tersebut adalah perseroan terbatas. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang PMA juga mempertegas hal tersebut dimana dinyatakan bahwa jikalau partisipasi termaksud dalam ayat 1 Pasal ini (partisipasi bagi modal nasional) dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan. Bentuk saham-saham yang dimaksud Pasal 27 ayat 2 tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas karena hanya pada perusahaan berbentuk perseroan terbataslah dikenal bentuk saham.

Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, dimana sasaran umum pembangunan ekonomi antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata.

Departemen Kehakiman merupakan instansi yang berwenang memberikan pengesahan bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, baik Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing maupun bukan dan juga berwenang memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan sebagai

badan hukum namun kemudian merubah statusnya menjadi perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain banyak menarik minat investor (pemilik dana) karena adanya pembatasan liabilitas (pertanggungjawaban) dan kemudahan keluar masuk dari kepemilikan suatu perseoran terbatas. Pemilik dana menginginkan resiko sekecil mungkin pada dana yang ditanamkannya, sehingga bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dengan ciri tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi para pemegang saham dapat meminimalkan resiko yang berkaitan dengan dana. ⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri (Kehakiman). Untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, para pendiri perseroan terbatas bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan ke Departemen Kehakiman dengan melampirkan akte pendirian perseroan tersebut beserta dokumen lain yang terkait.

Untuk permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka PMA, salah satu dokumen penting yang harus terlampir dalam permohonan adalah Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

⁵ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal.1

Dengan demikian bagi Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka PMA terdapat dua instansi yang terkait dengan hal tersebut yaitu pertama adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan ketentuan formal berupa surat persetujuan penanaman modal asing bagi Perseroan Terbatas, dan yang kedua adalah Departemen Kehakiman yang memberikan pengesahan atas akta pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dimana dalam salah satu syarat untuk pertimbangan pemberian pengesahannya adalah adanya Surat Persetujuan dari BKPM tersebut.

Demikian juga bagi Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum namun tidak dalam rangka PMA tetapi kemudian akan merubah status perseroan menjadi Perseroan Terbatas dalam rangka PMA harus mendapat Surat Persetujuan dari BKPM sebelum mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya ke Departemen Kehakiman.

Didalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh BKPM tercantum beberapa hal yang nantinya akan tercantum pula dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yang akan diajukan permohonan pengesahannya sebagai badan hukum atau permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dalam rangka PMA ke Departemen Kehakiman, yaitu : nama perseroan, bidang usaha dan kegiatan usaha perseroan, susunan komisaris dan direksi, modal perseroan (modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor),

penyertaan dalam modal perseroan (pihak-pihak yang menyertakan modalnya dalam perseroan).

Bagi investor asing yang akan mendirikan perusahaan PMA dalam bentuk Perseroan Terbatas, disamping akan mempertimbangkan terlebih dahulu iklim ekonomi, stabilitas politik, sangat penting pula untuk melihat keadaan hukum dan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan penanaman modal asing di negara yang dituju yang pada umumnya ditangani oleh suatu birokrasi. Apakah prosedur yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut PMA dapat diprediksi sehingga terdapat kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum dan memberikan prospek yang baik bagi penanaman modal asing serta peningkatan investasi di Indonesia.

Dalam praktek terdapat kendala-kendala yang merupakan problematik yang ditemui pada proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

Banyak ketentuan formal terutama dalam bentuk surat persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi seperti BKPM sering bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena penerapan hukum khususnya penerapan undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya tidak sinkron antara Departemen Kehakiman sebagai instansi yang mengesahkan akta pendirian PT PMA serta memberikan persetujuan

perubahan anggaran dasar PT PMA dengan BKPM sebagai instansi koordinator penanaman modal asing.

Sementara proses penanganan PT dalam rangka PMA di Departemen Kehakiman sendiri masih menemui banyak kendala sehingga sulit diprediksi yang berakibat adanya ketidak pastian hukum.

Hal-hal tersebut di atas berdampak kurang menguntungkan terhadap investor asing yang akan melakukan investasi dengan mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka penanaman modal asing.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas yang merupakan problematika berkaitan dengan proses yang harus dihadapi oleh investor asing yang masuk ke Indonesia dengan membentuk perusahaan Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan tesis ini yaitu :

1. Bagaimana penanganan proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing di Departemen Kehakiman dapat diprediksi (*predictable*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagaimana sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan terhadap Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing khususnya antara

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai instansi koordinator Penanaman Modal Asing dengan Departemen Kehakiman sebagai instansi yang mengesahkan akta pendirian dan menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

3. Bagaimana implikasi dari problematika proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut terhadap upaya percepatan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan investor pemanfaatan investor asing yang mendirikan perusahaan dalam rangka PMA.

C. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini disusun kerangka teori untuk memberikan arah terhadap penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dan dikemukakan. Selain itu kegunaan teori dalam suatu penelitian antara lain untuk memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pengetahuan yang ada pada peneliti. ⁶

Metode yang digunakan untuk menyusun kerangka teori adalah dengan metode klasifikasi yaitu memilih ruang lingkup, mengumpulkan istilah-istilah yang pokok untuk kemudian disusun secara sistematis. ⁷

⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal.121

⁷ Ibid, hal. 129

Untuk menyamakan pengertian tentang masalah-masalah yang dikemukakan maka disusun beberapa definisi dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas mempunyai ciri utama yaitu bahwa Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggungjawab terbatas (limited liability) bagi para pemegang saham, anggota direksi dan komisaris. ⁸

Prinsip tanggungjawab terbatas pemegang saham dapat terlihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 UU PT yaitu bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Pada Pasal 85 ayat 1 UU PT disebutkan pula bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

PT sebagai suatu badan hukum berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai

⁸ Chatamarrasjid, Loc.Cit.

kekayaan atau utang, dimana tindakan hukum PT tersebut dilakukan melalui perantaraannya.⁹

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran atau kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Kehendak dari pesero pengurus (Direksi) menurut teori yang lazim dianut dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya.¹⁰

Dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain, maka bentuk PT lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha dari bentuk badan usaha yang lain. Hal ini disebabkan karena pemilik dana (investor) menginginkan resiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasinya. Bentuk PT banyak menarik minat para investor, karena perkembangan hak hidupnya dalam perekonomian banyak negara. Pembatasan liabilitas dan kemudahan keluar masuk dari kepemilikan suatu perseroan terbatas merupakan ciri PT yang menarik investor.¹¹

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, PT mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.

⁹ C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995, hal.23

¹⁰ Ibid

¹¹ Chatamarrasjid, Loc.Cit.

Karena PT menjalankan perusahaan maka tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan dan laba.

Untuk mendirikan suatu perseroan, perlu dipenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Ada tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT yaitu :

- a. PT didirikan oleh dua orang atau lebih (ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU PT).
Yang dimaksud dengan “orang“ adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Dan apabila perseroan sudah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, prinsip pemegang saham sekurang-kurangnya dua orang tetap dianut.
- b. Didirikan dengan akta otentik, dimana perjanjian pendirian PT harus dibuat dengan akta otentik di muka notaris mengingat perseroan adalah badan hukum (Pasal 7 ayat 1 UU PT). Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan.
- c. Modal dasar perseroan ditentukan dalam Pasal 25 UU PT paling sedikit Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Tetapi undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar PT melebihi Rp. 20.000.000 rupiah tersebut.

Misalnya bidang usaha perbankan, atau perasuransian. Menurut ketentuan Pasal 26 UU PT, pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25 % dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor paling sedikit 50 % setiap saham yang dikeluarkan. Selanjutnya bagi perseroan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum maka modal disetor harus 100 % dari setiap saham yang dikeluarkan.

Setelah persyaratan dipenuhi maka pendiri perseroan harus membuat akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan UU PT (Pasal 7 ayat 1 UU PT).

Akta pendirian perseroan yang dibuat di muka notaris itu dimohonkan secara tertulis pengesahannya kepada Menteri Kehakiman. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum PT diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat 6 UU PT).

Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dalam Pasal 1 menentukan bahwa penanaman modal asing yaitu, penanaman modal secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari

penanaman modal tersebut.

Perumusan Pasal di atas mengandung empat unsur pokok yaitu :

- a. Penanaman modal secara langsung
- b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan
- c. Perusahaan itu di Indonesia
- d. Resiko yang ditanggung oleh pemilik modal

Pengertian modal asing, diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia.
- b. Alat-alat perusahaan, termasuk dari luar negeri dan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai oleh kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan.

Berdasarkan Pasal 2 sub a di atas, maka alat pembayaran luar negeri adalah modal asing. Untuk menentukan alat pembayaran luar negeri mana yang termasuk dalam modal asing, dalam hal ini pembuat undang-undang menggunakan kriteria “kekayaan devisa Indonesia” tetapi UU PMA maupun UU Nomor 32 Tahun 1961 Tentang Peraturan Lalu lintas Devisa tidak memberikan

penjelasan tentang pengertian kekayaan devisa negara.

Devisa adalah saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia dan valuta asing lainnya, tidak termasuk uang logam yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia (Pasal 1 Ayat 4 Sub a,b UU Nomor 32 Tahun 1961).

Penguasaan devisa oleh negara tidaklah senantiasa bersifat kepemilikan oleh karena pemilikan devisa tidak terbatas pada negara saja akan tetapi terdapat pula devisa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi penguasaan oleh negara terhadap devisa dapat diartikan pemilikan devisa secara langsung diharuskan untuk diserahkan kepada dana devisa dan dapat pula penguasaan itu dalam arti mengatur atau menertibkan cara penggunaan ataupun cara pemakaian devisa yang dimiliki oleh WNI. ¹²

Berdasarkan uraian tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan devisa Indonesia adalah devisa yang dikuasai oleh negara dan dimiliki baik oleh negara maupun WNI. Jadi alat pembayaran luar negeri yang merupakan modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk pembiayaan perusahaan di

¹² Ismail Sunny dan Hudiono Rochmat, *UU PMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1960, hal.41

Indonesia dengan persetujuan pemerintah. Persetujuan pemerintah ini berupa ijin Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU PMA.¹³

Jika kita membaca pengertian modal asing seperti yang tertera di dalam UU PMA tersebut, nampaknya pengertian modal asing agak condong pada equity, suatu fresh capital yang datang dari luar negeri, meskipun diakui juga bahwa equipment, patent/teknologi baru juga termasuk dalam pengertian modal asing.¹⁴

Selanjutnya hasil keuntungan perusahaan yang tidak ditransfer tetapi diinvestasikan bisa juga dikatakan termasuk modal asing. Secara harafiah sebenarnya pengertian modal asing ini hampir lengkap.

Dari pengertian modal asing pada undang-undang PMA tersebut ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan :

1. Undang-undang tersebut tidak mengatur perihal kredit atau peminjaman modal melainkan hanya mengatur tentang penanaman modal asing, dengan demikian hubungannya dengan kemungkinan pembangunan perusahaan di tanah air kita dalam rangka menunjang pembangunan.
2. Memberikan kemungkinan perusahaan tersebut dijalankan dengan modal asing sepenuhnya (direct investment, joint venture dan joint enterprise).

¹³ Ibid.

¹⁴ Zudan Arif Fakrulloh dan H. Hadi Wuryan, op.cit, hal. 64

3. Direct investment, dalam hal ini selain modal juga kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya diperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia.
4. Joint Venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional.
5. Joint Enterprise merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, dalam bentuk kerja sama antara perusahaan.
6. Joint Enterprise merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, dalam bentuk kerja sama antara perusahaan.

Pasal 3 UU PMA menentukan perusahaan yang menggunakan modal asing harus berbentuk badan hukum, sebagai satu kesatuan perusahaan tersendiri. Persyaratan bentuk badan hukum ini bisa dipahami mengingat dibandingkan dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya seperti Firma, CV, dan sebagainya memiliki keunggulan tersendiri, khususnya dalam hal pertanggungjawaban atas kekayaan perusahaan. PMA oleh seorang asing dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan mengenai status hukum yang dipakai.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing.

Salah satu instansi yang berkaitan dengan penanaman modal asing yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 20 Tahun 1973 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970, dan sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 286 Tahun 1968, dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

BKPM adalah suatu lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BKPM mempunyai fungsi membantu Presiden dalam menentukan kebijaksanaan dibidang penanaman modal dan penilaian pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tugasnya BKPM menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Menyusun daftar skala prioritas penanaman modal secara berkala bersama-sama dengan departemen / lembaga pemerintah yang bersangkutan, serta menerbitkan daftar skala prioritas tersebut sebagai pedoman bagi para calon penanam modal.
- b. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
- c. Meneliti / menilai permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku.
- d. Mengajukan hasil penelitian / penilaian atas permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.

- e. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, menerbitkan izin usaha baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, izin pengusahaan bahan baku, pemberian angka pengenal importir / eksportir terbatas, izin kerja bagi tenaga asing yang bekerja dalam rangka penanaman modal, dan keputusan pemberian fasilitas keringanan pajak dan bea masuk bagi penanaman modal, dan izin usaha perdagangan hasil produksi barang / jasa dari penanaman modal.
- f. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan departemen yang membina penanaman modal.

Dalam kaitannya dengan Departemen Kehakiman, Menteri Kehakiman mengambil langkah-langkah untuk memperlancar pelaksanaan penanaman modal khususnya yang berhubungan dengan pengesahan akta pendirian badan hukum PT dalam rangka PMA maupun perubahan anggaran dasar PT yang telah mendapat pengesahan badan hukum menjadi PT dalam rangka PMA. Namun demikian masih dipertanyakan apakah antara BKPM dan Departemen Kehakiman yang merupakan institusi dalam suatu birokrasi yang terkait dengan masalah PMA satu sama lainnya dapat menerapkan hukum secara bersamaan dalam berbagai hal yang penting sehingga tercipta kepastian hukum yang berdampak positif bagi investor asing.

Birokrasi.

Keberadaan dan kehadiran birokrasi dimaksud untuk mengorganisir secara teratur suatu (program) pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi merupakan tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah moderen untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistim administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.¹⁵

Birokrasi dalam sebuah pemerintahan berfungsi untuk menghubungkan penguasa dan kepentingan rakyat agar segenap kepentingan rakyat dapat terpenuhi sesuai dengan kebijaksanaan publik yang kemudian tertuang didalam suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan etimologinya birokrasi berasal dari kata *bureau* yang berarti kantor atau meja, sedangkan krasinya dari kata *kratia* yang berarti pemerintahan. Dengan demikian birokrasi secara utuh berarti pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui instansi-instansi atau kantor-kantor.¹⁶

Berdasarkan tinjauan dari pengertian di atas, sebenarnya birokrasi adalah sistim atau cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya dengan menggunakan unit-unit organisasi yang berjenjang ke bawah secara hirarkis.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.109

¹⁶ G. Kartasapoetra, *Debirokratisasi dan Deregulasi*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal.2

Dalam prakteknya pada waktu birokrasi membesar dan unit kerjanya bertambah banyak timbul permasalahan karena terkadang pembagian dan tanggungjawabnya tidak jelas dan tidak konsisten yang berakibat terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggungjawab.

Birokrasi dalam pelayanannya akhirnya menjadi lambat dan tidak jelas lagi siapa yang berwenang mengambil keputusan sehingga pada tahap ini sering masyarakat dirugikan. Birokrasi yang demikian disebut *red-tape* dan hal ini banyak terjadi di Indonesia.

Birokrasi seharusnya bersifat netral, obyektif dan rasional dalam melaksanakan tugas yang harus diemban oleh mereka. Birokrasi diharapkan untuk dapat bersikap profesional dan mengabdikan sepenuhnya kepada kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Tugas utama aparat pemerintahan adalah turut memelihara dan memperkuat ketertiban umum dan hukum (*law and order*) tanpa pamrih atau untuk kepentingan golongan politik yang manapun.

Birokrasi yang netral dan mengabdikan kepada kepentingan umum belum banyak nampak di negara-negara berkembang atau negara-negara di Dunia Ketiga. Permasalahan yang dihadapi Dunia Ketiga untuk memberdayakan birokrasi dengan efektif dan efisien adalah karena kuatnya cengkaman secara politis dalam suatu birokrasi. Birokrasi dalam bentuk ini tidak bersifat melayani masyarakat dan bahkan mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga

perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tidak dapat terwujud.

Dalam kaitannya dengan proses pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing, instansi yang terkait dengan hal tersebut seperti BKPM dan Departemen Kehakiman adalah pelaksana-pelaksana birokrasi yang dapat menghambat kepentingan investor dan juga kepentingan pemerintah secara umum dibidang penanaman modal asing apabila sistim birokrasi yang dijalankan tidak sebagaimana mestinya dan tidak professional.

Prediktabilitas Hukum.

Dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal asing di Indonesia maka sistim hukum yang harus diterapkan adalah sistim hukum moderen. Hakikat atau inti dari suatu sistim hukum yang moderen adalah bahwa hukum itu dapat diprediksi.

Dengan sistim hukum yang predictable maka investor yang membentuk suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing dapat membuat dan merencanakan investasi yang dapat diprediksi akan mendatangkan laba atau keuntungan.

Ciri lain dari hukum moderen selain predictable adalah juga bersifat konsisten, transparan serta penerapannya uniform, sehingga menciptakan

kepastian hukum yang akhirnya mewujudkan adanya suatu perlindungan hukum.

Marc Galanter berpendapat bahwa ciri-ciri hukum moderen adalah :

- a. Hukum moderen dalam penerapannya bersifat konsisten dan uniform.
- b. Hukum moderen bersifat transaksional, artinya suatu hak dan kewajiban itu tumbuh dari transaksi-transaksi yaitu misalnya kontrak-kontrak. Hak-hak dan kewajiban didalam hukum moderen tidak timbul sebagai akibat dari keanggotaan seseorang dalam suatu lingkungan tertentu.
- c. Hukum moderen bersifat universal, walaupun ada pengaturan mengenai hal-hal yang khusus tetapi tidak terlepas dari ukuran-ukuran yang bersifat umum. Penerapan hukum dapat dijalankan berulang-ulang dan dapat diduga sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi atau bersifat predictable.
- d. Hukum moderen mempunyai sistim yang bersifat hirarkhis. Penerapan hukumnya teratur, dimulai dari tingkat pertama dan seterusnya. Dengan sistim ini dimungkinkan untuk menciptakan keadaan dimana keputusan-keputusan setempat dapat disesuaikan dengan ukuran atau standar nasional sehingga dimungkinkan untuk diterapkan secara uniform dan dengan demikian mudah untuk diprediksi.
- e. Hukum moderen diorganisasikan secara birokratis untuk mencapai uniformitas. Sistim hukum moderen bekerja secara impersonal, mematuhi peraturan-peraturan yang ditentukan untuk setiap kasus dan memberikan

keputusan untuk setiap kasus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertulis.

- f. Hukum moderen bersifat rasional. Dengan sifat ini maka peraturan-peraturan dinilai dari sisi kemanfaatannya secara instrumental, apakah suatu peraturan mampu dipakai untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Dengan demikian hukum dinilai dari kualitas fungsionalnya bukan dari kualitas formalnya.
- g. Hukum moderen dilaksanakan dan dijalankan oleh ahli-ahli yang secara khusus belajar untuk menjalankan fungsi hukum.
- h. Hukum moderen menciptakan sistim yang dapat diubah-ubah dimana hukum moderen memuat metode-metode dan cara-cara untuk melakukan review atau peninjauan kembali peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang berubah.
- i. Hukum moderen bersifat politis, artinya hukum dikaitkan dengan negara dan negara mempunyai monopoli dalam membuat peraturan hukum.
- j. Hukum moderen memisahkan dan membedakan tugas menemukan dan menerapkan hukum antara tugas legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Dengan demikian esensi dari sistim hukum moderen adalah prediktabilitas. Hal tersebutlah yang mendorong dan merupakan salah satu faktor terjadinya pembangunan ekonomi. Sebaliknya hukum di Indonesia khususnya yang mengatur dunia usaha belum bersifat fleksibel. Sebagian besar peraturan yang mengatur dunia usaha seperti pengesahan bentuk usaha badan hukum

perseroan terbatas, peraturan mengenai penanaman modal asing masih tidak mudah diprediksi. Hal tersebut menimbulkan masalah bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, terutama yang membuat perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan suatu gambaran mengenai bagaimanakah problematika yang timbul pada proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar bagi Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.

Selain itu secara khusus tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk :

1. Mengkaji dan menjelaskan tentang bagaimana Departemen Kehakiman menangani proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing, apakah tepat waktu dan dapat diprediksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkaji dan menjelaskan mengenai sejauh mana sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan terhadap Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing yaitu antara BKPM sebagai instansi koordinator penanaman modal asing dengan Departemen Kehakiman sebagai instansi

yang mengesahkan akta pendirian dan menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

3. Meneliti dan menggambarkan implikasi dari problematika dalam proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas terhadap upaya percepatan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan investor asing yang mendirikan perusahaan dalam rangka penanaman modal asing.

E. Kontribusi Penelitian

Didalam penelitian tesis ini sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dari sisi teoritis dan sisi praktis.

1. Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada disiplin bidang hukum ekonomi dan teknologi terutama mengenai perlindungan hukum bagi perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

2. Praktis.

- a. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi Departemen Kehakiman sebagai instansi yang terkait dengan penanganan Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing dalam penanganan proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar

Perseroan Terbatas dengan menciptakan sistim penanganan yang efektif dan efisien sehingga dapat diprediksi dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memberikan masukan dan saran kepada instansi yang terkait dengan penanganan Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing dalam hal penerapan peraturan yang sinkron satu sama lain agar tidak menimbulkan permasalahan bagi investor asing yang mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing sehingga tercapai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor asing.
- c. Dapat memperkecil permasalahan yang timbul dalam proses penanganan pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor asing yang mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

F. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini yang berjudul “Problematika Proses Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing” membutuhkan data yang akurat yang dititik beratkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dan data

primer dari penelitian lapangan yang mendukung pengkajian data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas. Supaya data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena dengan pendekatan tersebut akan lebih mudah untuk menekankan pada segi abstraksi dan pendekatan sosiologis (empiris) yang lebih mudah untuk menekankan kepada segi observasi (Sumardjono, 1989 : 7).

Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang meliputi penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* (Roni Hanityo Sumitro, 1990 : 12). Untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum dari suatu instansi yang ada dapat diterapkan yaitu dengan menganalisa data sekunder dan diteliti taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dari peraturan-peraturan hukum tertulis (Soerjono Soekanto, 1984 : 50).

Taraf sinkronisasi vertikal yaitu sinkronisasi suatu peraturan berdasarkan hirarkhis peraturan perundang-undangan, sedangkan sinkronisasi horisontal yaitu sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan lain dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik.

Sebagai suatu penelitian yang dititik beratkan kepada data sekunder, fokus yang diteliti adalah sistematika dari perangkat kaedah hukum yang terhimpun didalam peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan problematik proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran mengenai berbagai aspek dari institusi dan kegiatan mekanisme dalam proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing, yaitu faktor-faktor yang menimbulkan berbagai kendala dalam proses tersebut di atas, penerapan peraturan perundang-undangan oleh instansi yang terkait yang merupakan suatu birokrasi dalam rangka proses tersebut yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap investor asing yang mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas.

Dari penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis tersebut di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan umum mengenai problematika yang timbul dalam proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

3. Sumber Data.

Data yang diperlukan meliputi data sekunder sebagai titik berat dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat publik, berupa data resmi yang berkaitan dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu Surat Persetujuan BKPM untuk perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman yaitu pengesahan serta persetujuan PT dalam rangka PMA, buku-buku dan dokumen-dokumen publik lain yang berkaitan dengan permasalahan penanganan perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi : ¹⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu materi hukum yang bersifat mengikat terhadap institusi dan kegiatan proses penanganan oleh institusi tersebut bagi perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing yang terdiri dari :
 - a.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
 - a.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.11.

- a.3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- a.4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- a.5. Peraturan Pemerintah.
- a.6. Keputusan Presiden.
- a.7. Keputusan Menteri.
- a.8. Keputusan BKPM.
- a.9. Yurisprudensi-yurisprudensi yang ada hubungannya dengan masalah penanaman modal asing dan masalah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, ¹⁸ dalam hal ini yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, karya ilmiah, disertasi, literatur yang berhubungan erat dengan penanaman modal asing, perseroan terbatas dan khususnya tentang proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

¹⁸ Ibid, hal.12.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, ¹⁹ dalam hal ini seperti kamus hukum, kamus ekonomi, ensiklopedia hukum dan ekonomi, kamus besar bahasa Indonesia dan berbagai majalah atau surat kabar yang dapat mendukung dan melengkapi buku-buku yang telah diperoleh.

Sedangkan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang dimaksudkan sebagai pendukung dalam mengkaji data sekunder diperoleh melalui penelitian di lapangan. Data primer diharapkan diperoleh dari narasumber yang diarahkan kepada atau pandangan para praktisi dibidang penanaman modal asing dan penanganan perseroan terbatas, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan hukum perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

Untuk memperoleh data-data tersebut di atas, peneliti menentukan sumber data sebagai berikut :

- a. Departemen Kehakiman sebagai instansi yang memproses permohonan pengesahan akta pendirian atau memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.
- b. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai instansi yang mengeluarkan produk hukum berupa Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing bagi

¹⁹ Ibid.

perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

- c. Konsultan hukum.
- d. Notaris pembuat akte pendirian dan akte perubahan anggaran dasar dalam PT rangka PMA.
- e. Perusahaan Penanaman Modal Asing
- f. Pendapat para pakar dibidang penanaman modal asing.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan sebagaimana telah disebutkan di atas, pengumpulan data terutama dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- * Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan (Library Research), Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa :
 - a. Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaedah dasar berupa Undang-Undang Dasar, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya berdasarkan hirarkhis perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan menyangkut bidang penelitian.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum sekunder, hasil penelitian, hasil-hasil seminar atau penelitian ilmiah dan

karya ilmiah para pakar mengenai masalah yang sesuai dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia yang dapat mendukung, menjelaskan dan melengkapi bahan-bahan yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

MENGENAI

PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL ASING

DAN PROBLEMATIKANYA

A. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas Dan Pengesahan Serta Perubahan Anggaran Dasarnya

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata *sero* artinya saham dalam suatu perkongsian, *pesero* artinya pemegang saham atau peserta dalam persekutuan dagang, *perseroan* artinya perserikatan dagang, kongsi atau juga disebut juga maskapai. Menurut Pasal 1618 KUH Perdata yang disebut perseroan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang didapat karena persekutuan itu. Jadi perseroan disini berarti suatu perserikatan perdata yang mengandung unsur-unsur kehendak bersama, kerjasama, tujuan bersama, pembagian keuntungan.¹

Dalam pengertian umum, kata “perseroan” dapat diartikan sebagai perusahaan atau dengan kata lain sebagai organisasi / badan usaha. Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum di

¹ H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal.108.

Indonesia, khususnya dalam sistem hukum dagang, adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu *Commanditaire Vennootschap*) dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk usaha perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha selain Perseroan Komanditer dan Perseroan Firma yang biasa dipergunakan dalam kegiatan perekonomian, dimana ketentuan mengenai perseroan terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Buku Kesatu Bab Ketiga Undang-undang Hukum Dagang (yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas). ²

Bentuk Perseroan Firma dan Perseroan Komanditer diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Perseroan Firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD). Sedangkan yang dimaksud dengan persekutuan perdata ialah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Perseroan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung

² I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, hal.1.

jawab solider) pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain (Pasal 19 KUHD). ³

Perseroan Terbatas, bentuk atau sebutannya berasal dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatan tersebut juga digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT (Perseroan Terbatas).

Di dalam bahasa Indonesia disebut perseroan terbatas, kata *terbatas* diambil dari bahasa Inggris *limited* yang artinya terbatas atau berhingga, yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja, tidak termasuk kekayaan pribadi peseronya. ⁴

Sebenarnya tidak ada undang-undang yang secara khusus dan resmi mengatur ketentuan perubahan sebutan *Naamloze Vennootschap* menjadi Perseroan Terbatas, namun sebutan Perseroan Terbatas (PT) telah menjadi baku dalam masyarakat. ⁵

Naamloze atau tanpa nama berarti tanpa nama orang, maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari maksud dan tujuan

³ C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1995, hal.23.

⁴ H. Hilman Hadikusuma, op.cit., hal.111.

⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.1.

perusahaan saja (Pasal 36 KUHD). Tanpa nama orang (orang-orang) itu pada bentuk perseroan ini memang sewajarnya berhubung adanya kemungkinan berubahnya orang-orang yang memegang saham di perseroan tersebut. ⁶

Pengertian Perseroan Terbatas baru diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut memberikan pengertian atau definisi tentang perseroan terbatas yaitu sebagai berikut : *"Perseroan Terbatas atau PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"*.

Sehubungan dengan pengertian PT yang berkenaan dengan pemegang saham, ada 2 (dua) macam PT, yaitu PT. Tertutup dan PT. Terbuka. Untuk PT. Tertutup adalah merupakan perseroan terbatas yang modalnya dimiliki para pemegang saham yang pada umumnya masih saling mengenal satu sama lain, misalnya anggota keluarga, sahabat, kenalan dimana pendiriannya tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas. ⁷

Artinya di dalam PT. Tertutup tidak setiap orang dapat ikut serta dalam

⁶ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal.119.

⁷ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.33.

modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Sedangkan PT. Terbuka, sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 butir b, adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Pendirian PT. Terbuka, disamping harus memenuhi ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, juga ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 butir b Undang-undang Perseroan Terbatas untuk PT. Terbuka, dalam undang-undang tentang Pasar Modal Bab I Ketentuan Umum memberikan batasan bahwa Perusahaan Publik (PT. Terbuka) adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁸ Artinya di dalam PT. Terbuka yang dapat ikut serta dalam penyertaan modal adalah setiap orang siapapun dapat membeli satu atau beberapa saham.

2. Ciri-ciri Perseroan Terbatas

a. Tanggung Jawab Terbatas

⁸ I. G. Rai Widjaya, op.cit., hal.2.

Salah satu ciri utama perseroan terbatas adalah tanggung jawab pemegang saham yang terbatas. Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Pertanggungjawaban terbatas disini dalam pengertian, bila terjadi hutang atau kerugian yang terjadi pada perseroan maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Perseroan mempunyai harta kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham { Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas } dan harta kekayaan dalam bentuk lain, misalnya gedung kantor perseroan, barang inventaris perseroan yang diperoleh dari usaha perseroan.⁹

Dengan demikian, apabila dilakukan perbuatan untuk dan atas nama PT, maka dianggap sebagai perbuatan itu dilakukan oleh PT itu sendiri, bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan, sehingga sebagai konsekuensinya segala akibat dan hutang yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh PT itu sendiri yaitu dengan harta kekayaan PT yang

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.76.

bersangkutan, tanpa sedikitpun dapat meminta pertanggungjawaban dan atau menuntut untuk dibayar dari harta kekayaan pribadi orang-perorangan yang mewakili PT melakukan perbuatan. Hal ini akibat dari pandangan bahwa PT merupakan badan hukum yang mandiri yang eksistensinya dianggap terlepas dari manusia orang-perorangan. Atas dasar hal ini kerap kali orang memilih bentuk PT karena dapat memperkecil resiko kerugian.¹⁰

Pertanggungjawaban pemegang saham pada mulanya merupakan persoalan yang diperdebatkan, karena ada yang berpendapat bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tidak boleh lebih dari nilai saham yang diambarnya, sejalan dengan pengertian kata “terbatas”. Permasalahannya adalah apakah prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham tersebut bisa dihapus atau tidak mutlak. Dalam hal-hal tertentu disini maksudnya antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan atau dimanfaatkan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.¹¹

Pertanggungjawaban terbatas pemegang saham tersebut tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku

¹⁰ Rudhi Prasetya, op. cit; hal.50.

¹¹ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.2.

karena ada pengecualiannya, dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Disini terlihat bahwa undang-undang perseroan terbatas menganut prinsip *piercing corporate veil* yang secara harfiah artinya menyingkap tabir atau cadar perseroan.¹²

Bahwa undang-undang PT menganut prinsip *piercing corporate veil* terlihat dari Pasal 3 ayat (2) dimana pertanggung jawaban terbatas pemegang saham tidak berlaku apabila :¹³ persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ; pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi ; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan ; pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Sebagai perbandingan, di Amerika ada tiga keadaan yang dapat menyebabkan pengadilan mengabaikan statuta perseroan, yang dikenal sebagai *piercing the corporate veil*, yaitu apabila :¹⁴ tujuan perseroan dan formalitas-formalitas diabaikan, pemegang saham memperlakukan asset perseroan sebagai

¹² Ibid. hal.3.

¹³ Ibid.

¹⁴ I. G. Rai Widjaya, op. cit., hal.5.

harta mereka sendiri, serta para pejabat (*officers*) gagal menjaga catatan-catatan atau dokumen yang perlu ; perseroan tidak cukup modal (*undercapitalized*), sedangkan peraturan umum menyebutkan bahwa para pemegang saham harus cukup modal awal untuk menutupi setiap pasiva yang terjadi dalam menjalankan usaha ; perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang, sebagai contoh, statuta perseroan secara curang dimanfaatkan oleh individu pemegang saham yang mengalihkan semua kekayaannya ke perseroan, untuk menghindari membayar utang pribadi.

b. Status Badan Hukum

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum. ¹⁵

Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum atau “*artificial person*” mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “wakilnya”. Oleh karena

¹⁵ R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001, hal.1.

itu perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum mandiri ("*persona standi in judicio*"). Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. ¹⁶

Badan Hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban memiliki status personel seperti halnya manusia. Status inilah yang nantinya menentukan hak dan kewajiban badan hukum itu termasuk di dalamnya keberadaan dan berakhirnya badan hukum itu. ¹⁷

Pengertian subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia dalam pengertian subjek hukum adalah orang-perorangan (*naatur lijk persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*). ¹⁸

Manusia dalam pengertian orang-perorangan baru dapat bertindak dalam hukum atau melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah dewasa. Orang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun, sedangkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum apabila ia sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Tidak cakap melakukan tindakan hukum secara *a contrario* dinyatakan dalam Pasal 1330 KUH Perdata sebagai berikut : Tidak

¹⁶ I. G. Rai Widjaya, op.cit., hal.7.

¹⁷ Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal.1.

¹⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hal.11.

cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah anak yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang telah dilarang untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu. ¹⁹

Dengan demikian subjek hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu subjek hukum “orang” dan subjek hukum “bukan orang”. Subjek hukum “bukan orang” adalah badan hukum. Jadi bukan hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum tetapi juga perkumpulan manusia bersama-sama dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan hukum dan badan hukum ini sebagai subjek hukum yang baru serta mandiri. Disini badan hukum adalah suatu realitas disamping manusia sebagai subjek hukum. ²⁰

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Dalam Burgerlijk Wetboek Indonesia atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* secara lengkap. Tidak dijumpai juga kata *rechtspersoon* itu dalam Bab IX Buku III KUH. Perdata, walaupun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu

¹⁹ I. G. Rai Widjaya, op.cit., hal.8.

²⁰ Chidir Ali, op.cit., hal.10.

memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.²¹

Mengenai istilah *rechtspersoon* dalam terjemahan Indonesianya ada istilah lain yang dikemukakan ahli hukum atau penulis hukum Indonesia. Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum berpendapat :

“Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, maka *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya *susila*. Oleh karena istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita penggunaan pengertian itu dengan terjemahan *pribadi hukum*”.

Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek hukum. Apa dan siapa badan hukum itu ? Pertanyaan *apa badan hukum* itu tidak lain merupakan persoalan teori hukum sebagai teori dari hukum positif, sedangkan pertanyaan *siapa badan hukum* itu merupakan persoalan hukum positif.²²

Jawaban atas pertanyaan *apa badan hukum* itu bertitik tolak dari jawaban apa subjek hukum yang pengertian pokoknya pertama adalah manusia dan kedua adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Rumusan yang kedua ini merupakan jawaban atas *apa badan hukum* itu. Sedangkan jawaban atas

²¹ Ibid, hal. 15.

²² Ibid, hal. 17 dan 18.

pertanyaan *siapa badan hukum*, jawabannya dapat bertitik tolak dari jawaban siapa subjek hukum menurut hukum positif yaitu manusia dan badan hukum. Jadi siapa badan hukum itu, jawabannyapun merupakan persoalan hukum positif, artinya jawabannya tergantung pada hukum yang berlaku disuatu negara tertentu, yaitu apakah sesuatu telah diakui atau ditentukan sebagai badan hukum. Contohnya seperti hukum positif Indonesia mengakui yayasan sebagai badan hukum (KUH Perdata Pasal 365 dan yurisprudensi), sedangkan hukum positif yang berlaku di Inggris misalnya tidak mengakui yayasan sebagai badan hukum. Atau Firma , di Indonesia belum diakui sebagai badan hukum, sedangkan hukum Perancis (yurisprudensi dan doktrin) dan Belgia (berdasarkan undang-undang) mengakui Firma sebagai badan hukum. ²³

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berpikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai "*centraal bewustzijn*". Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungan-gugat badan hukum. ²⁴

²³ Ibid, hal.22.

²⁴ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1956, hal.39.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang perseroan atau perseroan terbatas (dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56) memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Namun istilah badan hukum sudah merupakan istilah resmi dan dapat dijumpai dalam produk perundang-undangan antara lain dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam Pasal 12 *Hamsterwet* (Undang-undang Penimbunan Barang) L.N. 1951 No.90 jo. L.N. 1953 No.4. Kekhususan *Hamsterwet* ini adalah bahwa *Hamsterwet* menjadi peraturan paling pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum, kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No.027; dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 antara lain Pasal 4 ayat (1); dalam Perpu Nomor 19 Tahun 1960 dan lain sebagainya. ²⁵

Istilah badan hukum bagi perseroan terbatas secara tegas baru dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

Sebagai akibat dibentuknya perseroan terbatas maka terciptanya badan hukum (*legal entity*), keberadaan PT berlangsung sampai dibubarkan secara hukum. Hukum memperlakukan pemilik dan pengurus terpisah dari perseroan dan

²⁵ Ibid, hal.17.

PT sebagai subjek hukum dipersamakan dengan subjek hukum manusia (*artificial person*) adalah kebalikan dari orang-perorangan (*natural person*). Konsekuensi PT sebagai badan hukum adalah PT dapat memiliki harta kekayaan atas namanya, pemilik tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, pemilik tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang PT, pemilik tidak bisa digugat langsung oleh kreditor, dalam hal tanggung jawab yang ditimbulkan oleh perseroan.²⁶

c. Tempat Kedudukan

Perseroan terbatas mempunyai tempat kedudukan atau domisili. Tempat kedudukan perseroan terbatas (PT) adalah di dalam wilayah Republik Indonesia. Tempat kedudukan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar yaitu dicantumkan dalam Pasal 1 anggaran dasar perseroan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, perihal tempat kedudukan perseroan ditentukan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Tidak ditentukan secara tegas bahwa tempat kedudukan tersebut juga sekaligus kantor pusat perseroan. Dengan demikian tidak ada ketentuan undang-undang yang mensyaratkan tempat kedudukan PT itu harus di kantor pusatnya atau di pusat kegiatannya. Bisa saja

²⁶ Chatamarrasjid, op. cit; hal.10.

terjadi tempat kedudukan suatu PT di Semarang tetapi kantor pusatnya di Jakarta dan kegiatannya terpusat di Kalimantan. Oleh sebab itu tempat kedudukan ini disebut "*domisili statuter*", artinya domisili sebagaimana ditentukan dalam statuta.²⁷

Oleh Van der Grinten disebutkan bahwa pentingnya kedudukan statuter (tempat kedudukan) karena sifat badan hukum yang dianggap sama dengan manusia alamiah, sebagaimana halnya seorang manusia alamiah selalu mempunyai tempat kedudukan resmi. Van der Grinten menyatakan pula bahwa kedudukan statuter itu penting pula dalam menentukan "*nationaliteit*" dan "*rechtelijke competentie*". Mengenai *nationaliteit* atau kewarganegaraan suatu badan hukum, memang menurut pendirian yang kuno harus ditentukan dari tempat negara dimana kedudukan ditentukan dalam anggaran dasarnya, namun pendirian ini sudah lama ditinggalkan karena kebanyakan orang berpendirian bahwa untuk menentukan kewarganegaraan suatu badan hukum, kita harus berpaling melihat hukum negara mana yang diikuti dalam pendirian badan hukum yang bersangkutan.²⁸

Sedangkan "*rechtelijke competentie*" yaitu dalam hubungan dengan cara beracara di pengadilan. Jika kita melihat dalam HIR yang mengatur tentang beracara perdata, hal tersebut terdapat dalam Pasal 118 dimana dalam ayat (1)

²⁷ Rudhi Prasetya, op. cit; hal.244.

²⁸ Ibid, hal.245.

pasal ini terkandung asas bahwa perkara harus diajukan ke pengadilan negeri yang mempunyai wewenang di tempat kedudukan (tempat tinggal) si tergugat. Maka dalam hal tergugat adalah suatu PT, dalam ayat (4) pasal tersebut ditentukan yaitu harus diajukan ke pengadilan negeri yang mempunyai wewenang ditempat yang dipilih menurut akta (pendirian anggaran dasar) PT tersebut. Tetapi bagaimana jika PT mempunyai cabang-cabang di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia ?. Dalam hal ini HIR tidak mengaturnya, namun yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan pendiriannya bahwa bila mungkin menurut hukum suatu perseroan dari tempat dimana perseroan itu menurut akta pendiriannya didudukkan (*gevestigd*), juga dapat digugat di muka pengadilan dari anak-anak (cabang) kantornya. Terhadap yurisprudensi ini Ting Swan Tiong berpendapat bahwa putusan ini dapat dilakukan apabila soal yang digugat termasuk lingkungan kantor cabang itu. ²⁹

3. Organ-organ Perseroan Terbatas

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Di dalam Bab I Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 ayat (3) UU PT ditentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas. RUPS memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada organ lain dalam

²⁹ Ibid, hal.247.

perseroan yaitu Direksi atau Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu wadah dimana para pemegang saham perseroan terbatas berkumpul, sehingga terbentuk suatu organ / lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan.³⁰

Kehendak para pemegang saham dalam RUPS yang dijemakan dalam suatu keputusan dianggap sebagai kehendak perseroan yang tidak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan atau melampaui batas-batas yang ditentukan undang-undang, khususnya Undang-undang Perseroan Terbatas dan atau anggaran dasar perseroan itu sendiri.³¹

Untuk melaksanakan kewenangan RUPS dan dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, maka RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

Kewenangan RUPS yang eksklusif sebagai akibat dari pemilikan kekuasaan tertinggi dalam PT, dapat dibedakan yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas dan kewenangan eksklusif dalam anggaran dasar perseroan semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang

³⁰ R. T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 67.

³¹ C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, hal.105.

disahkan atau disetujui oleh Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.³²

Kewenangan eksklusif yang dimiliki RUPS yang diberikan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu antara lain :³³ Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 14 UU PT) ; Penetapan penambahan modal perseroan (Pasal 34 UU PT) ; Penetapan pengurangan modal perseroan (Pasal 37 UU PT) ; Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan (Pasal 60 UU PT) ; Penentuan penggunaan laba (Pasal 62 UU PT) ; Pengangkatan, pemberhentian, pembagian tugas wewenang Direksi dan Komisaris (Pasal 80, Pasal 81, Pasal 91, Pasal 95 dan Pasal 101 UU PT) ; Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (Pasal 105 UU PT) ; Penetapan pembubaran perseroan (Pasal 114 UU PT).

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak :³⁴ Rencana perubahan anggaran dasar ; Rencana penjualan asset dan pemberian jaminan hutang ; Pengangkatan dan pemberhentian

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, hal.66 dan 67.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

anggota Direksi dan atau Komisaris ; Laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi ; Pertanggungjawaban Direksi ; Rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan ; Rencana pembubaran perseroan.

b. Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pada prinsipnya Direksi bertanggungjawab terhadap perseroan (pemegang saham secara keseluruhan) bukan kepada pemegang saham secara perseorangan. Tugas kepengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.³⁵

Pengurusan, pengertiannya mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan, karena itu Undang-undang Perseroan mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip "*fiduciary duty*" yang mencakup juga "*duty of skill and care*" oleh Direksi. Hal ini tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi, bahkan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga

³⁵ Ibid , hal.72.

perseroan dirugikan, dia bertanggungjawab penuh secara pribadi, dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena pentingnya peranan Direksi, Undang-undang Perseroan mengatur persyaratan yang cukup berat untuk menjadi anggota Direksi.³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU PT, kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi (ayat 1). Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi (ayat 2). Hal ini perlu mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab Direksi jika hanya dijalankan oleh satu orang anggota Direksi.

Pasal 79 ayat (3) UU PT menentukan bahwa anggota Direksi yang dapat diangkat adalah orang perseorangan yang : mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit ; atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ; atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Jangka waktu lima tahun dihitung sejak yang bersangkutan

³⁶ Ibid, hal.73.

dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhutang sejak selesai menjalani hukuman.

Kemudian Pasal 81 UU PT menegaskan bahwa berdasarkan RUPS juga ditetapkan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS yang disebutkan tadi dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Pasal 82 UU PT).

Apabila anggota Direksi terdiri dari 1 (satu) orang maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Perseroan dan atau Anggaran Dasar. Undang-undang Perseroan memilih sistem perwakilan kolegial, tetapi untuk kepentingan praktis masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. ³⁷

Dalam anggaran dasar dapat juga ditentukan pembatasan wewenang anggota Direksi. Penentuan pembatasan wewenang Direksi diatur dalam Pasal 84 UU PT. Menurut ketentuan pasal ini, anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila : terjadi perkara di depan Pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan ; atau anggota Direksi yang bersangkutan

³⁷ I. G. Rai Widjaya, op.cit., hal.68.

mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan seperti yang tersebut di atas. Apabila Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan mengenai yang berhak mewakili perseroan, maka RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan menggugat di muka Pengadilan Direksi yang merugikan perseroan.³⁸

Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya { Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU PT }.

Selain itu, ditentukan dalam Pasal 86 UU PT bahwa Direksi juga wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan perseroan. Daftar Pemegang Saham, Risalah, dan Pembukuan tersebut disimpan ditempat kedudukan perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, Risalah, dan Pembukuan perseroan.

Berkaitan dengan harta kekayaan perseroan, maka Direksi berkewajiban untuk meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan

³⁸ Abdulkadir Muhammad, op.cit., hal.75.

hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Perbuatan hukum tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.³⁹

Untuk perseroan yang *go public* yang menerbitkan obligasi atau obligasi konversi kemungkinan sulit untuk memenuhi syarat memperoleh persetujuan RUPS dalam hal pengalihan atau penjaminan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Alasannya ialah kemungkinan sebagian atau seluruh kekayaannya dijadikan jaminan. Hal ini wajar, karena perseroan *go public* menghimpun dana dari masyarakat pemegang obligasi.⁴⁰

Untuk masalah kepailitan perseroan, Direksi hanya dapat berwenang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara bertanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Namun anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 90 UU PT.⁴¹

³⁹ Ibid, hal.76.

⁴⁰ Ibid, hal.77.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi Dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001, hal.97.

Jika kita melihat ketentuan Pasal 90 UU PT tersebut maka ketentuan tersebut mempunyai kesamaan dengan ketentuan Pasal 47 KUHD, yaitu kesamaan mengenai tanggungjawab pribadi Direksi secara tanggung renteng (*personal liability*) dalam hal perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan Direksi, sedangkan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kerugian itu. Tetapi antara kedua ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang prinsip yaitu : ⁴²

- i. Pasal 47 KUHD menetapkan secara tegas batas kerugian mencapai 75% dari modal dasar, demi hukum perseroan bubar dan perbuatan Direksi setelah perseroan bubar adalah perbuatan pribadi, akibatnya dia bertanggungjawab pribadi secara tanggung renteng terhadap para kreditur.
- ii. Pasal 90 UU PT tidak menetapkan batas kerugian, dan kepailitan tidak demi hukum membuat perseroan bubar, kecuali jika dimohonkan kepada dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Direksi bertanggungjawab pribadi terhadap para kreditur dalam hal kekayaan perseroan tidak mencukupi.

Mengenai permasalahan tanggung jawab pribadi ini dapat ditelaah melalui putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1973 dimana dalam putusan tersebut PT. TUJUH BELAS dianggap tidak dapat membayar hutangnya, walaupun sudah dihukum untuk membayar oleh

⁴² Abdulkadir Muhammad, Loc.cit.

Pengadilan. Dalam eksekusi, rumah pribadi anggota Direksi PT yang bersangkutan telah disita. Walaupun rumah itu bukan asset milik perseroan, ternyata anggota Direksi tersebut dianggap secara pribadi juga bertanggungjawab terhadap tuntutan pihak kreditur.⁴³

Berdasarkan keputusan RUPS, anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan dengan menyebutkan alasan pemberhentian. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka RUPS dapat memberhentikan tanpa kehadirannya.

Anggota Direksi dapat juga diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Komisaris dengan menyebut alasannya. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugasnya.

Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, harus segera diadakan RUPS. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Kemudian berdasarkan pertimbangan, RUPS dapat mencabut keputusan

⁴³ Ibid, hal.78.

pemberhentian sementara, atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan. Tetapi jika dalam waktu 30 (tigapuluh) hari tidak diadakan RUPS, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

c. Komisaris

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas mengharuskan adanya kelembagaan Komisaris sebagai salah satu organ pada perseroan terbatas. Undang-undang tersebut mengatakan bahwa perseroan terbatas mempunyai tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.⁴⁴

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengharuskan adanya kelembagaan Komisaris, meskipun dalam kenyataannya banyak perseroan terbatas yang didirikan dengan dasar undang-undang tersebut mempunyai Dewan Komisaris. KUHD tidak memberikan penjelasan mengenai fungsi Dewan Komisaris dan dalam prakteknya Anggaran Dasar perseroan terbatas menjelaskan secara singkat mengenai peranan Dewan Komisaris yang diangkat dan dipilih oleh rapat umum pemegang saham untuk melaksanakan pengawasan yang diperlukan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan.⁴⁵

Konsep Dewan Komisaris berasal dari perundang-undangan negeri

⁴⁴ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris (Peranannya Sebagai Organ Perseroan)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal.59.

⁴⁵ Ibid, hal.40.

Belanda. Dewan Komisaris adalah terjemahan dari bahasa Belanda, *raad van commissarissen*, oleh sebab itu konsep Dewan Komisaris masih banyak persamaannya dengan *raad van commissarissen* di negeri Belanda. Karena pada masa lalu perusahaan pribumi di Indonesia, pada umumnya tidak sebesar perusahaan di negeri Belanda, maka terdapat variasi bentuk *raad van commissarissen*. Ada anggota Komisaris yang ditunjuk, ada yang ditetapkan oleh suatu kelompok dan ada pula yang mewakili pemegang saham tertentu. Semula tidak ada perbedaan dengan Dewan Komisaris yang dikenal di Indonesia yaitu unsur yang mewakili kepentingan pemegang saham, dan hingga kini kita masih mengikuti konsep ini yang merupakan peninggalan dari perundang-undangan Belanda.⁴⁶

Namun pada saat ini *raad van commissarissen* merupakan lembaga pengawasan semata-mata untuk kepentingan perseroan, dan tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham tetapi harus mempertahankan kepentingan dari perseroan terhadap siapa saja, termasuk pemegang saham. Dewan ini mempunyai tugas sendiri yang merupakan organ perseroan tetapi bukan merupakan wakil dari pemegang saham atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.⁴⁷

Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

Direksi dalam menjalankan perseroan. Komisaris mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan mempunyai kewenangan juga untuk melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direksi. Komisaris juga mempunyai kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Direksi.

Perkataan “Komisaris” mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perseorangan”. Sebagai organ, Komisaris juga disebut “Dewan Komisaris”, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut “anggota Komisaris”. Sebagai organ dalam undang-undang perseroan, pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus bidang tertentu.⁴⁸

Perseroan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris untuk perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang atau perseroan terbuka. Untuk perseroan yang dalam kegiatan usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat diperlukan pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan lebih dari satu Komisaris. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, op.cit., hal.80.

Berbeda dengan Direksi, dalam hal terdapat lebih dari satu Komisaris, maka sebagai majelis Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan.⁴⁹

Pengangkatan Komisaris melalui RUPS, tetapi untuk pertama kali dalam akta pendirian PT, pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam akta pendirian perseroan. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat kembali.

Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris tanpa mengatur hak pemegang saham dalam pencalonan. Sama halnya dengan Direksi, yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang :⁵⁰ mampu melakukan perbuatan hukum, dan tidak pernah dinyatakan pailit ; atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ; atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Komisaris juga mempunyai tugas untuk mengawasi segala kebijaksanaan yang diambil oleh Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan.⁵¹

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid, hal.81.

⁵¹ Monaf H. Regar, op.cit., hal.64.

Dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, Komisaris dalam melaksanakannya wajib menjalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Untuk dan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. ⁵²

Komisaris mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain. Setiap perubahan dalam kepemilikan saham wajib pula dilaporkan. Laporan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam Daftar Khusus. Demikian juga perubahan dalam kepemilikan saham anggota keluarga wajib dilaporkan. Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah isteri / suami dan anak-anaknya. ⁵³

Anggaran Dasar dapat menetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dapat ditentukan bahwa Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk

⁵² I. G. Rai Widjaya, op.cit., hal.87.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, op.cit., hal 82.

jangka waktu tertentu. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu, yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang perseroan.⁵⁴

Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu diberi wewenang melakukan tindakan pengurusan perseroan, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Keadaan tertentu itu misalnya Direksi berhalangan sementara, pertentangan kepentingan antara Direksi dan Komisaris. Dalam hal ini fungsi Direksi digantikan oleh Komisaris, dengan demikian ketentuan yang berlaku bagi Direksi berlaku pula bagi Komisaris yang menjalankan fungsi Direksi.⁵⁵

Anggota Komisaris sebagaimana halnya anggota Direksi, dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi berlaku pula terhadap Komisaris. Dengan demikian, anggota Komisaris dapat pula sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Komisaris hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

Dengan keputusan pemberhentian tersebut, kedudukannya sebagai anggota Komisaris berakhir.⁵⁶

Demikian juga pemberhentian sementara yang berlaku bagi anggota Direksi berlaku pula bagi anggota Komisaris. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada anggota Komisaris yang bersangkutan. Anggota Komisaris yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal pemberhentian tanggal sementara harus diadakan RUPS.

Dalam RUPS tersebut di atas anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila pembelaannya dapat diterima, RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara. Sebaliknya jika pembelaan tidak dapat diterima, RUPS memberhentikan anggota Komisaris yang bersangkutan apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari tidak diadakan RUPS, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.⁵⁷

4. Permodalan Dan Saham Dalam Perseroan Terbatas

4.1. Permodalan :

a. Struktur Permodalan

Dalam pengertian yang sangat luas pada dasarnya dapat dikatakan

⁵⁶ I. G. Rai Widjaya, op.cit., hal.85.

⁵⁷ Ibid.

bahwa modal merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan usaha dalam bentuk apapun dan yang dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada faktor modal tersebut. Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap kegiatan usaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-badan usaha pada umumnya dalam melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pada bidang usaha, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha.⁵⁸

Perseroan Terbatas dalam kedudukannya sebagai institusi adalah Badan Hukum sehingga merupakan subjek hukum, sebagai pelaku ekonomi yang mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT mempunyai nilai-nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dari aspek yuridisnya. Kedua aspek tersebut adalah saling mengisi satu terhadap yang lain. Sedang aspek hukumnya memberikan rambu-rambu pengamanan serta mengatur agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi apabila dikaji lebih mendalam lagi, maka dapat dimengerti dan difahami mengapa PT sangat diminati oleh masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.1.

⁵⁹ Ibid, hal.3.

Modal merupakan satu hal yang sangat penting artinya bagi keberadaan, kelangsungan hidup maupun pengembangan PT sebagai organisasi ekonomi. Modal perseroan adalah kekayaan baik berupa uang maupun benda yang digunakan oleh perseroan untuk menjalankan usahanya.⁶⁰

Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur struktur modal yang terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar bagi berdirinya perseroan. Sedangkan modal ditempatkan adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan. Modal disetor adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh pendiri pada saat berdirinya perseroan. Struktur modal ini dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya mengenai perseroan terbatas yang hampir secara formal tidak berlaku karena diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas mempunyai beberapa persamaan yang berkaitan dengan struktur modal yaitu baik KUHD maupun UU PT mengatur tentang modal dasar,

⁶⁰ Ibid, hal.5.

modal ditempatkan dan modal disetor, hanya saja perbedaannya terletak pada jumlah prosentase yang harus dipenuhi. Begitu juga mengenai bentuk penyeteran, baik KUHD maupun UU PT mengenai penyeteran dalam bentuk uang atau bentuk lain.⁶¹

Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah). Tetapi Undang-undang atau Peraturan Pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi Rp.20.000.000,- Sebagai contoh untuk bidang usaha tertentu itu adalah perbankan, perasuransian, yang berusaha dibidang jasa keuangan. Oleh karena itu bidang usaha tersebut memerlukan modal yang jauh lebih besar dari Rp.20.000.000,- Sementara itu di dalam KUHD tidak ada satupun ketentuan yang mengatur jumlah minimal modal dasar.⁶²

b. Penyeteran Modal

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PT khususnya Pasal 26, pada saat pendirian perseroan maka paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar perseroan harus telah ditempatkan, dan dari modal yang ditempatkan tersebut harus telah disetor paling sedikit 50%

⁶¹ Ibid, hal.6.

⁶² Ibid.

(limapuluh persen) dari nilai nominal saham yang dikeluarkan.

Penyetoran penuh atas seluruh saham yang telah dikeluarkan dilakukan paling lambat pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh. Bukti penyetoran yang sah menunjukkan bahwa perseroan telah memenuhi ketentuan modal yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian sejak tanggal pengesahan tidak dimungkinkan lagi penyetoran atas saham secara mengangsur, tetapi harus dilakukan dengan penyetoran penuh karena kemungkinan mengangsur modal hanya dapat dilakukan sebelum pengesahan diberikan.

Penyetoran atas saham pada umumnya adalah dalam bentuk uang, tetapi tidak tertutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain. Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa penyetoran saham dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Penyetoran atas saham dilakukan pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.⁶³

Untuk penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang yang dilakukan pada saat pendirian harus dicantumkan dalam akta pendirian.

⁶³ Ratnawati Prasodjo, *Prosedur Pendirian Dan Pengesahan Perseroan Terbatas*, Seminar Apindo Dengan I. B. M. I, Jakarta, 14 Juni 1995, hal.11.

Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagai badan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS.⁶⁴

Penyetoran saham dengan bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Pasal 27 ayat (2) UU PT menentukan bahwa jika penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan. Penjelasan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa maksud dari perkataan “ahli yang tidak terikat pada perseroan” adalah orang perseroan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut. Penilaian tersebut memberi kepastian berapa jumlah sebenarnya yang disetor oleh pendiri pemegang saham pada saat pendirian perseroan.

Penyetoran saham dalam bentuk lain yang berupa benda tidak bergerak harus diumumkan dalam dua surat kabar harian. Maksud pengumuman dalam dua surat kabar harian adalah agar diketahui umum dan memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat

⁶⁴ Ibid.

mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham.⁶⁵

Pengumuman tersebut dilakukan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional. Pengumuman tersebut memuat jumlah penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak serta rinciannya. Penyetoran saham dalam bentuk lain ini dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan larangan pemegang saham mengkompensasikan tagihannya kepada perseroan dengan kewajiban penyetoran harga saham. Pasal 28 UU PT, menyatakan bahwa pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya. Artinya tidak boleh terjadi perjumpaan piutang antara pemegang saham dengan perseroan. Kalau demikian berarti undang-undang menghendaki penyetoran atas saham secara langsung, tanpa melalui perbuatan hukum yang lain. Tagihan tetap sebagai tagihan yang wajib dibayar perseroan kepada pemegang saham. Ketentuan pasal tersebut untuk menghindari terjadinya penundaan penyetoran dari pemegang saham dengan dalih menunggu datangnya hak tagih terhadap perseroan.⁶⁶

⁶⁵ Ibid, hal.12.

⁶⁶ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jambatan, Jakarta, 1999, hal.41.

Walaupun demikian, UU PT masih memberi kemungkinan terjadi kompensasi dengan hak tagih. Namun tagihan yang dapat dikompensasikan ditentukan pada tagihan tertentu. Tagihan tertentu dimaksud antara lain berupa *convertible bonds*, sedangkan bentuk-bentuk tagihan yang lain sesuai dengan perkembangan dunia usaha perlu ada peraturan pelaksanaannya.⁶⁷

Pada tanggal 25 Pebruari 1999 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Dari Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya semua bentuk tagihan tertentu perseroan dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, sepanjang kompensasi tersebut dilakukan oleh atau disetujui perseroan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Maksud ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU PT adalah untuk mencegah bahwa pemegang saham yang juga merupakan kreditor perseroan, secara sepihak tanpa sepakat dari perseroan menggunakan hak kompensasi dan dengan demikian menempatkan dirinya dalam kedudukan yang menguntungkan berkenaan dengan kewajiban penyetorannya yang menjadi jaminan semua kreditor perseroan.⁶⁸

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.52.

c. Perlindungan Modal Dan Kekayaan Perseroan

Perlindungan modal dan kekayaan perseroan dapat berbentuk ketentuan mengenai larangan perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau dimiliki oleh anak perusahaannya. Menurut ketentuan UU PT, perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan pemilikan tersebut berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Dalam memori penjelasan UU PT, pengeluaran saham pada prinsipnya adalah pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham harus dibebankan kepada pihak lain.

Apa yang dipandang sebagai “anak perusahaan”, ini sudah dirumuskan dalam Pasal 29. Suatu perseroan dianggap sebagai anak perusahaan daripada induk perusahaannya, jika : lebih dari 50% (limapuluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan ; lebih dari 50% (limapuluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya.

Jadi pemegang saham lebih dari 50% serta pemberian suara dalam RUPS lebih dari 50% dikontrol oleh perseroan lain. Baik pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris, sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya. Jadi semua ini adalah fakta-fakta yang dapat dipastikan secara faktual. Memiliki kelebihan saham atau mempunyai kelebihan suara atau melakukan kontrol atas pimpinan Direksi maupun Komisaris, kontrol yang efektif ini terhadap anak perusahaan oleh induk perusahaan adalah kriteria

ketiga untuk menentukan status suatu perseroan sebagai anak perusahaan.⁶⁹

Perlindungan modal kekayaan perseroan oleh Undang-undang PT dilakukan dengan adanya ketentuan pembatasan tertentu bagi perseroan membeli sahamnya kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU PT. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan yaitu dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan “kekayaan bersih” perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, atau jumlah nilai seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

Dalam memori penjelasan UU PT disebutkan pembelian kembali saham perseroan dengan demikian tidak menyebabkan ditariknya saham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan modal. Modal yang sudah diperoleh dari pemegang saham harus digunakan oleh perseroan untuk mencapai tujuan.

Apa yang dimaksud dengan istilah “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Jika terjadi pelanggaran dalam proses pemilikan kembali saham oleh

⁶⁹ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 Nomor 1-Perbandingan Dengan Perseroan Lama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 53.

perseroan sendiri ini dianggap batal demi hukum. Pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan. Kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikad baik karena akibat batal demi hukumnya perolehan saham bersangkutan ini ditanggung secara tanggung renteng oleh Direksi ini adalah sesuai dengan asas hukum bahwa itikad baik selalu dilindungi.⁷⁰

Dalam hal ini, yang menarik pula bahwa dalam hal ini Direksi perseroan dianggap bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kerugian itu. Jadi disini nyata lagi bahwa Direksi sebuah perseroan terbatas (PT) ini dipandang sebagai mempunyai tanggung jawab pribadi, walaupun ia adalah pengurus dari suatu badan hukum.⁷¹

Untuk dapat melakukan pembelian seperti itu, Direksi tidak dapat langsung melakukan transaksi atas nama perseroan, tetapi Direksi baru dapat bertindak setelah adanya keputusan RUPS. Dengan dasar keputusan RUPS inilah Direksi melakukan pembelian kembali untuk perseroan yang dipimpinnya. Pasal 31 ayat (2) UU PT mewajibkan keputusan RUPS diambil, apabila dalam rapat itu dihadiri pemegang saham minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui minimal $\frac{2}{3}$

⁷⁰ Ibid, hal. 53 – 54.

⁷¹ Ibid, hal. 54.

bagian dari jumlah suara tersebut.⁷²

Pembelian kembali saham dengan cara melalui keputusan RUPS ini, selain RUPS dipandang sebagai organ tertinggi dalam perseroan, juga dipandang sebagai cara untuk menghindari penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 30 ayat (1) UU PT, misalnya pembelian dibayar dengan laba kotor atau jumlah nilai nominal saham yang dibeli telah melebihi 10% dari modal yang ditempatkan, maka akibatnya seperti yang diatur Pasal 30 ayat (2) UU PT pembelian saham tersebut menjadi batal demi hukum.⁷³

Pada dasarnya pembelian kembali hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS, namun disini memberi kemungkinan bahwa pemberian persetujuan tersebut dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya yakni Direksi atau Komisaris. Penarikan kembali ini sesuai dengan sifat pemberian kuasa, apabila tidak menguntungkan atau malahan merugikan pemberi kuasa, maka dia dapat membatalkannya secara sepihak.

Oleh Undang-undang Perseroan Terbatas perlindungan modal dan kekayaan perusahaan diberikan berupa pembatasan penggunaan hak suara dalam RUPS. Ada ketentuan lagi bahwa saham yang dibeli kembali dalam

⁷² Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 42.

⁷³ *Ibid.*

perseroan tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS. Juga tidak dapat dipakai untuk menentukan jumlah korum (Pasal 33 ayat 1). Jadi manfaat daripada pembelian kembali saham ini adalah terbatas. Demikian pula ditentukan mengenai saham induk perusahaan yang dibeli anak perusahaan, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, dan juga tidak dapat ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum. ⁷⁴

Dengan demikian maka terbataslah manfaat saham ini untuk perusahaan bersangkutan. Tidak dapat dipergunakan untuk mengontrol perusahaan. Hal ini mungkin juga sejalan dengan adanya tendensi dalam UU PT baru untuk menentang segala macam monopoli dan untuk mengkedepankan apa yang dinamakan dengan “asas kekeluargaan” serta prinsip-prinsip dalam Undang Undang Dasar 1945. Juga agar dapat dilindungi kekayaan perseroan dan modalnya. Seperti judul dari bagian kedua pada Bab III dari UU PT baru tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap modal saham dan juga perlindungan terhadap pihak-pihak ketiga yang mengadakan transaksi dengan PT bersangkutan. ⁷⁵

d. Penambahan Modal

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU PT menyatakan bahwa penambahan

⁷⁴ Sudargo Gautama, op.cit., hal. 55.

⁷⁵ Ibid.

modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Modal perseroan dalam hal ini adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. RUPS dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penambahan modal kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Keputusan RUPS tentang penambahan modal adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar menurut ketentuan undang-undang perseroan dan atau anggaran dasar.

Sesuai dengan Pasal 36 UU PT, saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Namun dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak penawaran, apabila para pemegang saham tidak berminat membeli, maka saham-saham tersebut sebelum ditawarkan kepada umum, ditawarkan kepada karyawan perseroan untuk dapat membeli dalam jumlah tertentu atas saham-saham itu. ⁷⁶

⁷⁶ Gatot Supramono, op.cit., hal. 44.

Walaupun undang-undang tidak menjelaskan mengapa prosedur penawarannya demikian, akan tetapi sebenarnya ketentuan Pasal 36 tersebut mengandung maksud bahwa dengan penawaran kepada para pemegang saham dikehendaki agar pemilikannya dapat tetap kepada orang-orang yang lama. Dengan pemegang saham orang lain, dalam RUPS akan lebih mudah menentukan arah dan jalannya perusahaan. Selain itu penjualan saham kepada orang dalam diharapkan lebih cepat dalam penambahan modal dibandingkan dengan ditawarkan kepada umum melalui pasar modal, sebab di bursa efek saham yang ditawarkan dari berbagai macam perusahaan yang tentunya akan mengalami persaingan.⁷⁷

Dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari berlaku bagi semua perseroan, karena itu Anggaran Dasar perseroan tidak boleh menentukan jangka waktu yang lain daripada 14 (empatbelas) hari. Adanya prioritas pembelian saham yang diberikan kepada karyawan perseroan, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang ingin mengikutsertakan karyawan dalam pemilikan saham perseroan.⁷⁸

Permasalahannya adalah apakah pemilikan saham oleh karyawan akan mengubah sifat saham sebagai saham karyawan yang tidak dapat dipindahtangankan. Konsekuensinya, apabila karyawan yang bersangkutan

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, op.cit., hal. 39.

berhenti dari pekerjaannya. Selanjutnya, dipersoalkan juga yang dimaksud dengan “karyawan” apakah kelompok karyawan atau karyawan sebagai perseorangan. Hal-hal ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Perseroan.⁷⁹

Apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan bahwa saham harus ditawarkan kepada pihak tertentu dan ternyata perseroan tidak bisa menjamin kesediaan pihak tersebut, maka pemegang saham yang hendak menjual sahamnya itu dapat menawarkannya kepada karyawan mendahului penawaran kepada pihak lainnya (Pasal 51 ayat 2 UU PT).

e. Pengurangan Modal

Pengurangan modal perseroan, sebagaimana halnya penambahan modal, harus dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar. Direksi berkewajiban memberitahukan secara tertulis keputusan mengenai pengurangan modal kepada semua kreditur dan juga berkewajiban mengumumkan pengurangan modal tersebut dalam Berita Negara RI serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Dalam hal ini pengertian pengurangan modal adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan,

⁷⁹ Ibid.

modal disetor.

Ada tiga cara untuk melakukan pengurangan modal perseroan yaitu sebagai berikut : memperkecil modal dengan secara riil dilakukan dengan cara membeli kembali sendiri saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh tanpa mengubah modal statuter yang disebut dalam anggaran dasar ; memperkecil modal dengan tidak mengeluarkan uang. Pengecilan modal semacam ini pada umumnya dilakukan jika imbalan antara modal nominal dengan modal yang sesungguhnya ditanam menjadi pincang, karena kerugian-kerugian yang dideritanya dalam tahun-tahun yang sudah ; memperkecil modal dengan jalan membayar kembali harga saham yang telah disetorkan, atau membebaskan pembayaran jumlah harga saham yang belum disetor.⁸⁰

Untuk pengurangan modal undang-undang perseroan terbatas dalam Pasal 41 dapat dilakukan dengan cara : pengurangan modal harus dilakukan atas setiap saham atau atas semua saham dari klasifikasi saham yang sama secara seimbang ; dalam hal lebih dari satu klasifikasi saham, keputusan pengurangan modal hanya dapat diambil sepanjang sesuai dengan keputusan yang telah terlebih dahulu diambil dalam rapat pemegang saham dari

⁸⁰ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas – Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hal. 24.

klasifikasi tersebut yang haknya dirugikan oleh keputusan pengurangan modal.⁸¹

Kreditur diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak pengumuman dalam Berita Negara RI dan dua surat kabar harian.

Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak keberatan diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya. Alasan yang dimaksud antara lain berupa jaminan bahwa perseroan akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditur, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pengurangan modal mengakibatkan perubahan anggaran dasar, dan pengurangan modal yang mengakibatkan perubahan anggaran dasar tersebut berlaku sejak tanggal perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Persetujuan Menteri Kehakiman hanya

⁸¹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal.45.

diberikan apabila tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditur dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak pengumuman, telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur atau gugatan kreditur telah mendapat putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perubahan anggaran dasar disertai persetujuan Menteri Kehakiman tentang pengurangan modal harus didaftarkan dan diumumkan, yaitu pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI dimana jangka waktu pendaftaran adalah 30 (tigapuluh) hari sejak persetujuan dan jangka waktu pengumuman 30 (tigapuluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.

Undang-undang Perseroan Terbatas menghendaki pengurangan modal menggunakan cara dengan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 30 ayat (1) yang menegaskan pembelian kembali saham perseroan tidak menyebabkan ditariknya saham tersebut, kecuali dalam pengurangan modal. ⁸²

Pengurangan modal harus dilakukan atas semua saham dari klasifikasi saham yang sama secara seimbang, disini dimaksudkan pengurangan untuk mencari keseimbangan jumlah saham diantara pemegang saham. ⁸³

⁸² Ibid, hal.45.

⁸³ Ibid, hal.46.

4.2 Saham :

a. Klasifikasi Saham

Undang-undang Perseroan Terbatas memberi kemungkinan untuk menerbitkan beberapa klasifikasi saham. Dalam menentukan kriteria klasifikasi saham dapat beragam antara lain berdasarkan hak suara, pembagian deviden, kemampuan untuk ditukarkan dengan klasifikasi lain. Kriteria tersebut tidak selalu bersifat alternatif tetapi juga dapat bersifat kumulatif.

Apa yang dimaksud dengan klasifikasi saham menurut undang-undang adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berdbeda. Anggaran dasar dapat menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada kepada pemegangnya hak yang sama misalnya hak suara, hak menerima deviden, hak pengalihan.

Bermacam-macam unsur klasifikasi ini tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain. Suatu klasifikasi dapat saja adalah merupakan gabungan antara 2 (dua) atau lebih unsur-unsur klasifikasi yang diatur oleh undang-undang perse-

roan.⁸⁴ Karena munculnya bermacam variasi pemegang saham, maka penentuan korum dan pengambilan keputusan dalam RUPS tidak mengacu pada bagian tertentu dari modal ditempatkan, melainkan pada bagian tertentu dari saham dengan hak suara yang sah. Undang-undang perseroan menegaskan juga bahwa pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan. Sedangkan pada saham yang digadaikan hak suara ada pada pemegang saham, oleh karena itu penggadaian saham harus dilaporkan kepada perseroan dan dicantumkan Daftar Pemegang Saham.

Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka anggaran dasar harus menetapkan satu klasifikasi saham sebagai saham biasa. Saham biasa disini adalah saham yang memberikan hak suara untuk pengambilan keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi.

Dalam anggaran dasar, dapat pula ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih yaitu dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas atau tanpa hak suara. Klasifikasi yang lain yaitu setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham yang lain; atau saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian

⁸⁴ I. G. Rai Widjaya, op.cit., hal.39

deviden secara kumulatif atau non kumulatif. Klasifikasi juga dapat berupa saham dengan klasifikasi yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham dengan klasifikasi lain atas pembagian deviden dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.⁸⁵

b. Nilai Nominal Saham

Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia, meskipun misalnya perseroan terbatas tersebut adalah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing dimana modal biasanya dalam bentuk dolar Amerika akan tetapi dalam anggaran dasar harus tetap terlebih dahulu nilai nominalnya ditulis dalam Rupiah baru kemudian diikuti dengan nilai dalam dolarnya. Nilai nominal saham adalah nilai yang tertulis dalam angka dan huruf pada saham. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominalnya atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Selain saham atas tunjuk, juga dikenal saham atas nama. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang saham atau pemiliknya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Kedua jenis saham tersebut berfungsi sebagai suatu tanda bukti hak bagi pemegang atau pemiliknya.

⁸⁵ Ibid, hal.38.

Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. Pecahan saham hanya dapat dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar. Dalam anggaran dasar dapat diatur kemungkinan pecahan saham tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemecahan saham, pemegang nilai nominal saham tidak diberi hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Untuk saham reksa dana yang bersifat terbuka dapat diterbitkan tanpa nominal saham, karena hal ini beralasan sebab nilai saham yang diterbitkannya tidak didasarkan pada nilai nominal tetapi didasarkan pada nilai kekayaan bersih.

c. Pemindahan Hak Atas Saham

Anggaran dasar perseroan dapat menentukan cara pemindahan hak atas saham menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemindahan hak pada saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik dibuat dihadapan Notaris maupun dibuat di bawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

Direksi mempunyai kewajiban untuk mencatat pemindahan hak pada saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. Pemindahan hak pada saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham.

Pada dasarnya pemindahan hak atas saham diserahkan pengaturannya kepada anggaran dasar perseroan. Dalam anggaran dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan lebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya dan atau keharusan mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari organ perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas juga menentukan bahwa dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan lebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan. Harga wajar yang dimaksud dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang tidak terikat pada perseroan. Penetapan jangka waktu tersebut dimaksudkan agar terdapat kepastian bahwa setelah lampau jangka waktu itu pemegang saham mempunyai kebebasan untuk menawarkan sahamnya kepada pihak lain.

Pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain apabila perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya pembelian saham secara wajar dan pembayaran tunai seperti ditentukan. Namun demikian pemilikan saham oleh karyawan berdasarkan ketentuan ini tidak mengubah status saham tersebut menjadi saham karyawan.

Setiap pemegang saham yang diharuskan menawarkan sahamnya kepada kelompok tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lampau jangka waktu 30 (tigapuluh) hari. Penawaran saham lebih dahulu kepada kelompok tertentu atau pemegang saham lain itu hanya dapat dilakukan satu kali.

Pemberian persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut. Apabila jangka waktu tersebut lampau dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham. Apabila pemindahan hak pada saham atas nama disetujui oleh organ perseroan, maka pemindahannya dilakukan dengan akta pemindahan hak dan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak persetujuan diberikan.

Organ perseroan harus menunjuk calon pembeli lain apabila pemindahan hak atas saham ditolak, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu jaminan dengan harga wajar dan pembayaran tunai dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari. Dalam hal penolakan tersebut tidak disertai penunjukan, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak kepada calon pembeli lain yang ditunjuk sendiri oleh pemegang saham.

Menurut ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, saham atas tunjuk dapat digadaikan tetapi saham atas nama dapat digadaikan juga sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Gadai Saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, dimana pencatatan tersebut dimaksudkan agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham yang bersangkutan. Hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.

Sebagaimana diketahui dalam hukum jaminan, saham atas tunjuk yang digadaikan cukup dengan menyerahkan sahamnya saja ke dalam penguasaan kreditur selaku pemegang gadai. Kreditur hanya berhak menguasai barang objek gadai dan wajib menyimpannya dengan baik. Namun pemegang gadai tidak dibenarkan menikmati barang gadai, artinya deviden dari saham tersebut tetap menjadi hak pemilik saham, sama dengan hak suara yang tetap ada pada pemilik saham. Namun berdasarkan perjanjian, pemegang gadai dibolehkan

menggadaikan kembali saham itu kepada pihak lain. Menurut hukum jaminan, apakah mungkin saham itu difiduciakan ? karena saham merupakan bukti hak yang harus dikuasai oleh yang berhak, maka tidak mungkin saham itu dijaminakan secara fiducia. ⁸⁶

d. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Undang-undang Perseroan Terbatas memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, dan hal tersebut merupakan suatu terobosan yang baru dimana sebenarnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas telah dilakukan oleh berbagai undang-undang perseroan di negara-negara maju.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas diwujudkan melalui penegasan hak suara perseorangan sebagai pemegang saham untuk menuntut perseroan akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris yang merugikan pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.

⁸⁶ Abdul Kadir Muhammad, op. cit; hal. 53.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang diberikan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas adalah bahwa setiap pemegang saham berhak minta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa perubahan anggaran dasar atau penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar maupun seluruh kekayaan perseroan atau penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan. Apabila saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan, maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.

Perlindungan hak pemegang saham minoritas dapat juga dipahami melalui ketentuan bahwa pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{10}$ (satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mewakili perseroan dalam melakukan tindakan tertentu yaitu hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS atau hak untuk menuntut Direksi, Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya merugikan perseroan. Hak lainnya yaitu hak untuk meminta dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan dan hak untuk meminta pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, ataupun sesama anak perusahaan, pemegang saham minoritas perlu dilindungi

dari tindakan-tindakan pemegang saham mayoritas yang merugikan mereka, antara lain melalui transfer keuntungan yang diperoleh oleh satu anak perusahaan ke anak perusahaan lainnya, umpamanya melalui : transaksi pembelian yang mahal atau penjualan yang murah antar anak perusahaan ; kegiatan yang menguntungkan pada satu anak perusahaan dialihkan kepada anak perusahaan yang lain ; dana dari suatu anak perusahaan digunakan untuk mengatasi krisis keuangan anak perusahaan yang lain yang mengalami kerugian karena kegiatan yang secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁷

Sebelum berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pernah mengatur upaya untuk melindungi pemegang saham minoritas melalui Pasal 54 ayat (4) KUHD yang mengatur mengenai pembatasan banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham, dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari 6 (enam) suara apabila modal perseroan terbagi dalam 100 (seratus) saham atau lebih dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari 3 (tiga) suara bila modal perseroan terbagi kurang dari 100 (seratus) saham.⁸⁸

⁸⁷ Chatamarrasjid, op.cit., hal. 17.

⁸⁸ Ibid, hal.18.

5. Syarat-Syarat Dan Prosedur Pengesahan Akta Pendirian.

5.1. Persyaratan :

a. Perjanjian Antara Dua Orang Atau Lebih

Pasal 1 butir 1 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ditinjau dari prinsip hukum perjanjian maka untuk mendirikan badan hukum perseroan harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut : adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan (“orang” dalam arti orang perseorangan atau badan hukum). { Pasal 7 ayat (1) } ; ada pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan ; kewajiban setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. { Pasal 7 ayat (2) }. ⁸⁹

Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan dihadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian perseroan yang memuat sekaligus anggaran dasar yang telah disepakati yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Sejak

⁸⁹ Ratnawati Prasodjo, op.cit., hal.1.

ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.⁹⁰

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (5) dari undang-undang tersebut menentukan bahwa ketentuan dua orang pendiri atau lebih tidak berlaku bagi perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingat BUMN memiliki status dan karakteristik khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yang dimaksud dengan BUMN disini adalah PT. Persero.

Ketentuan minimal dua orang pendiri dapat menghambat perkembangan pasar modal. Alasannya ialah pendirian perseroan begitu mudah sehingga minat orang pergi ke pasar modal akan melemah. Artinya lebih baik ikut mendirikan perseroan daripada membeli saham melalui pasar modal. Alasan lain ialah mungkin bagi perseroan yang akan *go public* makan waktu yang cukup lama. Kemudian juga kewajiban pencatatan para pemegang

⁹⁰ Ibid.

saham akan menurunkan daya sebar saham ke tangan pemegang saham yang lebih luas, akibatnya perdagangan saham di pasar modal tidak begitu bergairah karena rendahnya jumlah investor.⁹¹

b. Dibuat Dengan Akta Autentik

Satu hal baru adalah ketegasan dalam undang-undang sekarang, juga dibandingkan dengan undang-undang perseroan lama (dalam Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD), bahwa suatu PT harus didirikan dengan suatu akta Notaris, suatu akta otentik dan sekurang-kurangnya harus didirikan oleh dua orang { Pasal 7 ayat (1) }.⁹²

Dengan demikian perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta autentik di muka Notaris dalam bahasa Indonesia. Perjanjian tersebut merupakan akta pendirian perseroan yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, maka perseroan berdiri, dan hubungan antara para pendiri dikuasai oleh hubungan kontrak. Hubungan kontrak tersebut belum menciptakan status badan hukum. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul adalah tanggung jawab para pendiri secara pribadi.

⁹¹ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hal.12.

⁹² Sudargo Gautama, *op.cit.*, hal.25.

c. Modal Perseroan

Menurut ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai modal maka modal dasar perseroan paling sedikit adalah Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah). Namun demikian undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

Bidang usaha tertentu yang dapat diatur nominal modal dasarnya melebihi minimal modal dasar yang ditentukan undang-undang perseroan terbatas adalah misalnya perasuransian, perbankan dan badan usaha yang bergerak di bidang lembaga keuangan non bank lainnya.

Penentuan minimum modal dasar seperti ditentukan dalam undang-undang perseroan terbatas, sebagaimana juga di negara Belanda, memang ada segi positifnya, akan tetapi berkaitan dengan hal ini perlu dilihat adanya unsur inflasi di Indonesia. Suatu jumlah tertentu pada waktu sekarang mungkin saja telah dipandang cukup, namun dalam hubungan terjadinya inflasi maka dalam waktu lima tahun mendatang dapat saja jumlah tersebut menjadi sudah tidak memadai lagi, padahal untuk mengubah undang-undang berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi selain tidak mudah juga memerlukan waktu

yang cukup lama.⁹³

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas maka undang-undang mengantisipasi hal tersebut dalam ketentuannya bahwa perubahan besarnya modal dasar perseroan terbuka beserta perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian melalui Peraturan Pemerintah berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh undang-undang, akan menjadi mudah mengantisipasi manakala dalam keadaan tertentu yang memerlukan peningkatan modal dasar minimum tersebut.

Maksud dari adanya ketentuan modal minimum yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas adalah agar supaya pada waktu perseroan didirikan setidaknya perseroan sudah mempunyai modal yaitu sebesar modal disetor dan modal ditempatkan yang akan menjadi jaminan bagi setiap tagihan pihak ketiga terhadap perseroan.

Selanjutnya ditentukan bahwa pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus telah ditempatkan dan modal disetor paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Dengan demikian, pada saat penandatanganan perjanjian paling sedikit modal dasar yang telah ditempatkan adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari jumlah

⁹³ Rudhy Prasetya, op.cit., hal.181.

tersebut yang harus sudah disetor dalam kas paling sedikit adalah Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah).

d. Kewajiban Mengambil Bagian Saham

Setiap pendiri perseroan mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika mereka membuat perjanjian perseroan. Pengambilan bagian saham tersebut berupa penyetoran modal oleh setiap pendiri.

Jika kita kembali pada prinsip hukum perjanjian dimana untuk dapat mendirikan suatu perseroan terbatas maka harus berdasarkan perjanjian yang harus dipenuhi adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan (“orang” dalam arti perseorangan atau badan hukum) maka kewajiban setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan adalah hal yang mutlak.

5.2. Prosedur :

a. Pembuatan Akta Dihadapan Notaris

Para pendiri perseroan membuat perjanjian untuk mendirikan perseroan. Perjanjian tersebut berisi antara lain mengenai susunan dan penyertaan modal, susunan saham, penunjukan Direksi dan Komisaris perbuatan hukum dengan pihak ketiga, yang selanjutnya disusun dalam

bentuk anggaran dasar perseroan. Supaya perjanjian yang dibuat itu sah, maka ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata harus dipenuhi. Perjanjian ini merupakan perjanjian pendahuluan.

Perjanjian pendahuluan ini kemudian disusun dalam bentuk anggaran dasar. Ketentuan anggaran dasar yang mengatur perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya dalam anggaran dasar tidak boleh ada ketentuan dividen dalam jumlah persentase yang telah ditetapkan, pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Para pendiri yang telah membuat perjanjian itu kemudian pergi menghadapi Notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian perseroan. Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, maka berdirilah perseroan, dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontrak, sebelum perseroan memperoleh status badan hukum. Akta pendirian ini mempunyai fungsi intern yaitu sebagai aturan main para pemegang saham dan organ perseroan, dan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan.

Menurut ketentuan Pasal 8 UU PT, akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya : nama lengkap, tempat / tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri ; susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,

dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat ; dan nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian ; akta pendirian tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian. Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai.

Akta pendirian harus memuat keterangan lain tentang pendiri, Direksi, Komisaris. Keterangan lain tersebut seperti misalnya mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal. Melalui ketentuan ini dapat diketahui apakah pendiri, Direksi, atau Komisaris itu orang asing. Hal ini penting dipersoalkan karena badan hukum yang didirikan di Indonesia adalah badan hukum Indonesia dan orang asing yang bekerja di Indonesia haruslah memperoleh ijin kerja dari Departemen Tenaga Kerja.

Apabila perseroan terbatas tersebut didirikan atau merubah status menjadi perseroan dalam rangka Penanaman Modal Asing maka warganegara

asing dan atau badan hukum asing dapat menjadi pendiri atau pemegang saham. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

b. Pengesahan Oleh Menteri Kehakiman

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan atas akta pendirian perseroan dan memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman.

Untuk memperoleh pengesahan para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kehakiman dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar diperoleh juga dengan mengajukan terlebih dahulu permohonan tertulis kepada Menteri Kehakiman dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar.

Pengesahan akta pendirian diberikan dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari setelah permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari. Jangka waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai jangka waktu ini membuktikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ingin memberikan pelayanan yang wajar. Tentunya dengan konsekuensi apabila dalam jangka waktu yang ditentukan itu tidak dilakukan pengesahan atau penolakan atau juga tidak juga memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perubahan anggaran dasar maka pemerintah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dan bisa saja digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Setelah pengesahan diperoleh, status perseroan adalah menjadi badan hukum yang mandiri sehingga pendiri sebagai pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambalnya. Ketentuan ini mempertegas ciri Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambalnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Apabila ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pendiri dalam kurun waktu antara pendirian dan pengesahan perseroan maka perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila : perseroan secara tegas menyatakan menerima semua

perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri dengan pihak ke- tiga ; perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan ; perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Apabila ternyata kemudian perbuatan hukum tersebut tadi tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka akibat hukumnya masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Ketentuan mengenai tidak mau terikatnya perseroan pada perbuatan hukum yang telah dibuat oleh para pendiri mungkin karena perbuatan tersebut memang dilakukan tidak untuk kepentingan perseroan, atau sifatnya bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan atau anggaran dasar perseroan.

c. Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan

Direksi perseroan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pengesahan diberikan. Daftar Perusahaan adalah Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3

Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Hal ini secara langsung mengurangi atau bahkan tidak menghapus kewajiban pendaftaran sebelumnya pada Pengadilan Negeri dimana perseroan berdomisili.⁹⁴

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima ijin usaha dari instansi teknik yang berwenang. Tetapi dalam Pasal 21 UU PT yang menentukan jangka waktu pendaftaran paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pengesahan diberikan. Disini terdapat perbedaan jangka waktu pendaftaran, lalu ketentuan mana yang diikuti, apakah ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 atau ketentuan UU PT. Dalam hal ini berlaku asas hukum *lex posterior derogat lex anterior*, artinya undang-undang baru dimenangkan dari undang-undang lama. Jadi, ketentuan yang diikuti adalah Pasal 21 UU PT.

d. Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara

Direksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengumuman di dalam Tambahan Berita Negara RI setelah perseroan didaftarkan sebagaimana

⁹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, op.cit., hal.38.

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Permohonan pengumuman perseroan dilakukan oleh Direksi paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Lembaran Negara dan Pengumuman, permohonan pengumuman ditujukan kepada Menteri Kehakiman, kemudian Menteri Kehakiman menerbitkan Berita Negara / Tambahan Berita Negara dengan memberi nomor dan tahun penerbitan. Dalam Berita Negara / Tambahan Berita Negara dimuat akta pendirian dan surat pengesahan perseroan atau akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Kehakiman atas persetujuan perubahan anggaran dasar.

Apabila pendaftaran dan pengumuman perseroan belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Karena ini menyangkut kewajiban Direksi, maka akibat kelalaian melakukan pendaftaran dan pengumuman menjadi tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng apabila akibat kelalaian tersebut perseroan mengalami kerugian. ⁹⁵

⁹⁵ Ibid, hal.31.

6. Syarat-Syarat Dan Prosedur Perubahan Anggaran Dasar

6.1. Persyaratan

a. Penyelenggaraan RUPS

Menurut Undang-undang tidak semua perubahan anggaran dasar perseroan memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, tetapi hanya perubahan-perubahan tertentu saja yang harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman, dan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut harus ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perubahan tertentu yang dimaksud adalah seperti merubah nama perseroan, merubah maksud dan tujuan perseroan, merubah kegiatan usaha perseroan, merubah jangka waktu berdirinya perseroan, merubah besarnya modal dasar, mengurangi modal ditempatkan dan disetor atau merubah status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan ditempat kedudukan perseroan. Tempat kedudukan perseroan adalah tempat dimana kantor pusatnya berada atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar tetapi harus terletak di dalam wilayah negara Republik Indonesia. ⁹⁶

⁹⁶ Ibid, hal.79.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam RUPS Tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan. Sementara RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Direksi merupakan organ perseroan yang menyelenggarakan RUPS. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan berdasarkan kepentingan perseroan, ia mempunyai kewenangan menyelenggarakan RUPS lainnya. RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan satu pemegang atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. RUPS seperti ini hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang diajukan tersebut.

b. Pemanggilan RUPS

Direksi berkewajiban untuk melakukan pemanggilan rapat kepada seluruh pemegang saham dalam rangka diadakannya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, kewenangan ini diberikan kepada Direksi karena Direksi sebagai pengurus perseroan bertanggung jawab penuh terhadap

perseroan termasuk penyelenggaraan RUPS.⁹⁷ Tempat kedudukan perseroan adalah tempat dimana Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atau di luar tempat kedudukan perseroan atau ditentukan lain dalam anggaran dasar tetapi tetap dalam wilayah Republik Indonesia.

Oleh undang-undang, Pengadilan Negeri mempunyai peran yang berkaitan dengan RUPS, khususnya pemanggilan RUPS. Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS Tahunan atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, atau melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak permintaan ternyata tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Tetapi untuk hal-hal tertentu, misalnya Direksi

⁹⁷ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal.68.

berhalangan atau ada konflik kepentingan antara Direksi dan perseroan, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris. Untuk mengadakan RUPS, pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat atau dalam dua surat kabar harian. Namun jenis surat tercatat, nampaknya pengiriman surat secara kilat khusus lebih terjamin karena ada bukti pengiriman dan bukti penerimaan.⁹⁸ Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, harus terlebih dahulu dilakukan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam dua surat kabar harian. Pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan kepada pemegang saham secara cuma-cuma.

⁹⁸ Ibid, hal.69.

Dalam hal waktu dan cara pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, maka keputusan rapat adalah tetap sah dengan syarat yaitu seluruh pemegang saham hadir dan seluruhnya menyetujui dengan suara bulat.

c. Korum Untuk RUPS

Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara. Saham induk perusahaan yang dimiliki anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.

RUPS dapat diadakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang perseroan atau anggaran dasar menentukan lain. Apabila korum yang dimaksud tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan. RUPS kedua diselenggarakan

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila korum RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Yang menarik dari undang-undang PT ini adalah bahwa keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tetapi apabila mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali undang-undang perseroan dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa. Harus diperhatikan jika undang-undang PT atau anggaran dasar menentukan berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak, misalnya $\frac{2}{3}$ (untuk perubahan anggaran dasar), maka suara inilah yang harus dipakai.⁹⁹

d. Keputusan RUPS

Untuk mengubah anggaran dasar, keputusan RUPS adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui

⁹⁹ Sudargo Gautama, op.cit., hal.81.

oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

Apabila korum sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut. Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 75 Undang-undang PT.

Mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan keputusan RUPS adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Kelima hal yang disebutkan tadi merupakan peristiwa mendasar yang menentukan keberadaan dan sifat perseroan. Oleh karena itu, keputusan RUPS hanya sah apabila menggunakan suara terbanyak khusus yang ditentukan secara pasti jumlahnya, yaitu $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian. Tetapi ketentuan Pasal 76 Undang-undang PT mungkin sulit diterapkan pada perseroan *go public* karena persyaratannya berat dan tidak ada pengaturan yang tegas mengenai RUPS kedua.

Keputusan RUPS dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu perseroan, undang-undang ini atau Anggaran Dasar dapat menetapkan suara

terbanyak yang telah mendasar daripada suara biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (*absolute majority*) atau suara terbanyak khusus (*qualified / special majority*).

Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya, seperti $\frac{2}{3}$ (duapertiga), $\frac{3}{4}$ (tigaperempat), $\frac{3}{5}$ (tigaperlima) dan sebagainya.

Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat. Apabila Anggaran Dasar mengatur ketentuan tersebut, keputusan dapat diambil apabila semua pemegang dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil. ¹⁰⁰

Pengambilan keputusan RUPS dengan cara lain adalah keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan keputusan ini hanya sah apabila semua pemegang saham menyetujui secara tertulis cara pengambilan keputusan dan usul tersebut. Cara lain ini tidak berlaku bagi perseroan yang mengeluarkan saham atas tunjuk.

¹⁰⁰ Ibid, hal.84.

6.2. Prosedur :

a. Perubahan Anggaran Dasar Dengan Akta Notaris

Perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas yang telah sah sebagai badan hukum dengan disahkannya akta pendirian oleh Menteri Kehakiman, harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan organ tertinggi dari perseroan. Rapat Umum Pemegang saham nantinya yang akan memberikan persetujuan dan menetapkan perubahan anggaran dasar perseroan.

Untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Usul tentang adanya perubahan anggaran dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan rapat. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan Surat Tercatat, hal ini untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham.

Setelah pemegang saham atau kuasanya hadir dan telah memenuhi tata cara pemanggilan dan kehadiran sesuai ketentuan undang-undang, maka rapat dapat diselenggarakan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan dalam Pasal 16 bahwa Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Bentuk akta perubahan anggaran dasar yang diajukan

ke Departemen Kehakiman dapat berupa Akta Berita Acara Rapat atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Jika Akta Berita Acara Rapat berisi banyak hal termasuk berisi acara pembatalan suatu akta maka harus dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang hanya berisi perubahan anggaran dasar perseroan yang harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan atau yang harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman.

Apabila perseroan adalah perseroan dalam rangka penanaman modal asing (PT. PMA) dan Berita Acara Rapatnya dibuat dalam bahasa Inggris maka harus dibuat lagi Akta Berita Acara Rapat atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat berbahasa Indonesia.

b. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Oleh Menteri Kehakiman

Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas jelas sekali ditentukan bahwa perubahan tertentu dari anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman. Perubahan tertentu tersebut adalah perubahan mengenai : nama perseroan ; maksud dan tujuan perseroan ; kegiatan usaha perseroan ; jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar perseroan menetapkan jangka waktu tertentu ; besarnya modal dasar ; pengurangan modal ditempatkan dan disetor ; status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan-perubahan tersebut di atas merupakan perubahan anggaran dasar perseroan yang sangat mendasar sekali dan oleh karena itu diperlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman. Perubahan-perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman diberikan.

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar tersebut di atas ditolak apabila bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar atau isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan atau ada sanggahan dari kreditor atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengurangan modal.

Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan oleh Menteri Kehakiman diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

c. Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan

Undang-undang Perseroan Terbatas jelas menetapkan bahwa sebagaimana halnya dengan akta pendirian perseroan yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman, maka perubahan anggaran dasar tertentu

yang harus mendapat persetujuan atau cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, maka setelah mendapat persetujuan atau setelah penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman, Direksi berkewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pendaftaran tersebut wajib dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah persetujuan atas perubahan anggaran dasar diberikan oleh Menteri Kehakiman atau setelah tanggal penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman.

Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila kewajiban untuk melakukan pendaftaran tidak dilaksanakan atau Direksi lalai melakukan pendaftaran yang berdampak pada kerugian perseroan.

d. Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara

Kewajiban lain yang harus dilakukan Direksi perseroan yang ditentukan oleh undang-undang setelah perubahan anggaran dasar perseroan didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah kewajiban untuk mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sama halnya dengan pengesahan akta pendirian perseroan yang telah disahkan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, maka perubahan anggaran dasar perseroan yang telah disetujui atau telah dilaporkan kepada

Menteri Kehakiman dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, oleh Direksi wajib diajukan permohonan pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pendaftaran perseroan dalam Daftar Perusahaan.

Kelalaian Direksi atas kewajibannya untuk mengumumkan perubahan anggaran dasar dalam Tambahan Berita Negara RI ini adalah menjadi tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Selain sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan maka ketentuan undang-undang perseroan mengenai pembebanan tanggung jawab renteng kepada Direksi merupakan sanksi yang menyangkut sanksi perdata dalam hal kewajiban Direksi untuk melakukan pengumuman lalai dilakukan.

B. Peranan Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi Serta Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

1. Pengertian Dan Bentuk Penanaman Modal Asing :

a. Pengertian Penanaman Modal Asing

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA), khususnya Pasal 2 memuat pengertian modal asing.

Menurut undang-undang tersebut pengertian modal asing adalah : ¹⁰¹ alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia ; alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia ; bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan di transfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU PMA disebutkan bahwa modal asing dalam undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang / badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Apakah sesuatu itu termasuk modal asing atau bukan, menurut Sunaryati Hartono (1972), yang menjadi ukuran adalah : dalam hal valuta asing, apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia atau tidak. Dalam hal alat-alat dan keahlian, apakah alat, barang

¹⁰¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal.222.

atau keahlian tertentu itu merupakan milik orang asing atau bukan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pasal 2 tersebut bahwa yang dapat ditanam sebagai “modal asing” di Indonesia adalah milik orang asing dan milik badan asing.

Mengenai soal milik orang asing ini tidak terdapat suatu kesukaran, sebab “orang asing” tentu juga mencakup “warganegara” atau “orang yang asalnya” dari negeri atau negara asing. Sehingga dapat dikatakan, bahwa disini tidak termasuk “milik warganegara Indonesia” atau milik orang yang berasal dari Indonesia.

Dalam Pasal 1 UU PMA definisi PMA yang menyebutkan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa berbeda daripada kredit yang resiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam, maka di dalam penanaman modal asing resiko penggunaannya menjadi tanggungan penanaman. Undang-undang ini hanya mengatur hal penanaman modal asing dan tidak mengatur hal kredit. Berhubung dengan itu maka perlu dikemukakan kemungkinan adanya modal asing yang digunakan dalam usaha

sepenuhnya, dan adanya modal asing yang dimanfaatkan dalam sesuatu usaha dalam kerjasama dengan modal nasional.

Dengan demikian bahwa penanaman modal asing yang diperbolehkan dalam UU PMA ini hanyalah berupa investasi langsung (*direct investment*). Sunaryati Hartono (1972) berpendapat bahwa "*direct investment*" biasanya dipertentangkan dengan "*portfolio investment*", dimana pemilik modal asing hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan, tanpa mempunyai kekuasaan langsung dalam management perusahaan. Mengenai perbedaan antara kedua macam perbedaan ini Kindleberger (dalam buku Sunaryati Hartono), dengan sangat tepat menunjukkan kepada perbedaan dalam carapenglihatan yang tradisionil, dengan cara penglihatan yang baru.

Mengenai pengertian Pasal 1 UU PMA, menurut G. Kartasapoetra dkk. (1985) menyebutkan adanya beberapa hal yang menonjol, yaitu : ¹⁰²

1. Undang-undang ini jelas tidak mengatur perihal kredit atau peminjam modal melainkan hanya mengatur tentang penanaman modal (asing), dengan demikian hubungannya dengan kemungkinan pembangunan-pembangunan perusahaan di Tanah Air kita dalam rangka menunjang pembangunan.

¹⁰² Pandji Anoraga , *Perusahaan Multinasional Dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1994, hal.49.

2. Memberikan kemungkinan perusahaan tersebut dijalankan dengan modal asing sepenuhnya (*direct investment*), *joint venture* dan atau *joint enterprise*.
3. *Direct investment*, dalam hal ini bukan hanya modal tetapi kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, dan sejauh mana kebijaksanaannya tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
4. *Joint Venture*, merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing (bentuk kerjasama antara perusahaan). Bentuk kerjasama ini sangat disukai baik oleh pemerintah maupun oleh pemilik modal asing.
5. Berbeda daripada kredit yang resiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam, sedang penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam.

b. Bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU PMA disebutkan bahwa “Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”.

Selanjutnya, dalam Pasal 23 UU PMA menyebutkan bahwa dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 3. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 3 tersebut, maka kerjasama yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 23, pendirian badan hukum jika dalam bentuk perseroan harus tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Masalahnya, UU PMA tidak menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama yang boleh dilakukan, hanya dikatakan akan ditetapkan lebih lanjut.

Kemudian penetapan lebih lanjut tersebut baru dipenuhi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, dimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa Penanaman Modal Asing dapat dilakukan dalam bentuk : patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warganegara dan / atau badan

hukum asing.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, maka bentuk-bentuk kerjasama PMA hanya dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal dalam negeri. Saham peserta dalam negeri minimal 5% (lima persen) dari seluruh modal disetor pada waktu pendirian perusahaan. Apabila pemilik modal asing tidak memiliki partner dalam negeri atau berkehendak lain, maka ia dapat langsung menanamkan modalnya dengan perusahaan penuh atau pemilikan 100% (seratus persen) saham perusahaan.

Terhadap kerjasama dalam bentuk patungan inipun dalam prakteknya dikenal beberapa model kerjasama. Menurut Ismail Suny (dalam buku Sunaryati Hartono) ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional, yang berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967, yaitu : joint venture, joint enterprise dan kontrak karya.

Selanjutnya dikatakan, dalam hal joint venture para pihak tidak membentuk badan hukum baru, akan tetapi kerjasama semata-mata bersifat kontraktuil. Sedang dalam joint enterprise terjadi penggabungan modal asing dengan modal nasional ke dalam satu badan hukum Indonesia. Akhirnya dalam kontrak karya pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum (nasional-)

Indonesia yang lain.

Jika di atas kerjasama ini hanya dalam 3 (tiga) bentuk, maka dalam praktek sekarang ini model kerjasama tersebut sudah demikian berkembang. Menurut Sumantoro (1984) berbagai bentuk yang berdiri sendiri atau merupakan gabungan dari beberapa bentuk-bentuk tersebut meliputi perjanjian-perjanjian / kontrak-kontrak : pembentukan joint venture, management, technical service, franchise and brand use, marketing, trade mark, financing, consultant, training, dan sebagainya. ¹⁰³

2. Peranan Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi :

a. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Negara yang sedang berkembang umumnya berkeyakinan bahwa pembangunan ekonominya akan lebih dikembangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing. Modal demikian dimanfaatkan ke dalam sektor-sektor yang produktif. Untuk aliran modal asing yang lebih besar lagi perlu diciptakan iklim yang baik sedemikian rupa sehingga modal asing tersebut diikutkan pada pelaksanaan pembangunan ekonomi. ¹⁰⁴

Kesulitan yang kita hadapi terutama disebabkan oleh : luasnya wilayah

¹⁰³ Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasar Modal*, Binacipta, Jakarta, 1989, hal.211.

¹⁰⁴ Ibid, hal.29.

negara dibandingkan dengan negara-negara tetangga ; formasi negara kita yang terdiri dari beratus-ratus pulau ; banyaknya penduduk yang heterogen sifat dan budayanya ; tipisnya dana untuk pembangunan ; sedikitnya tenaga ahli dan rendahnya tingkat pendidikan di segala bidang ; tekanan politik, ekonomi dan militer dari luar Indonesia yang mempengaruhi kehidupan Indonesia di segala bidang. ¹⁰⁵

Kegiatan penanaman modal telah terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi perdagangan. Tersedianya sumber-sumber alam, murahnya tenaga kerja, tersedianya pasar pelemparan produksi dan stabilitas politik adalah faktor-faktor yang menarik bagi modal asing ke dalam negeri. ¹⁰⁶

Kegiatan penanaman modal pada bangsa kita kurang dihayati sejak semula. Pada jaman penjajahan kegiatan perdagangan cukup menunjukkan kemajuan-kemajuan, namun kegiatan penanaman modal tidaklah seberapa maju. Oleh pemerintah penjajah memang diatur struktur dunia usaha sedemikian sehingga kegiatan penanaman modal dikuasai oleh pemerintah penjajah, kegiatan dagang menengah umumnya diserahkan kepada golongan Cina, India dan Arab, sedangkan golongan bumiputra melakukan kegiatan-

¹⁰⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1988, hal.21.

¹⁰⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karangan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.60.

kegiatan yang kecil-kecilan. Setelah jaman penjajahan, dengan ditinggalkannya kegiatan usaha penanaman modal oleh pihak penjajah, pemerintah turun tangan mengambil alih kegiatan-kegiatan tersebut. Ada yang secara bertahap tetapi ada pula yang melalui nasionalisasi.¹⁰⁷

Sejak itulah kegiatan penanaman modal digarap oleh pemerintah sebagai konsekuensi lanjutan atau warisan. Ada pasang surutnya usaha ini. Berbagai bentuk usaha negara dibentuk dan disempurnakan. Dimaksudkan perusahaan-perusahaan negara tersebut berperan dalam pengembangan kegiatan usaha dimana pihak swasta belum mampu menggarapnya. Namun hal ini kadang-kadang tidak demikian pelaksanaannya karena justru perusahaan-perusahaan negara tersebut dengan segala fasilitasnya menjadi saingan pihak swasta, disamping adanya ketidakstabilan ekonomi banyak menimbulkan kesalah urusan manajemen.¹⁰⁸

Dalam perkembangan selanjutnya bentuk perusahaan negara tersebut mengalami perkembangan struktur dan operasinya, sampai saat ini diselenggarakan adanya pemisahan atau pembedaan ke dalam bentuk-bentuk Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Persero (Persero) dan Perusahaan Jawatan (Perjan). Beberapa perusahaan negara yang belum disesuaikan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu masih berbentuk

¹⁰⁷ Sumantoro, op.cit., hal.27

¹⁰⁸ Ibid, hal.28.

perusahaan negara atau bahkan langsung ke dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).¹⁰⁹

Perkembangan penanaman modal di sektor swasta sendiri berlangsung menurut perkembangan sejarah, dan kemudian dikembangkan secara formal dengan diterbitkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968). Selanjutnya pemerintah juga kemudian mengeluarkan beberapa kebijaksanaan yang mendorong kegiatan penanaman modal antaranya berupa penyelenggaraan kredit investasi, pembentukan lembaga-lembaga keuangan seperti PT. Bahana, PT. Askrindo dan sebagainya.

Sebenarnya kegiatan penanaman modal asing pun telah lama ada di Indonesia, seperti BAT, Unilever, Goodyear, beberapa perkebunan dan sebagainya. Adanya modal asing tersebut sampai dengan saat diterbitkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) telah mendapat penilaian yang bervariasi antara menolak dan menerima modal asing. Sikap pro dan anti modal asing pada waktu tersebut dipengaruhi oleh keadaan dan suasana dari waktu yang bersangkutan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

Para penanam modal asing sendiri sebaliknya mempunyai penilaian terhadap sesuatu negara yang akan dijadikan objek penanaman modalnya, sebab penanam modal asing hanya bersedia menanam modal asingnya jika pertimbangan-pertimbangan keuntungan dan kelangsungan usahanya terjamin.

Sementara UU PMA dapat diterbitkan pada tahun 1967, usaha pengembangan penanaman modal nasional mulai digerakkan melalui usaha pemerintah dengan penyertaan modal pemerintah dan kemudian dalam bentuk pemberian fasilitas penanaman modal dalam negara serta kredit perbankan.

Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa aspek ekonomi Indonesia sebagai salah satu anggota negara yang sedang berkembang telah mengalami kemajuan perekonomian dengan pesat selama kurun waktu tiga dasawarsa. Para pengambil keputusan kebijaksanaan pembangunan dihadapkan pada pilihan pembangunan yang membuka kemungkinan diperluasnya perdagangan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, antara lain dengan dianutnya prinsip ekonomi terbuka dan devisa bebas. Sistem perekonomian yang terbuka ini sangat berbeda dengan sistem perekonomian yang tertutup dan serba mandiri pada era sebelum orde baru, saat dimulainya program pembangunan.

Beberapa perkembangan yang perlu dicatat setelah penetapan keputusan pembangunan tersebut adalah misalnya stabilitas perekonomian

perlu dipelihara melalui berbagai kebijakan ekonomi makro dan melalui program stabilitas pangan. Konsep pembangunan ini telah merangsang perkembangan investasi dari sektor pemerintah, khususnya investasi dalam program pengadaan pangan dan program pembangunan sosial seperti waduk, tenaga listrik, jalan raya, jembatan, pelabuhan, landasan pesawat dan berbagai bentuk infrastruktur fisik lainnya.¹¹¹

Perkembangan lain, adalah bahwa keterbukaan dalam sistem perekonomian Indonesia membawa konsekuensi perkembangan penyiapan landasan hukum dan sistem kelembagaan yang lebih formal. Pada masa persiapan dimaksud yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang dalam perkembangannya terlihat menjadi landasan bagi tumbuh kembangnya investasi di beberapa sektor beberapa tahun kemudian. Dengan adanya landasan hukum tersebut menjadi terbuka kemungkinan masuknya berbagai bentuk partisipasi asing (baik badan hukum maupun perseorangan) dalam bentuk penanaman modal langsung.¹¹²

Perkembangan yang dapat terlihat kemudian adalah bahwa pemerintah memandang perlu stabilitas politik dipertahankan agar momentum

¹¹¹ Mochtar Olong, *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA, BPHN*, Jakarta, 1999 / 2000, hal.21.

¹¹² Ibid.

pembangunan dan kepastian berusaha dapat dipelihara. Dalam konteks investasi, stabilitas politik yang cukup terpelihara, sebagaimana diukur dengan kemampuan menurunkan dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, merupakan pendorong bagi terpeliharanya iklim kepastian berusaha, yaitu dengan mengurangi tingkat resiko kegagalan yang disebabkan oleh pengaruh eksternal perusahaan.

Meningkatnya pamor Indonesia sebagai salah satu lokasi investasi yang aman di kawasan Asia merupakan manifestasi tercapainya stabilitas politik dalam periode 1970 sampai dengan 1990. Dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir hingga berlangsungnya masa krisis sejak medio tahun 1997, kegiatan investasi di Indonesia telah mampu mendorong pembangunan indikator makro ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang mantap dan tingkat inflasi yang relatif rendah serta adanya peningkatan kesejahteraan rakyat.¹¹³

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut didorong oleh kegiatan investasi yang mempunyai peran besar sekitar 30 % – 37 % terhadap pendapatan nasional, sehingga mampu menggerakkan pelaku-pelaku pembangunan di berbagai sektor ekonomi di tanah air. Dalam hal ini peran penanaman modal asing juga penanaman modal dalam negeri cukup dominan yaitu sekitar 60 % – 70 % persen terhadap investasi nasional.¹¹⁴

¹¹³ Ibid, hal.22.

¹¹⁴ Ibid.

Namun dengan berlangsungnya krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997 dan dengan cepatnya arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia, serta semakin buruknya keadaan politik di Indonesia akibat pergantian pemerintahan dari Presiden Soeharto kepada Habibie dan sekarang kepada Presiden Abdurrachman Wahid dimana penataan pemerintahan serta penanganan ekonomi gagal dilakukan mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi semakin terpuruk. Demikian juga pengangguran meningkat tajam dan daya beli masyarakat sangat rendah, bahkan peran investasi menjadi turun.

Khusus perkembangan mengenai investasi PMA sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1999 tercatat sebanyak 7016 proyek PMA dengan nilai investasi sebesar US \$ 219,09 milyar. Sebagian besar dari proyek-proyek PMA yang telah mendapat persetujuan pemerintah tersebut telah berproduksi komersial dan bahkan sebagian lagi sudah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Namun memburuknya perekonomian nasional dan tidak adanya kepastian hukum menyebabkan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kepastian kondisi di Indonesia termasuk para investor. Peran investasi menurun tajam hingga 21% dari pendapatan nasional.¹¹⁴

¹¹⁴ Ibid, hal.23.

b. Maksud dan Tujuan Penanaman Modal Asing

Pada umumnya negara-negara berkembang sangat tertinggal di bidang teknologi dan kurang mempunyai modal, sehingga tidak mempunyai kemampuan mengeksplorasi sumber daya alamnya. Oleh karena itu mereka harus berusaha untuk dapat menarik modal asing dari negara-negara maju untuk ditanamkan di negerinya dengan berbagai maksud antara lain yaitu untuk meningkatkan pendapatan nasional, membuka lapangan kerja, alih teknologi dan lain sebagainya.

Berbeda dengan negara maju mereka mempunyai keahlian dan teknologi serta modal, tetapi memiliki keterbatasan sumber daya alam dan pasar yang sedikit. Jadi mereka menanamkan modalnya atau mereka melokasikan industrinya ke negara-negara berkembang karena di negaranya sendiri upah tenaga kerja sangat tinggi, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif lagi untuk dijual di pasar.

Sebagai akibat hubungan historis dan kekurangan sumber-sumber alam di negara-negara yang melakukan investasi, perusahaan-perusahaan luar negeri telah memainkan peran dominan dalam pengeksportan bahan-bahan mentah dari negara-negara kaya bahan mentah tetapi sedang berkembang kembali ke negaranya. ¹¹⁶

¹¹⁶ J. Panglaikim, *Investasi Langsung Jepang Di Kawasan ASEAN*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984, hal.43.

Sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, Indonesia telah menetapkan kebijakan menarik modal asing untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Harapan yang tertuang di dalam UU PMA dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang penanaman modal pada umumnya dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produksi, memberi perluasan kesempatan kerja, mengolah sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negeri. Secara menyeluruh PMA diharapkan dapat ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya.¹¹⁷

Peranan modal asing dimaksudkan juga untuk membuka kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknologi kepada bangsa Indonesia dalam waktu secepatnya memelihara keseimbangan kualitas sumber daya manusia dan disamping itu peningkatan pembinaan usaha golongan ekonomi lemah yang mungkin dapat diwujudkan dalam bentuk rekanan bisnis atau sebagai pengayom dari industri-industri kecil karena penanaman modal asing tidak boleh melakukan kegiatan usaha monopoli yaitu kegiatan dari hulu ke hilir.

Dengan kata lain bahwa maksud dan tujuan adanya penanaman modal

¹¹⁷ Sumantoro, op.cit., hal.199.

asing di Indonesia adalah agar perusahaan PMA tersebut dapat berperan dalam pembangunan nasional di negara Indonesia. Namun satu hal prinsip yang perlu kita pegang sebagai pedoman ialah bahwa kita tidak dapat semata-mata mengharapkan sesuatu dari pihak lain, melainkan kita sendiri juga perlu mengusahakan langkah-langkah untuk menciptakan kemudahan bagi penanaman modal asing dan kepastian hukum serta terjaminnya stabilitas keamanan dan politik.

3. Peraturan Pokok Perundang-undangan Berkaitan Dengan Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967

Pada tahun 1967, dalam rangka pembangunan ekonomi, dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Sama halnya dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh negara berkembang seperti Thailand, Malaysia, Philippina secara garis besar upaya menarik modal asing tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek yang dapat dikatakan merupakan daya tarik bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-undang Penanaman Modal Asing selalu dikaitkan dengan insentif, hak-hak investor dan jaminan investasi yang diberikan oleh negara.

Dengan adanya undang-undang penanaman modal asing di Indonesia maka ini berarti pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi para

investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Menurut Undang-undang Penanaman Modal Asing ini bahwa perusahaan yang merupakan perusahaan penanaman modal asing yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk “Badan Hukum” menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing ini juga ditentukan oleh pemerintah bidang-bidang usaha yang terbuka bagi orang asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

Ditetapkan pula bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi

senjata, mesin, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Pemilik modal menurut undang-undang mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan Direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam. Hal ini sudah sewajarnya karena penanaman modal asing tentu saja ingin menyerahkan pengurusan modal kepada orang kepercayaannya. Dalam hal kerjasama antara modal asing dan modal nasional, maka Direksi ditetapkan bersama-sama.

Perusahaan-perusahaan penanaman modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia. Sedangkan dalam peraturan lain di penanaman modal asing disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing diijinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing.

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam atau di luar negeri secara teratur dan terarah dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat digantikan oleh tenaga warganegara Indonesia.

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memungkinkan diberikannya tanah kepada perusahaan-perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan hak pakai tetapi juga dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha.

Undang-undang Penanaman Modal Asing memberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya seperti misalnya pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu yang tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat-saat usaha tersebut mulai berproduksi.

Hal ini disebabkan usaha sesuatu perusahaan itu beraneka ragam dan dengan demikian juga memungkinkan berproduksinya, maka jangka waktu pembebasan pajak dapat diatur sesuai dengan itu. Jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dianggap cukup untuk memberi kompensasi terhadap pengeluaran yang dilakukan sebelum usaha-usaha bersangkutan berproduksi.

Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejak laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi. Pembagian laba yang diperoleh selama waktu pembebasan wajar dibebaskan juga dari pengenaan pajak dividen.

Pajak perseroan atas keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak

melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali. Keuntungan yang ditanam kembali, diperlukan sebagai penanaman modal asing baru.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (P P) Nomor 20 Tahun 1994 berpedoman pada Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 6 UU PMA mengalami perubahan total, misalnya yang dulu dianggap tertutup, sekarang menjadi terbuka bagi PMA. Bidang-bidang itu menyangkut pelabuhan, produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta umum, pembangkit tenaga atom, dan media massa. ¹¹⁸

Tindakan pemerintah mengeluarkan PP ini merupakan terobosan yang berani dalam rangka menjaga kontinuitas perputaran roda pembangunan yang sekarang ini tengah memasuki Pembangunan Jangka Panjang II serta pencapaian sasaran-sasaran tertentu yang telah ditargetkan sebelumnya. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa dengan dikeluarkannya PP 20 Tahun 1994 menjadikan Indonesia sebagai negara (sedang) berkembang yang paling cepat memberikan “reaksi positif” terhadap kesepakatan baru The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Dalam arti, mungkin

¹¹⁸ Zudan Arif Fakrulloh dan H. Hadi Wuryan, *Hukum Ekonomi (Buku Kesatu)*, Karya Abditama, Surabaya, 1997, hal.73.

Indonesia sebagai negara (sedang) berkembang yang pertama di dunia melakukan penyesuaian terhadap isi kesepakatan GATT. Pemerintah dalam menangkis anggapan-anggapan itu mengemukakan dalih bahwa saat ini tidak ada alternatif lain yang lebih baik untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia yang kurang *favourable*.¹¹⁹

Secara makro, ada sejumlah alasan ekonomi pragmatis yang mendukung perlunya kebijakan baru menarik investasi asing. *Pertama*, selama beberapa kuartal terakhir terjadi penurunan PMA ke Indonesia. *Kedua*, kecenderungan *leveling off* ekspor nonmigas Indonesia, yang akan memperbesar *debt service ratio* (DSR) yang saat itu sudah tinggi. *Ketiga*, meningkatnya defisit transaksi berjalan. Untuk itulah, perlu peningkatan arus modal masuk agar neraca pembayaran bisa seimbang. Satu-satunya sumber yang bisa diharapkan adalah melalui PMA.¹²⁰

Investor asing dalam rangka usaha patungan kini diperbolehkan menguasai saham sampai 95%. Sekarang ini investor asing cukup mencari mitra local, yang jika perlu hanya menguasai saham 5% saja. Sementara itu, PMA langsung bebas menjual sebagian sahamnya kepada warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia tanpa batas minimal, setelah

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid.

beroperasi selama 15 (limabelas) tahun, baik lewat pasar modal dalam negeri atau *direct placement*.

Dengan demikian melalui ketentuan ini, investor asing tidak perlu khawatir menjadi pemegang saham minoritas setelah perusahaan yang dirintisnya mempunyai potensi untuk terus dikembangkan. Jika ingin tetap menguasai perusahaan, pihak asing boleh meneruskan kepemilikan mayoritasnya. Bahkan mereka diperbolehkan untuk melakukan penambahan modal pendirian perusahaan baru, dan atau pembelian saham dalam rangka PMDN.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 ini juga memberikan kelonggaran jumlah modal yang harus ditanamkan oleh investor asing. Jumlah investor PMA tidak lagi dibatasi minimal 1 (satu) juta dolar AS (atau dengan pertimbangan tertentu minimal 250,000,00 dolar AS). Jumlah yang ditanamkan sepenuhnya diserahkan kepada investor asing. Lebih dari itu, PMA patungan kini boleh mendirikan perusahaan dan melaksanakan kegiatan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Adapun PMA langsung, dianjurkan didirikan di kawasan berikat dan kawasan industri. Mengingat ketentuan ini hanya bersifat fakultatif, maka pada dasarnya PMA langsung juga boleh didirikan dan beroperasi dimana saja. ¹²¹

¹²¹ Ibid, hal.74.

Hal lain yang menandai liberalisasi adalah ketentuan mengenai kelonggaran bagi investor asing, khususnya PMA patungan untuk memasuki 9 (sembilan) sektor usaha yang tergolong vital dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Dari substansi demikian itu, tampak kalau semangat dan isi PP 20 Tahun 1994 merupakan kebijakan ekonomi yang sangat liberal. ¹²²

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

Di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dinyatakan bahwa bagi perusahaan yang menjalankan usahanya atas dasar undang-undang ini, mutlak harus menjalankan usahanya tersebut dalam bentuk *Badan Hukum* menurut Hukum Indonesia. Kemudian dengan Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 April 1967 Nomor : J.A.5/31/24 yang ditujukan kepada para Notaris di seluruh Indonesia (sebagai pejabat pembuat akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "... berbentuk Badan Hukum ..." adalah berbentuk *Perseroan Terbatas*.

Memori Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Penanaman Modal Asing tersebut menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat menimbulkan

¹²² Ibid.

kesulitan atau ketidak tegasan di bidang hukum internasional. Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan bentuk badan hukum Indonesia dengan demikian maka akan mendapatkan suatu ketegasan dan kepastian mengenai materi hukumnya yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia.

Dengan demikian berarti berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Penanaman Modal Asing, untuk penanaman modal secara langsung di Indonesia, mutlak harus dengan mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut ditentukan, untuk bidang-bidang tertentu, penanaman modal itu wajib dilakukan secara patungan (*joint venture*) dengan pihak pengusaha nasional Indonesia. Pada beberapa sektor tertentu bahkan ditentukan harus secara patungan dengan badan-badan usaha negara. ¹²³

Sesungguhnya dalam beberapa hal tertentu memang ada kecenderungan pihak perusahaan asing, sekalipun tidak diharuskan, lebih menyukai memilih pembentukan badan hukum sejenis perseroan terbatas menurut hukum yang berlaku di negara ketempatan, sehingga dengan demikian berlaku sepenuhnya hukum negara yang ditempati.

Melalui cara-cara tersebut banyak bermanfaat, termasuk memperoleh kemudahan ijin-ijin yang diperlukan. Hanya saja ada resiko yaitu

¹²³ Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing Dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1968, hal.52.

kemungkinan mengalami hambatan birokrasi yang umum dalam suatu negara yang berkembang.

Mengenai perseroan terbatas maka secara khusus pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan berlakunya undang-undang ini maka Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang mengatur mengenai perseroan terbatas berikut segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan mengenai perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD sudah tidak lagi dapat memenuhi dan mengikuti kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dan dunia usaha serta dalam rangka menciptakan kesatuan hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional serta menjamin kepastian dan penegakan hukum maka keluarlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas tersebut.

Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa Perseroan Terbatas adalah *Badan Hukum* yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan

pelaksanaannya.

Dengan demikian bagi penanaman modal asing yang ingin menanamkan modalnya dengan cara membentuk suatu Perseroan Terbatas maka yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya.

C. Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Dan Problematikanya

1. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) :

a. Keputusan Presiden Tentang BKPM

Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal didasarkan atas Keputusan Presiden. Keputusan Presiden Tentang BKPM ini telah berkali-kali dirubah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi terutama perkembangan ekonomi. Pada tahun 1968 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor : 286 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Tahun 1973 dikeluarkan lagi Keputusan Presiden Nomor : 20 Tahun 1973 Tentang BKPM dimana Keputusan Presiden tersebut sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor : 286 Tahun 1968.

Selanjutnya pada tahun 1980 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor :

28 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Khusus mengenai BKPMMD ini juga telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 116 Tahun 1998.

Kemudian dalam perkembangan lebih lanjut dikeluarkan lagi beberapa Keputusan Presiden (KepPres) Tentang BKPM yaitu KepPres Nomor : 33 Tahun 1981, KepPres Nomor : 113 Tahun 1998, KepPres Nomor : 183 Tahun 1998, KepPres Nomor : 37 Tahun 1999, KepPres Nomor : 120 Tahun 1999 dan KepPres Nomor : 121 Tahun 1999.

Dasar pertimbangan bagi dikeluarkannya beberapa Keputusan Presiden tersebut adalah untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan dan proses penyelesaian penanaman modal, dipandang perlu untuk membentuk suatu Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai suatu pusat pelayanan kegiatan penanaman modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah struktur organisasi BKPM untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat dan kebutuhan atas pelayanan yang cepat.

Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah suatu lembaga Pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi utama BKPM dalam kaitannya dengan Presiden adalah membantu Presiden dalam menentukan kebijaksanaan di bidang penanaman modal serta penanaman pelaksanaan.

Perubahan Keputusan Presiden Tentang BKPM juga dimaksudkan untuk memacu peningkatan penanaman modal dan menggairahkan penanaman modal bagi kepentingan pembangunan perekonomian, dipandang perlu menyederhanakan sistem dan prosedur penanaman modal. Untuk itu selalu dilakukan peninjauan kembali terhadap tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal, Biro Penanaman Modal pada departemen-departemen yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha penanaman modal serta Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Perubahan-perubahan Keputusan Presiden berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden terdahulu tentang BKPM. Tindak lanjutnya adalah dengan dikeluarkannya beberapa Keputusan Presiden yang baru, yang mengatur penyederhanan sistem dan prosedur penanaman modal dalam rangka lebih mempercepat dan meningkatkan pelayanan dan perijinan investasi.

b. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden. BKPM merupakan suatu lembaga pemerintah non departemen.

BKPM mempunyai tugas utama untuk membantu Presiden di dalam hal menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam bidang penanaman

modal, pemrosesan atas persetujuan penanaman modal dan penilaian atas pelaksanaannya, dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang investasi langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BKPM menyelenggarakan beberapa fungsi penting dalam melaksanakan tugasnya yaitu antara lain sebagai berikut : merumuskan kebijakan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapat persetujuan ; melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur di luar undang-undang penanaman modal ; menyusun daftar bidang usaha penanaman modal secara berkala sebagai pedoman pembangunan sector-sektor penanaman modal, dengan memperhatikan pandangan dan bahan-bahan yang disampaikan oleh departemen / instansi yang terkait dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ; mengajukan daftar bidang usaha penanaman modal tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Presiden ; atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968

menerbitkan ijin dan keputusan pelaksanaan penanaman modal sesuai pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersangkutan.

BKPM dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Investasi dan bertanggung jawab pada Presiden. Kepala BKPM dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Utama yang bertanggung jawab penuh kepada Kepala BKPM. Susunan organisasi BKPM terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama dan beberapa Deputi-deputi.

2. Surat Persetujuan BKPM Untuk Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

2.1. Persetujuan Penanaman Modal Asing

Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing mengeluarkan Persetujuan Penanaman Modal Asing dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Koordinasi Penanaman Modal mengatur Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing, yang telah berkali-kali dirubah terakhir dengan Keputusan Nomor : 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999.

Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing diberikan bagi permohonan untuk melakukan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) bagi penanam modal yang akan mendirikan atau

berkehendak membentuk Perseroan Terbatas, yang dapat diajukan oleh warganegara asing dan / atau badan hukum asing dan / atau perusahaan PMA. Atau dapat juga diajukan oleh warganegara asing dan / atau badan hukum asing dan / atau perusahaan PMA bersama dengan warganegara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia.

Persetujuan Penanaman Modal Asing adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip Atau Ijin Usaha Sementara.¹²⁴

Permohonan penanaman modal dalam rangka PMA diajukan kepada Menteri Negara Investasi (Meninves) / Kepala BKPM atau kepada Kepala Perwakilan RI setempat atau juga kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Dalam hal permohonan penanaman modal yang berlokasi di 2 (dua) atau lebih, permohonan diajukan kepada Meninves / Kepala BKPM.

BKPM kemudian melakukan penilaian terhadap permohonan penanaman dalam rangka PMA. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan tersebut, Meninves / Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini

¹²⁴ I. G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal – Pedoman Prosedur Mendirikan Dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA Dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal.32.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM setempat, mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMA dikeluarkan tetapi tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, maka SP-PMA yang telah dikeluarkan tersebut akan batal dengan sendirinya.

Khusus untuk bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi, permohonan penanaman modal asing dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara antara calon penanam modal dengan Pemerintah Republik Indonesia yang rancangannya disiapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi bersama calon penanam modal.

Setelah rancangan Kontrak Karya atau Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batu Bara disetujui oleh para pihak yang bersangkutan dan disampaikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Meninves / Kepala BKPM dan disetujui, serta mendapat persetujuan Presiden Republik Indonesia, maka Menteri Pertambangan dan Energi menandatangani Kontrak Karya atau Perjanjian Karya tersebut. Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara diperlakukan sama seperti SP-PMA yang dikeluarkan oleh Meninves / Kepala BKPM.

Bagi suatu Perseroan Terbatas dalam rangka PMA yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, apabila hendak merubah anggaran dasarnya seperti merubah bidang usaha perseroan, perubahan penggunaan tenaga kerja, perubahan investasi dan sumber pembiayaan, perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA, pembelian saham perusahaan PMDN dan non PMA / PMDN yang sudah berdiri oleh perusahaan PMA atau warganegara asing atau badan hukum asing, penggabungan perusahaan (merger) harus mendapat surat persetujuan dari Meninves / Kepala BKPM atau Ketua BKPM.

Sementara perubahan nama perseroan dalam rangka PMA harus diberitahukan secara tertulis kepada Meninves / Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM. Pemberitahuan tertulis tersebut harus melampirkan rekaman akta perubahan anggaran dasar perseroan yang memuat perubahan nama perseroan yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman atau kesepakatan para pihak bagi perseroan dalam rangka PMA yang belum mendapat pengesahan Menteri Kehakiman.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas adalah ketentuan yang memuat tentang nama perseroan serta bidang usaha, permodalan dan Direksi serta Komisaris. Ketentuan-ketentuan tersebut harus memperhatikan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1995 serta Peraturan Pelaksanaannya.

2.2. Persetujuan Penanaman Modal Asing Berkaitan Dengan Undang-undang Perseroan Terbatas

a. Nama Perseroan Serta Bidang Usaha

Di dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dicantumkan nama perseroan baik untuk perseroan yang akan mendirikan Perseroan Terbatas dalam rangka PMA maupun yang akan merubah status dari perseroan non PMA / non PMDN menjadi perseroan dalam rangka PMA atau perseroan PMA yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman tetapi akan merubah nama perseroan.

Pemakaian nama Perseroan Terbatas harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 1968 Tentang Pemakaian Nama Perseroan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam ketentuan mengenai nama perseroan menyatakan bahwa perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Pemakaian nama perseroan amatlah penting sehingga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang

Pemakaian Nama Perseroan, oleh karena nama perseroan adalah jati diri perseroan tersebut.

Pemakaian nama perseroan secara hukum tidak boleh merugikan sesama pengusaha di bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik yang sudah memakai nama tersebut dan secara resmi dicantumkan dalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atau perlindungan hukum kepada pihak yang telah lebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama tersebut kepada Menteri Kehakiman.

Dalam rangka untuk mempertegas kepastian perlindungan hukum bagi pemakaian nama perseroan, maka setiap pemakaian nama perseroan terbatas harus mendapat persetujuan Menteri dan nama perseroan terbatas itu sendiri hanya boleh dipakai oleh badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk membentuk badan hukum perseroan terbatas.

Dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing selain nama perseroan, yang juga penting untuk diperhatikan adalah ketentuan mengenai bidang usaha yang mencerminkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa kegiatan

perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan ditentukan bahwa permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut hanya menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja, kecuali ada tambahan lain. Yang dimaksud dengan hanya “menunjukkan maksud dan tujuan perseroan”, misalnya “PT. Impor Ekspor”.

Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan”, misalnya “PT. Hotel Indonesia” yang ternyata bergerak di bidang perdagangan umum, atau “PT. Dirgantara Teknik” yang ternyata kegiatan usahanya bergerak di bidang pemborongan umum.

b. Permodalan

Dalam SP-PMA dicantumkan juga mengenai modal perseroan dalam ketentuan mengenai Rencana Sumber Pembiayaan / Permodalan, dimana dicantumkan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor dari perseroan.

Ketentuan mengenai modal perseroan di dalam SP-PMA harus

memperhatikan dan menyelaraskan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Pada saat pendirian perseroan undang-undang menentukan bahwa paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus telah ditempatkan.

Bagi perseroan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana juga perseroan pada umumnya maka penysetoran dari setiap penempatan modal dapat disetor paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.

Pengeluaran saham lebih lanjut tiap kali harus disetor penuh, ketentuan ini menegaskan bahwa sejak tanggal pengesahan tidak dimungkinkan penysetoran atas saham secara mengangsur karena kemungkinan mengangsur saham hanya dilakukan sebelum pengesahan diberikan Menteri Kehakiman.

c. Direksi Dan Komisaris

Bagian lain yang penting yang tercantum dalam SP-PMA adalah mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, khususnya mengenai Pengurus Perusahaan, dimana tercantum jumlah Direksi dan Dewan Komisaris serta kewarganegaraannya.

Pencantuman Direksi dan Komisaris harus didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Kedudukan

Direksi sangat penting karena kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat atau perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Direksi.

Apabila PT. PMA hendak merubah anggaran dasarnya atau PT. Non PMA / Non PMDN hendak merubah statusnya menjadi PT. dalam rangka PMA maka peranan Direksi menjadi sangat penting agar supaya perubahan anggaran dasar tersebut tidak menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Mengenai Komisaris yang juga dicantumkan di dalam SP-PMA maka pencantuman tersebut harus didasarkan atas ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas. Setiap perseroan terbatas ditentukan oleh Undang-undang Perseroan harus memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.

Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka

wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris, karena untuk perseroan yang kegiatan usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat diperlukan pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

3. Peranan Departemen Kehakiman

3.1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Sebagai Dasar Hukum

Apabila kita melihat kembali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, khususnya Pasal 3 undang-undang tersebut, ditentukan bahwa bagi perusahaan yang menjalankan perusahaan dalam rangka penanaman modal asing yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum dan berkedudukan di Indonesia. Badan Hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas.

Instansi pemerintah yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk memberikan pengesahan atas akta pendirian suatu perseroan terbatas demikian juga memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah Departemen Kehakiman yaitu oleh Menteri Kehakiman.

Mengenai kewenangan tersebut, sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas berlaku, Kitab Undang Undang

Hukum Dagang (KUHD) pada Bagian Ketiga Tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 36 menyatakan bahwa sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahan. Lebih lanjut di dalam Pasal 36 KUHD dinyatakan bahwa untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama.

Peranan Departemen Kehakiman sebagai instansi yang berwenang memberikan pengesahan atas akta pendirian perseroan terbatas dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut menggantikan pengaturan mengenai perseroan terbatas yang terdapat dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, dimana Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan bahwa perseroan terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri (Kehakiman).

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa perubahan tertentu anggaran dasar perseroan harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Kemudian Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa perubahan anggaran dasar perseroan tertentu selain sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) (yaitu perubahan nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar perseroan, pengurangan modal ditempatkan dan disetor atau perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya) cukup dilaporkan kepada Menteri (Kehakiman) paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian maka proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penerimaan laporan atas perubahan anggaran dasar perseroan ada pada Departemen Kehakiman. Untuk itu Departemen Kehakiman kemudian membuat suatu pedoman tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

3.2. Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

a. Tata Cara Pengajuan Permohonan

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Perseroan

Terbatas khususnya Pasal 7 ayat (6) mengenai perolehan status badan hukum setelah akta pendirian akta perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Pasal 9 mengenai permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas maka Departemen Kehakiman mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996.

Ketentuan Pasal 1 dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 menyatakan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian perseroan diajukan oleh para pendiri bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman, melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum), melalui Direktur Perdata. Untuk permohonan pengesahan dibuat Format permohonan oleh Departemen Kehakiman.

Secara umum Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut menentukan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian perseroan harus diajukan dengan melampirkan : 1 (satu) salinan akta pendirian perseroan yang bermeterai dan apabila ada perubahan atas akta pendirian dilampirkan akta-aktanya bermeterai yang dibuat sesuai dengan standar akta yang telah ditentukan ; Data Akta Pendirian yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di atas kertas bermeterai ; Bukti Setoran Modal dari bank ; Foto copy Nomor

Pokok Wajib Pajak Perseroan ; Bukti Pembayaran Uang Muka Pengumuman akta pendirian perseroan dalam Tambahan Berita Negara dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia ; Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1993.

Standar akta yang dimaksud tersebut di atas dibuat oleh Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mempermudah Notaris seluruh Indonesia dalam pembuatan akta sehingga ada keseragaman tetapi dengan tidak menutup kemungkinan untuk Notaris membuat klausula lain atau klausula tambahan dalam akta asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar akta tersebut juga dimaksudkan untuk mempermudah bagi Departemen Kehakiman di dalam melakukan pemeriksaan terhadap materi akta sebab selama ini sebelum adanya standar akta, Departemen Kehakiman mengalami kesulitan dalam memeriksa akta karena materi akta yang beraneka ragam pembuatannya sehingga antara satu Notaris dengan Notaris lainnya tidak sama.

Beberapa persyaratan tambahan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut yang harus dilampirkan dalam surat permohonan sehubungan dengan maksud dan tujuan perseroan serta bentuk perseroan

misalnya : foto copy Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian PT. Persero, khusus bagi PT. Persero ; foto copy Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan modal perseroan ; penunjukan anggota Direksi dan Komisaris, khusus bagi PT. Persero ; foto copy ijin prinsip pendirian Bank dari Menteri Keuangan, khusus bagi PT. dibidang perbankan ; Surat Rekomendasi dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil atau Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil bagi perseroan yang salah satu pendirinya adalah koperasi.

Dokumen yang terlampir dalam bentuk foto copy sebagaimana tersebut di atas wajib dibubuhi keterangan dan ditandatangani oleh Notaris bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.

Khusus untuk perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing maka persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat permohonan pengesahannya adalah foto copy Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari BKPM dimana foto copy tersebut juga harus dibubuhi keterangan dan ditandatangani oleh Notaris bahwa foto copy tersebut sesuai dengan aslinya.

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan baru dapat diterima apabila persyaratan-persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi. Dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan diterima, Menteri Kehakiman

memberikan pengesahan atau menolak permohonan pengesahan. Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Untuk perubahan anggaran dasar PT maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Departemen Kehakiman menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996.

Sebagaimana halnya permohonan pengesahan akta pendirian perseroan maka permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan diajukan oleh Direksi perseroan atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman, melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum), melalui Direktur Perdata. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut oleh Departemen Kehakiman juga dibuat Format permohonan untuk keseragaman bentuk permohonan.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan secara umum harus diajukan dengan melampirkan : 1 (satu) salina akta bermeterai mengenai Berita Acara Rapat atau salinan akta bermeterai mengenai Pernyataan Keputusan Rapat, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

yang dibuat sesuai dengan standar akta yang telah ditentukan ; Notula Rapat perubahan anggaran dasar dalam hal dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat ; Data akta perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di atas kertas bermeterai ; Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan ; Bukti Pembayaran Uang Muka Pengumuman akta perubahan anggaran dasar dalam Tambahan Berita Negara dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia ; Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum.

Untuk perseroan terbatas yang akan merubah anggaran dasarnya menjadi perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing atau merubah beberapa ketentuan dari anggaran dasarnya yang memerlukan persetujuan BKPM harus melampirkan foto copy Surat Persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Foto copy tersebut juga harus dibubuhi keterangan dan ditandatangani Notaris bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dapat diterima apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diterima, Menteri Kehakiman memberikan persetujuan atau menolak permohonan persetujuan. Apabila ditolak maka penolakan tersebut harus diberitahukan secara tertulis

disertai dengan alasan penolakannya.

Beberapa perubahan anggaran dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, dikeluarkan juga Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan atas Perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Tata cara penyampaian atas perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan dan lampiran yang harus disampaikan sama dengan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar. Laporan perubahan anggaran dasar tersebut harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Proses Pemberian Pengesahan Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Setelah tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan pengajuan permohonan pemberian persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dipenuhi maka Departemen Kehakiman akan memprosesnya lebih lanjut.

Berkas permohonan diterima di loket penerimaan untuk diperiksa kelengkapan administrasinya sebagaimana yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Kehakiman tentang tata cara permohonan. Setelah berkas

permohonan tersebut lengkap maka berkas permohonan diteruskan kepada Seksi Dokumentasi untuk dilakukan pendataan, pemberian nomor kendali dengan menggunakan aplikasi komputer, mencatat dalam agenda umum dan khusus untuk permohonan perubahan anggaran dasar dan balasan surat dari Departemen Kehakiman maka dilakukan penggabungan dengan berkas lamanya, kemudian dilakukan pengecekan nama PT.

Berkas permohonan yang sudah lengkap diteruskan kepada Kepala Seksi yang membidangi seksi tertentu, yang salah satunya adalah Seksi Fasilitas Penanaman Modal. Kepala Seksi Teknis tersebut mendistribusikan berkas permohonan kepada pemeriksa (korektor) untuk diteliti substansinya.

Hasil penelitian atau pemeriksaan substansi dari korektor berupa konsep Surat Keputusan atau surat pengembalian untuk diadakan perbaikan, diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Teknis. Kemudian Kepala Seksi Teknis meneliti hasil kerja korektor dan selanjutnya menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Subdit Badan Hukum untuk diteliti ulang.

Setelah diteliti ulang oleh Kasubdit Badan Hukum, disampaikan kepada Kepala Seksi Dokumentasi untuk dilanjutkan kepada Direktur Perdata untuk mendapatkan klarifikasi formal dan diparaf. Kemudian berkas permohonan yang telah diklarifikasi dan diparaf Direktur Perdata dikirim ke Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk penomoran dan penanggalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang pengesahan

atau persetujuan atau penerimaan laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Berkas permohonan yang telah mendapat nomor dan tanggal Surat Keputusan disampaikan kembali kepada Kepala Seksi Dokumentasi untuk diketik. Surat Keputusan Pengesahan, Surat Keputusan Persetujuan dan Penerimaan Laporan yang telah selesai diketik disampaikan kepada Kasubdit untuk diteliti guna mendapat klarifikasi formal dan diparaf.

Surat Keputusan tersebut di atas setelah diparaf Kasubdit Badan Hukum kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ditandatangani atas nama Menteri Kehakiman.

Setelah Surat Keputusan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kemudian diserahkan kepada Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk kemudian diteruskan kebagian Tata Usaha Direktorat Perdata. Selanjutnya oleh bagian Tata Usaha Direktorat Perdata, Surat Keputusan Pengesahan, Surat Keputusan Persetujuan dan Penerimaan Laporan dikirim atau diserahkan kepada pemohon.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk mempercepat proses permohonan yang disampaikan ke Departemen Kehakiman, maka Departemen Kehakiman melakukan perbaikan sistem kerja dengan penerapan teknologi modern berupa pemanfaatan jaringan internet dimana sistem kerja

baru tersebut dinamakan SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum).

Perbedaan utama dari sistem kerja yang lama yaitu bahwa dalam sistem kerja baru permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui jaringan internet dimana Notaris sebagai pemohon diberi password untuk masuk ke sistem yang dibangun Departemen Kehakiman melalui jaringan internet. Permohonan secara elektronik dengan mengisi Formulir Isian Akta Notaris (FIAN) yaitu FIAN Model I untuk proses pengesahan akta pendirian, FIAN Model II untuk proses persetujuan perubahan anggaran dasar serta FIAN Model III untuk penyampaian laporan perubahan anggaran dasar.

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi Format Isian untuk dokumen pendukung yang juga dilakukan secara elektronik.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN dan atau keterangan dokumen pendukung tidak lengkap maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara elektronik

kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi : Salinan akta pendirian atau akta perubahan perseroan terbatas ; Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan ; Bukti Pembayaran Uang Muka Pengumuman akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam Tambahan Berita Negara dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia ; Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; Bukti Setor Modal dari Bank ;

Khusus untuk pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing, selain melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan dari instansi teknis terkait, dalam hal ini Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Menteri Kehakiman langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronik dan pernyataan tidak keberatan yang telah diberikan pada tahapan persetujuan atas kelengkapan pengisian FIAN yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi batal dan dicabut kembali.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

MENGENAI

PROBLEMATIKA PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan di Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya di Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dimana Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata tersebut merupakan bagian yang menangani proses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disebut PMA), dan penelitian di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan Surat Persetujuan berkaitan dengan PMA sebagai salah satu syarat pengesahan akta pendirian maupun persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PMA, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA.

Hakekat melakukan pengesahan terhadap akta perseroan terbatas adalah untuk memberikan status badan hukum terhadap perseroan terbatas, sedangkan untuk perubahan anggaran dasar yang telah mendapat status badan hukum adalah pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut.

Pengesahan terhadap akta pendirian perseroan terbatas dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang terkait.

Demikian juga dalam proses maupun prosedur pengesahan terhadap akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PMA, dilaksanakan dengan didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan lain yang terkait.

Penanganan proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (dahulu bernama Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan).

Sub Direktorat Badan Hukum merupakan salah satu unit organisasi pelaksana tugas Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PR.07.10.TH.2001 tanggal 6 Pebruari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijaksanaan teknis dan pengurusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Pada saat ini ada dua sistem yang dipergunakan dalam memproses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yaitu dengan **Sistem Manual** dan dengan **Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)**.

Sistem Manual adalah suatu sistem dimana dalam pengolahan data lebih banyak dilakukan dengan mempergunakan tangan manusia. ¹ Demikian juga penggunaan terhadap perangkat yang ada bukanlah perangkat yang canggih sehingga pemakaiannya didominasi oleh penggunaan tenaga manusia semata-mata.

Dengan sistem manual ini, penggunaan teknologi canggih sedikit sekali dimanfaatkan sehingga penghematan atas tenaga manusia dan penghematan

waktu dalam menangani proses permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas menjadi sangat sulit tercapai.

Persyaratan terhadap permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan perubahan anggaran dasar perseroan didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Kehakiman RI yang mengatur mengenai Tata Cara Permohonan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan mengenai apa yang harus dimuat di dalam akta pendirian, dimana ditentukan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya :

- (a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri ;
- (b) susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat ; dan

¹ Heru Suprptomo, *Hukum Dan Komputer*, Alumni, Bandung, 1996, hal.15.

- (c). nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Kemudian Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Yang dimaksud dengan “kuasa” disini menurut penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah Notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.

Apa yang harus dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, Pasal 12 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan, Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :

- (a). nama dan tempat kedudukan perseroan ;
- (b). maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (c). jangka waktu berdirinya perseroan ;
- (d). besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal yang disertai ;

- (e). jumlah saham, jumlah, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham ;
- (f). susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris ;
- (g). penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS ;
- (h). tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris ;
- (i). tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden ;
- (j). ketentuan lain menurut undang-undang ini.

Khusus untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, maka undang-undang menentukan perubahan-perubahan apa saja yang harus dimohonkan persetujuannya ke Menteri Kehakiman, sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yaitu perubahan :

- (a). nama perseroan ;
- (b). maksud dan tujuan perseroan ;
- (c). kegiatan usaha perseroan ;
- (d). jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu ;
- (e). besarnya modal dasar ;

- (f). pengurangan modal ditempatkan dan disetor ;
- (g). status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Untuk perubahan anggaran dasar perseroan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pemberian persetujuan dan penolakan atas perubahan anggaran dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Di dalam Sistem Manual, ketentuan mengenai “Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Sementara itu ketentuan mengenai “Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas” diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman

Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ditentukan bahwa :

- (1). Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan diajukan oleh para pendiri bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman, melalui Direktur Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan (sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum), c.q. Direktur Perdata.
- (2). Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan diajukan dengan melampirkan :
 - Satu salinan akta pendirian perseroan bermeterai dan akta perubahan pendirian bermeterai (apabila ada) yang dibuat sesuai dengan standar akta yang telah ditentukan.
 - Data akta pendirian yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di atas kertas bermeterai.
 - Bukti setoran modal dari Bank (apabila berbentuk fotokopi wajib dibubuhi keterangan dan ditandatangani oleh Notaris bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya / fotokopi yang dilegalisir Notaris).
 - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan (fotokopi dilegalisir Notaris).
 - Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan

dalam Tambahan Berita Negara dari kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1993.
- Fotokopi surat persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi dilegalisir Notaris).
- Apabila penyetoran saham dalam bentuk bukan uang, melampirkan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat pengumuman tentang penyetoran saham selain uang.
- Dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menentukan juga dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

- (1) permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan diajukan oleh Direksi perseroan atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman, melalui

Direktur Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan (sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) c.q. Direktur Perdata.

(2) permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan diajukan dengan melampirkan :

- a. 1 (satu) salinan akta bermeterai mengenai Berita Acara Rapat atau salinan akta bermeterai mengenai Pernyataan Keputusan Rapat, mengenai perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuat sesuai dengan standar akta yang telah ditentukan.
- b. notula rapat perubahan anggaran dasar dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat.
- c. data akta perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di atas kertas bermeterai.
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan.
- e. bukti pembayaran uang muka pengumuman akta perubahan anggaran dasar dalam Tambahan Berita Negara dari kantor Percetakan Negara RI.
- f. bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1993.
- g. fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) khusus bagi PT dengan fasilitas Penanaman Modal Asing yang belum berproduksi komersial atau perubahan PT non fasilitas menjadi PT dengan fasilitas penanaman modal.

- h. iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang membuat pengumuman tentang penyeteroran saham selain uang.
- i. dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut penanganannya dilakukan secara manual dengan tahap-tahap prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit.

Adapun mekanisme kerja sistem manual dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas (PT) dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT adalah sebagai berikut :

- a. Notaris menyampaikan permohonannya beserta kelengkapan administrasinya ke Departemen Kehakiman Dan HAM RI baik secara langsung maupun lewat Pos. Berkas permohonan diterima di loket Tata Usaha Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan diperiksa kelengkapan administrasinya. Kelengkapan administrasi yang dimaksud secara umum

sebagaimana tersebut sebelumnya di atas harus dipenuhi dan khusus untuk PT. PMA kelengkapan administrasinya adalah Surat Persetujuan dari BKPM.

- b. Berkas permohonan diteruskan kepada Seksi Dokumentasi Badan Hukum untuk dilakukan :
 - Pendataan.
 - Pemberian Nomor Kendali dengan menggunakan aplikasi komputer.
 - Mencatat dalam agenda umum.
 - Penggabungan dengan berkas lama (khusus untuk permohonan perubahan anggaran dasar dan balasan surat dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI).
 - Pengecekan nama PT.
- c. Berkas permohonan yang sudah lengkap diteruskan kepada Kepala Seksi Teknis masing-masing.
- d. Kepala Seksi Teknis mendistribusikan berkas permohonan pada korektor untuk diteliti substansinya.
- e. Hasil penelitian substansi dari korektor berupa konsep surat keputusan dan surat pengembalian untuk diadakan perbaikan, diserahkan kembali kepada Kepala Seksi masing-masing.

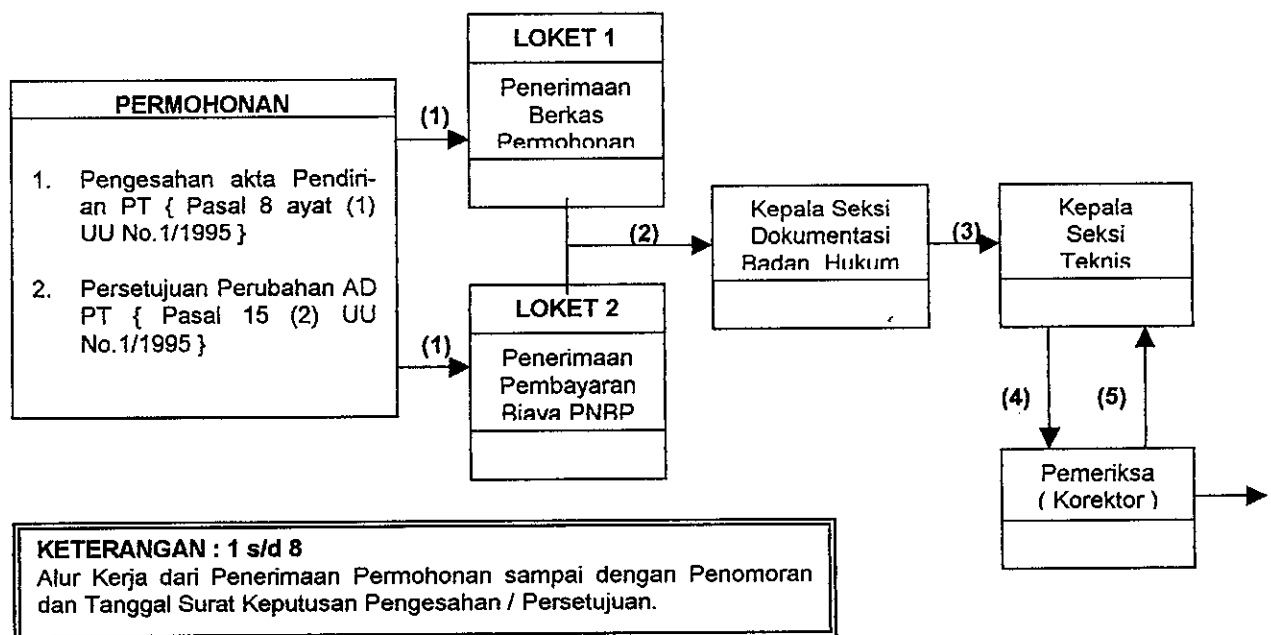
- f. Kepala Seksi Teknis meneliti hasil penelitian korektor dan selanjutnya menyampaikan berkas permohonan kepada Kasubdit Badan Hukum untuk diteliti ulang.
- g. Setelah diteliti ulang oleh Kasubdit Badan Hukum berkas permohonan disampaikan kepada Direktur Perdata untuk mendapat klarifikasi formal dan diparaf.
- h. Permohonan yang telah diklarifikasi dan diparaf Direktur Perdata dikirim ke Tata Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk penomoran dan penanggalan Surat Keputusan Pengesahan, dan Surat Keputusan Persetujuan.
- i. Berkas permohonan yang telah mendapat nomor dan tanggal Surat Keputusan disampaikan kepada Kepala Seksi Dokumentasi Badan Hukum untuk diketik secara manual.
- j. Surat Keputusan Pengesahan, dan Surat Keputusan Persetujuan yang telah selesai diketik disampaikan kepada Kasubdit Badan Hukum untuk diteliti guna mendapat klarifikasi formal dan diparaf.
- k. Surat Keputusan Pengesahan, dan Surat Keputusan Persetujuan yang telah diparaf Kasubdit Badan Hukum, disampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ditandatangani.
- l. Setelah Surat Keputusan ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi

Hukum Umum kemudian diserahkan kepada Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum disertai dengan Lembar Pengantar untuk diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Perdata.

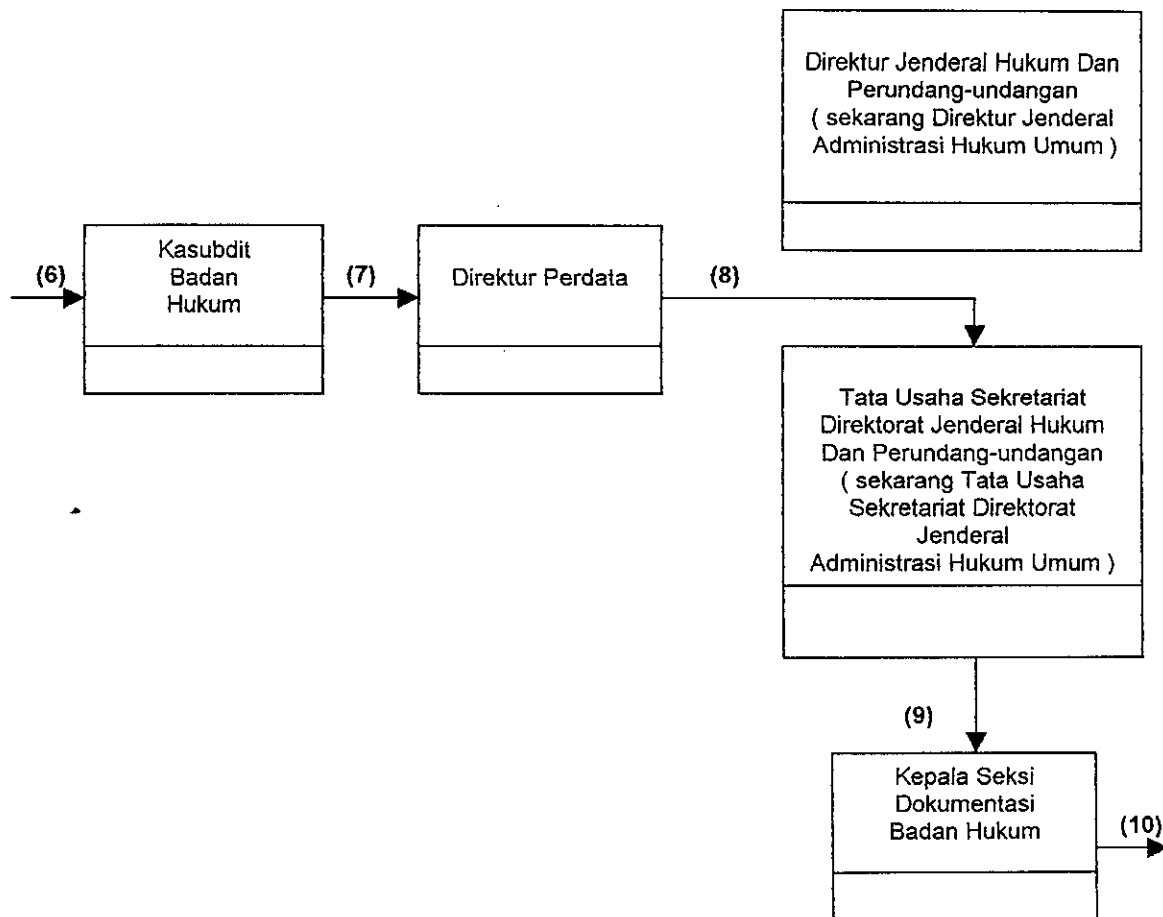
- m. Selanjutnya oleh Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Perdata, Surat Keputusan Pengesahan, dan Surat Keputusan Persetujuan dikirim atau diserahkan langsung kepada pemohon.

Untuk lebih mudah mendapatkan gambaran tentang mekanisme kerja sistem manual tersebut, maka di bawah ini akan ditampilkan mekanisme kerja sistem manual dalam bentuk skema sebagai berikut :

Alur Kerja Proses Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dengan Sistem Manual



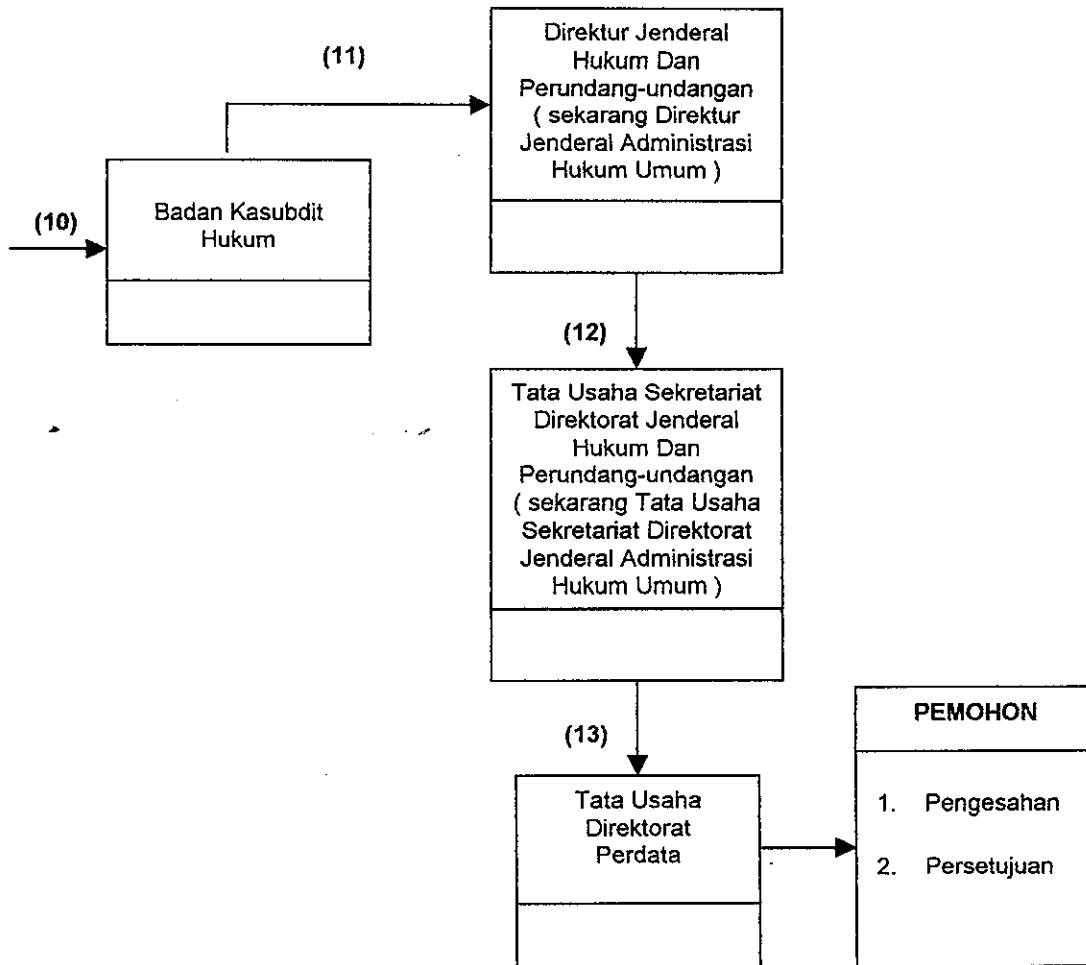
Sambungan Alur Kerja Proses Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dengan Sistem Manual



KETERANGAN : 1 s/d 8

Alur Kerja dari Penerimaan Permohonan sampai dengan Permohonan dan Tanggal Surat Keputusan Pengesahan / Persetujuan.

Sambungan Alur Kerja Proses Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dengan Sistem Manual



KETERANGAN : 9 s/d 13
 Alur Kerja dari pengetikan Surat Keputusan Pengesahan / Persetujuan s/d Penyerahan / Pengiriman Surat Keputusan kepada Pemohon.

Mekanisme kerja dengan sistem manual tersebut terlihat jelas mempunyai rangkaian atau alur kerja yang panjang dan birokratis, dan hal tersebut tentu saja mengakibatkan diperlukannya jangka waktu yang tidak singkat untuk sampai pada tahapan akhir proses. Dampak mekanisme kerja seperti ini adalah hampir tidak memungkinkan proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian atau proses penyelesaian permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

Mengenai jangka waktu proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian, Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan tegas menyatakan bahwa pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari setelah permohonan diterima.

Jangka waktu 60 (enampuluh) hari tersebut menurut penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian jangka waktu 60 (enampuluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan tersebut selain sangat sulit untuk dicapai dengan mekanisme kerja tersebut di atas juga menjadi semakin sulit karena jumlah permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan berasal dari seluruh wilayah Indonesia baik permohonan

yang disampaikan secara langsung maupun melalui jasa pos.

Setiap harinya Departemen Kehakiman Dan HAM RI menerima permohonan yang sangat banyak hingga ratusan dokumen permohonan per hari, tetapi sementara itu disisi lain jumlah pegawai secara keseluruhan yang bertugas pada Sub Direktorat Badan Hukum yang memproses permohonan tersebut jumlahnya terbatas, hanya 45 (empatpuluh lima) orang pegawai dimana mereka memproses seluruh permohonan tersebut secara manual.

Dari cara kerja dengan sistem manual ini, terlihat bahwa proses penyelesaian permohonan berbentuk krucut atau *bottle neck*, hal tersebut karena penandatanganan Surat Keputusan sebagai hasil akhir dari proses penyelesaian ditangani oleh satu orang pejabat yang berwenang untuk menandatangani atas nama Menteri Kehakiman yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (dahulu Direktur Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan), artinya seorang pejabat yang berwenang harus menandatangani ratusan berkas per hari rangkap empat yang merupakan hasil kerja dari satu orang Kasubdit dan empat Kepala Seksi, ditambah lagi harus menandatangani berkas lain yang berada di bawah kewenangannya yang tidak menyangkut masalah perseroan terbatas.

Beberapa permasalahan seperti permohonan yang banyak tetapi tidak sebanding dengan jumlah pegawai, alur kerja yang panjang dan birokratis, penandatanganan ratusan Surat Keputusan per hari (rangkap empat) oleh satu orang pejabat yang berwenang, tidak saja menyebabkan jangka waktu

penyelesaian proses menjadi lebih panjang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga sulit diprediksi, tetapi juga menyebabkan bertumpuknya tunggakan pekerjaan yang belum tertangani.

Perkerjaan menjadi bertumpuk apabila ternyata terdapat kesalahan pada berkas baik kesalahan dari segi persyaratan administrasi maupun dari segi materi akta sehingga harus dikeluarkan surat dinas kepada Notaris untuk memperbaikinya dimana akhirnya nanti surat tersebut harus dibalas oleh Notaris dan diajukan kembali ke Departemen Kehakiman untuk dapat dilanjutkan prosesnya.

Keadaan tersebut dapat digambarkan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 1 Jumlah Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dengan Sistem Manual.

TAHUN	J U M L A H		
	PERMOHONAN	SISA PERMOHONAN TAHUN SEBELUMNYA	TOTAL
1999	33.381	2.244 (sisa tahun 1998)	35.625
2000	41.062	5.109 (sisa tahun 1999)	46.171
2001	12.228	17.977 (sisa tahun 2000)	30.205

Sumber : Data Dokumentasi Dep. Kehakiman Dan HAM RI.

Dari jumlah permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT tersebut di atas, maka dengan cara kerja sistem manual tersebut hasil yang dapat diproses adalah dapat tergambar dari tabel berikut di bawah ini.

TABEL 2 Jumlah Permohonan dan Hasil Proses Sistem Manual

TAHUN	JUMLAH			HASIL		SISA PEKERJAAN
	PERMOHONAN	SISA PERMOHONAN TAHUN SEBELUMNYA	TOTAL	S K	SURAT	
1999	33.381	2.244 (sisa tahun 1998)	35.625	21.064	9.452	5.109
2000	41.062	5.109 (sisa tahun 1999)	46.171	18.639	9.555	17.977
2001	12.228	17.977 (sisa tahun 2000)	30.205	14.273	2.423	13.509

Sumber : Data Dokumentasi Dep. Kehakiman Dan HAM RI.

Apabila kita melihat jumlah permohonan dan kemudian hasil prosesnya sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut di atas, maka jelas terlihat banyak sekali sisa pekerjaan yang harus dikerjakan. Kondisi seperti itu menyebabkan proses penyelesaian permohonan menjadi sulit untuk diprediksi dari yang semestinya.

Sebenarnya pada mulanya semua proses dihitung dan direncanakan secepat dan setepat mungkin dan diusahakan sesuai dengan jangka waktu yang

ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, akan tetapi ternyata dengan adanya kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas maka jangka waktu yang telah ditentukan tersebut menjadi sulit untuk diprediksi lagi.

Tabel di bawah ini secara garis besarnya dapat memberi gambaran tentang hal-hal tersebut di atas.


TABEL 3 Uraian Pekerjaan dan Jumlah Hari yang Diperlukan.

PETUGAS	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARI YANG DIPERLUKAN		CATATAN
		SEHARUSNYA	KENYATAAN	
LOKET PENERIMAAN	Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan permohonan yang masuk.	1 hari	1 hari *	* Jumlah berkas yang dapat diterima terbatas.
TATA USAHA DIT. PERDATA	Permohonan Agenda / Kendali masuk.	1 hari	1 hari *	* Jumlah yang diberi nomor terbatas.
KASIE DOKUMENTASI RADAN HUKUM	Penata Usahaan : - Pelaksanaan Agenda - Pembuatan / Penyusunan Kartu Kecil - Penggabungan Berkas (jika Berita Acara Rapat / Balasan) - Pengecekan Nama	1 hari	lebih dari 7 hari	* Jumlah yang dikerjakan sangat terbatas.
KASIE TEKNIS	Pendistribusian ke Staf / Korektor.	2 – 4 hari	4 hari *	* Jumlah sangat terbatas tergantung apakah bulan sebelumnya sudah selesai.

Sambungan Tabel 3

PETUGAS	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARI YANG DIPERLUKAN		CATATAN
		SEHARUSNYA	KENYATAAN	
STAF / KOREKTOR	Penelitian / Koreksi Berkas.	2 – 4 hari	lebih dari 4 hari	* Jumlah dari hasil yang diperiksa sangat terbatas dibandingkan dengan berkas yang harus diperiksa.
KASIE TEKNIS	Penelitian / Koreksi ulang hasil kerja Staf / Korektor.	1 – 4 hari	Lebih dari 4 hari *	* Jumlah yang dikerjakan sangat terbatas dibandingkan dengan berkas yang ada.
KASUBDIT BADAN HUKUM	Penelitian / Koreksi hasil kerja Kasie Teknis.	1 – 4 hari	Lebih dari 4 hari *	* Jumlah yang dikerjakan sangat terbatas dibandingkan dengan berkas yang ada.
DIREKTUR PERDATA	Penelitian / Koreksi ulang	2 – 4 hari	lebih dari 4 hari *	* Jumlah yang dikerjakan sangat terbatas dibandingkan dengan berkas yang ada.
TATA USAHA DIT. JEN. KUMDANG (sekarang DIT. JEN. AHU)	Penomoran : - Pengesahan - Persetujuan	1 hari	1 hari *	* Jumlah yang diberi nomor sangat terbatas
KASIE DOK. BADAN HUKUM	Pencatatan Nomor : - Pengesahan - Persetujuan - Surat	2 – 4 hari	lebih dari 4 hari *	* Jumlah yang dicatat sangat terbatas.

Sambungan Tabel 3

PETUGAS	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARI YANG DIPERLUKAN		CATATAN
		SEHARUSNYA	KENYATAAN	
PENGETIKAN	Pengetikan : - Pengesahan - Persetujuan - Surat	1 – 5 hari	lebih dari 5 hari	* Jumlah yang dikerjakan sangat terbatas dan tergantung dari jumlah ketikan bulan sebelumnya apakah habis / belum.
DIREKTUR * PERDATA	Paraf : - Pengesahan - Persetujuan	1 – 2 hari	Lebih dari 2 hari *	* Jumlah yang dapat dikerjakan sangat terbatas dibandingkan dengan berkas yang ada.
DIR.JEN. KUMDANG sekarang DIR.JEN. AHU	Penanda tangan : - Pengesahan - Persetujuan	1 – 4 hari	Lebih dari 4 hari *	* Jumlah yang dapat dikerjakan sangat terbatas dibandingkan dengan berkas yang ada.
				
TATA USAHA DIREKTORAT PERDATA	Penyerahan : - SK Pengesahan - SK Persetujuan	1 hari	1 hari *	* Jumlah yang diserahkan terbatas.
	TOTAL PEMROSESAN	20 – 45 hari kerja	Sulit untuk diprediksi	

Sumber : Diolah dari data Dokumentasi Dep. Kehakiman Dan HAM RI.

Menyadari masalah tunggakan tersebut sangat merugikan baik bagi investor asing maupun pemerintah Indonesia dimata internasional maka dilakukan upaya untuk mengatasi banyaknya tunggakan pekerjaan dimana salah satu upayanya adalah mengadakan *crash program*. Akan tetapi ternyata hasil dari crash program tersebut selain memerlukan biaya tinggi juga tetap belum mampu mengatasi sebagian besar tunggakan pekerjaan mengingat bahwa prosedur proses permohonan pengesahan maupun persetujuan perubahan anggaran dasar PT tetap panjang dan bersifat birokratis sehingga seandainya ada tunggakan pekerjaan yang ditangani secara crash program telah dapat dilaksanakan maka sudah menunggu tunggakan pekerjaan baru.

Upaya lain untuk mempermudah pemeriksaan materi akta agar proses permohonan dapat diselesaikan secara cepat adalah dengan membuat “standar akta”. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, khususnya Pasal 7 ayat (1) bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia demikian juga apabila ada perubahan anggaran dasar maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Salah satu kendala yang menyebabkan pemeriksaan materi akta oleh pemeriksa atau korektor menjadi lama adalah bahwa akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris mempunyai model akta yang

beraneka ragam yang antara satu Notaris dengan Notaris lain satu sama lain hampir berbeda, artinya tidak ada keseragaman dalam pembuatan akta. Oleh karena itu untuk mempermudah pemeriksaan maka Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (I N I) kemudian membuat standar akta. Namun ternyata upaya ini belum juga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk dapat mempercepat proses pemeriksaan oleh korektor.

Kemudian cara lain yang diupayakan dalam rangka mengatasi permasalahan proses pengesahan akta pendirian maupun proses persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah selain membuat akta yang memang harus dilakukan Notaris maka Notaris juga harus membuat “data akta”. Data akta yang dimaksud merupakan inti sari atau rangkuman dari isi akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar. Korektor hanya ditugaskan untuk memeriksa data akta saja tanpa perlu memeriksa aktanya secara keseluruhan.

Akan tetapi ternyata ada permasalahan baru yaitu manakala oleh korektor ditemukan bahwa apa yang ada di dalam data akta, yang sebenarnya merupakan rangkuman dari isi akta, berbeda dengan aktanya untuk pasal-pasal anggaran dasar tertentu.

Apabila ditemukan hal tersebut maka para korektor tidak dapat mengabaikan begitu saja perbedaan tersebut, sehingga yang terjadi adalah adanya pemeriksaan dua kali yang justru memakan waktu karena data akta dan juga akta

diperiksa oleh korektor untuk memastikan tidak ada perbedaan satu dengan lainnya.

Dari jumlah permohonan secara keseluruhan sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 1, maka dari begitu banyak permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, sebagian adalah permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau disebut PT. PMA.

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah permohonan PT. PMA tersebut dari tahun 1999 sampai tahun 2001, yaitu sebagai berikut :

TABEL 4 Jumlah Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PMA Melalui Sistem Manual

TAHUN	J U M L A H		
	PERMOHONAN	SISA PERMOHONAN TAHUN SEBELUMNYA	TOTAL
1999	5.007	336 (sisa tahun 1998)	5.343
2000	4.927	613 (sisa tahun 1999)	5.540
2001	1.100	1.617 (sisa tahun 2000)	2.717

Sumber : Diolah dari data Dokumentasi Dep. Kehakiman Dan HAM RI.

Menyadari bahwa terdapat banyak keluhan dari para investor asing atas lambatnya proses permohonan serta menyadari betapa pentingnya peranan penanaman modal asing di Indonesia yang berpotensi untuk dapat dijadikan salah satu faktor peningkatan percepatan pembangunan ekonomi maka kemudian dikeluarkan beberapa kebijaksanaan oleh Departemen Kehakiman.

Kebijaksanaan yang dimaksud adalah adanya kebijaksanaan yang menetapkan bahwa untuk PT dalam rangka PMA, pengerjaan proses permohonan pengesahan akta pendirian maupun proses persetujuan perubahan anggaran dasar dapat didahulukan dari pengerjaan proses permohonan PT biasa yang bukan dalam rangka PMA. Itu artinya prinsip permohonan yang lebih dahulu yang dikerjakan berdasarkan urutan permohonan, maka khusus untuk PT. PMA prinsip tersebut dapat dikesampingkan dan dapat dikerjakan secara tersendiri.

Akan tetapi meskipun telah ada prioritas pengerjaan terlebih dahulu untuk permohonan PT. PMA tetapi hal ini juga belum dapat memberikan hasil maksimal untuk dapat mempercepat proses penyelesaian permohonan, karena prosedur birokrasinya masih tetap panjang dan berbelit.

Hal lain yang menambah permasalahan sebagaimana disebut sebelumnya adalah bahwa permohonan untuk pengesahan akta pendirian maupun persetujuan perubahan anggaran dasar PT termasuk PT. PMA datang dan berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yang muaranya ke satu instansi yaitu Departemen Kehakiman.

Dari permohonan yang begitu banyak dan berasal dari seluruh wilayah kerja Notaris di Indonesia, penanganannya dilaksanakan oleh sejumlah pegawai yang belum memadai secara kuantitatif dan belum profesional, dan pemeriksaan untuk permohonan PT. PMA yang harus lebih teliti dari PT biasa karena harus diperiksa juga surat persetujuan PMA dari BKPM dimana surat tersebut sebagai salah satu syarat untuk proses pengesahan atau persetujuan perubahan anggaran dasar PT. PMA.

Dari banyaknya jumlah permohonan PT. PMA yang masuk ke Departemen Kehakiman baik yang dikirim secara langsung maupun yang dikirim melalui jasa pos untuk diproses lebih lanjut, berikut tabel di bawah ini akan memberikan gambaran mengenai jumlah permohonan yang masuk dan hasil proses permohonan PT. PMA tersebut.

TABEL 5 Jumlah Permohonan dan Hasil Proses PT. PMA Dengan Sistem Manual

TAHUN	JUMLAH			HASIL		SISA PEKERJAAN
	PERMOHONAN	SISA PERMOHONAN TAHUN SEBELUMNYA	TOTAL	S K	SURAT	
1999	5.007	336 (sisa tahun 1998)	5.343	3.159	1.478	706
2000	4.927	613 (sisa tahun 1999)	5.540	2.236	1.1147	2.157
2001	1.100	1.617 (sisa tahun 2000)	2.717	1.284	218	1.215

Sumber : Diolah dari data Dokumentasi Dep. Kehakiman Dan HAM RI.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka untuk PT. PMA, petugas pemeriksa (korektor) dalam menjalankan tugasnya harus meneliti materi akta dan juga sekaligus meneliti surat persetujuan BKPM yang merupakan syarat utama untuk dapat diprosesnya permohonan pengesahan akta PT yang didirikan dalam rangka PMA dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dari PT dalam rangka PMA.

Permasalahan kemudian semakin bertambah apabila ternyata anggaran dasar perseroan yang tertuang dalam akta pendirian maupun perubahan anggaran dasar perseroan yang tertuang dalam akta perubahan materinya bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat persetujuan PMA dari BKPM maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan lain yang terkait.

Munculnya permasalahan tersebut ternyata disebabkan oleh kenyataan bahwa kemampuan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PMA atau dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara satu Notaris dengan Notaris lainnya berbeda satu sama lain serta kenyataan bahwa kemampuan Notaris di kota besar dan Notaris di wilayah kota kecil juga tidak sama dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak daripada tidak meratanya kemampuan Notaris tersebut menyebabkan banyak permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT termasuk PT dalam rangka

PMA tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam prosesnya banyak akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar yang dikirim kembali dengan surat dinas dari Departemen Kehakiman ke Notaris yang bersangkutan untuk diperbaiki atau untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal adanya penolakan terhadap permohonan pengesahan akta pendirian PT dari Departemen Kehakiman, maka Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu 60 (enam puluh) hari.

Demikian pula untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, apabila permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas ditolak oleh Departemen Kehakiman karena hal-hal tersebut di atas, maka Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan dan *penolakan* atas perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu 60 (enam puluh) hari.

Surat penolakan dari Departemen Kehakiman kepada pemohon yaitu Notaris atau kuasanya yang diketahui oleh Notaris atau oleh Direktur / kuasanya, yang seharusnya disampaikan atau diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

tersebut menjadi sulit untuk dapat dipenuhi, berhubung keadaan birokrasi yang mempunyai alur kerja panjang dan tidak efisien sebagaimana telah disebut di atas sebelumnya.

Di dalam sistem manual ini, baik korektor maupun Kepala Seksi serta Kasubdit dan Direktur dalam melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap materi akta apakah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dengan cara pemeriksaan pasal demi pasal dari anggaran dasar perseroan tersebut.

Pemeriksaan pasal-pasal ini membutuhkan ketelitian dan konsentrasi penuh serta memerlukan jangka waktu yang lama. Khusus untuk pemohon PT dalam rangka PMA, pada beberapa pasal harus diteliti secara seksama baik materi akta apakah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga surat persetujuan PMA dari BKPM apakah selaras dengan anggaran dasar perseroan dan apakah surat persetujuan BKPM tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk PT yang sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dan kemudian merubah anggaran dasar perseroan dengan mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ke Departemen Kehakiman, maka yang harus dilakukan oleh Seksi Dokumentasi adalah berkas permohonan tersebut harus dilengkapi dengan berkas lama dari PT tersebut yang tersimpan di Departemen Kehakiman.

Proses melengkapi dengan cara menyatukan berkas lama dan berkas baru dari PT yang mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut juga dilakukan secara manual dan memerlukan waktu, dimana pada saat diajukan ke meja korektor untuk diperiksa harus sudah tergabung satu dengan lainnya.

Pemeriksaan berkas lama yang tergabung dengan berkas baru dari permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT harus dilakukan terutama untuk melihat apakah korum rapat atas perubahan anggaran dasar PT tersebut telah sesuai dengan korum rapat terakhir yang disahkan atau yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman.

Permasalahan lain dalam proses penggabungan berkas adalah apabila surat dinas yang berisi penolakan dari Departemen Kehakiman atas permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT diterima Notaris dan kemudian dibalas oleh Notaris yang bersangkutan, maka berkas balasan surat tersebut harus disatukan dengan berkas permohonannya yang terdahulu untuk diperiksa ulang oleh korektor.

Menyadari bahwa pemeriksaan seluruh pasal dari akta memerlukan waktu yang relatif lama maka kemudian ada kebijaksanaan dari pimpinan yaitu dalam hal ini Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dimana ditetapkan bahwa agar supaya tidak tersita waktu dalam memeriksa pasal-pasal secara keseluruhan maka diinstruksikan kepada seluruh korektor, Kepala Seksi dan Kepala Subdit

Badan Hukum untuk hanya memeriksa pasal-pasal tertentu saja yang dianggap penting.

Pasal-pasal yang dianggap penting dan harus diperiksa disesuaikan dengan beberapa ketentuan dari Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai anggaran dasar dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai perubahan anggaran dasar PT, adalah misalnya Pasal 1 anggaran dasar perseroan yaitu yang mengatur mengenai nama dan domisili perseroan. Pasal 1 mengenai nama ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Kemudian Pasal 2 anggaran dasar perseroan yang mengatur mengenai jangka waktu berdirinya atau lamanya perseroan, apakah terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak dibatasi. Khusus untuk PT. PMA mengenai jangka waktu ini mempunyai klausula tersendiri terkait dengan ketentuan mengenai jangka waktu fasilitas PMA yang ditentukan dalam surat persetujuan BKPM.

Pasal 3 anggaran dasar perseroan mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sangat penting untuk diperiksa, karena terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya, selain itu juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Juga harus diteliti apakah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang usaha.

Untuk PT. PMA, mengenai bidang usaha ini yang dalam anggaran dasar diatur dalam Pasal 3, harus diperiksa dan diteliti apakah selaras dengan bidang usaha yang telah mendapat persetujuan sebagaimana tercantum surat persetujuan BKPM yang mengatur mengenai kegiatan usaha perseroan, dan juga harus diteliti apakah bidang usaha yang telah ditentukan dalam surat persetujuan BKPM tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 4 anggaran dasar perseroan mengatur mengenai modal perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Berkaitan dengan permodalan ini maka ketentuan-ketentuan modal perseroan harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

Mengenai modal, Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah). Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan juga bahwa undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Besarnya masing-masing modal yaitu modal ditempatkan dan modal

disetor persentasenya telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus telah ditempatkan. Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) dari undang-undang PT menentukan bahwa setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah disetor paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Selanjutnya Pasal 26 ayat (3) menentukan bahwa seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Untuk PT yang akta pendiriannya yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum maka sejak tanggal pengesahan tidak dimungkinkan penyetoran atas saham secara mengangsur, karena kemungkinan mengangsur saham hanya dilakukan sebelum pengesahan diberikan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 26 ayat (4) undang-undang PT dimana ditentukan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut tiap kali harus disetor penuh.

Khusus untuk permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka PMA, ketentuan mengenai modal perseroan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 harus secara cermat diteliti. Pertama bahwa korektor harus melihat apakah ketentuan mengenai modal di dalam anggaran dasar perseroan yang diatur dalam Pasal 4

anggaran dasar bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kemudian korektor harus meneliti pula apakah surat persetujuan BKPM yang mencantumkan permodalan dari perseroan bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Dari uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa pemanfaatan teknologi tinggi hampir dapat dikatakan tidak ada dalam menyelesaikan proses permohonan untuk PT dalam rangka PMA. Menyadari bahwa pentingnya memanfaatkan teknologi canggih dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang baik yang dilandaskan kepada profesionalisme dan transparansi serta adanya tuntutan nyata dari masyarakat dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini maka kemudian Departemen Kehakiman Dan HAM RI membuat suatu sistem dengan penerapan teknologi canggih yang dinamakan SISMINBAKUM.

SISMINBAKUM singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

SISMINBAKUM adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memproses permohonan pengesahan

akta pendirian dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara on line yang dapat diakses oleh seluruh Notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>.

Perbedaan utama dari sistem manual adalah bahwa dalam SISMINBAKUM permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diajukan oleh Notaris sebagai pemohon secara elektronik dengan menggunakan perangkat komputer melalui pemanfaatan jaringan internet.

Adapun pengertian dari komputer itu sendiri adalah mesin elektronik yang mampu menerima dan memproses data, serta menghasilkan produk secara berulang-ulang serta operasi matematika yang sangat kompleks dengan kecepatan tinggi.²

Pada dasarnya antara sistem manual dan sistem dengan cara SISMINBAKUM secara umum tahapan proses pengolahan data dan prosedurnya adalah sama. Jadi sesungguhnya tahapan pengolahan data antara yang manual dan yang elektronik adalah sama, tetapi yang akan berbeda adalah kecepatan prosesnya.³

Internet merupakan jaringan internasional (INTERnational NETwork) yang menghubungkan secara bersama-sama ribuan bahkan jutaan komputer

² Ibid, hal.7.

³ Ibid, hal.16.

dengan menggunakan hubungan kabel yang memungkinkan data dapat ditransfer diantara masing-masing komputer dengan menggunakan Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP).⁴

Dengan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.HT.01.01.TH.2000 dikeluarkan keputusan tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM RI.

Persyaratan utama mengenai cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian serta persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui SISMINBAKUM tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Secara khusus tata cara pengajuan permohonan melalui SISMINBAKUM, diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia (Kep.Men.Keh. dan HAM RI) Nomor : M-01.HT. 01.01.TH.2001 Tanggal 31 Januari 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Di dalam Pasal 1 Kep.Men. Keh. Dan HAM RI Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tersebut ditentukan bahwa akta pendirian perseroan terbatas adalah

⁴ S.M.H. Collin, *Dictionary of Personal Computing and the Internet*, edisi kedua, Peter Collin Publishing, Middlesex, 1998, hal.104.

akta yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perseroan terbatas beserta anggaran dasarnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan HAM RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kep.Men. Keh. Dan HAM RI tersebut adalah akta perubahan anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi perubahan ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal perseroan dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas maka Pasal 2 ayat (1) Kep.Men. Keh. Dan HAM RI Nomor : M-01.HT.01.01.TH.2001 menentukan bahwa akta pendirian perseroan terbatas atau akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus mendapat pengesahan atau mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan HAM RI.

Pasal 2 ayat (2) Kep.Men. Keh. Dan HAM RI tersebut menentukan bahwa untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan kepada

Menteri Kehakiman Dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman Dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bagaimana cara mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT melalui SISMINBAKUM, ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Kep.Men. Keh. Dan HAM RI dimana permohonan tersebut adalah diajukan secara elektronik dengan mengisi FIAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II dari keputusan ini.

FIAN yang dimaksud tersebut adalah singkatan dari Format Isian Akta Notaris yang formatnya sudah ditentukan oleh Departemen Kehakiman Dan HAM RI, dan FIAN ini tampil di layar monitor di kantor Notaris yang bersangkutan.

Apabila permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dianggap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pasal 5 ayat (1) Kep.Men. Keh. Dan HAM RI tersebut menentukan bahwa dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta

perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut secara elektronik.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Notaris adalah bahwa dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan HAM RI atau pejabat yang ditunjuk, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas beserta *dokumen pendukung* yang meliputi :

- (1). salinan akta pendirian perseroan.
- (2). Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan.
- (3). bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam Tambahan Berita Negara RI dari kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- (4). bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (5). bukti setor modal dari Bank.

Untuk permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PT.

PMA, maka dalam SISMINBAKUM ini tetap diperlukan sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dilengkapi selain melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas, dimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) Kep.Men. Keh. Dan HAM RI tersebut.

Dengan SISMINBAKUM ini, jangka waktu penyelesaian proses permohonan ditentukan dengan waktu yang singkat sekali, dimana Pasal 6 ayat (1) Kep.Men. Keh. Dan HAM RI tersebut menentukan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) dari Kep.Men. Keh. Dan HAM RI telah dipenuhi, Menteri Kehakiman Dan HAM RI paling singkat dalam waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang ditandatangani secara elektronik.

Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) tidak dipenuhi, Menteri Kehakiman Dan HAM RI langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronik, dan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi batal dan dicabut kembali.

Dalam hal pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau Direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar

perseroan terbatas tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 keputusan ini.

Pemeriksaan terhadap pasal-pasal anggaran dasar perseroan yang tercantum dalam FIAN dengan tegas juga dibatasi, jadi tidak semua pasal yang terdapat dalam anggaran dasar PT diperiksa. Pasal 7 ayat (1) Kep.Men. Keh. Dan HAM RI dengan tegas menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap FIAN yang telah diisi Notaris, ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal perseroan terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman Dan HAM RI.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa Menteri Kehakiman Dan HAM RI tidak berwenang dan bertanggung jawab terhadap ketentuan lain selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan karenanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Dalam SISMINBAKUM seluruh proses permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan secara on line melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap Notaris dari seluruh wilayah Indonesia.

Notaris dapat melakukan monitoring langsung melalui jaringan internet 24 (duapuluh empat) jam sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan yang ada di Departemen Kehakiman Dan HAM RI. Jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Departemen

Kehakiman Dan HAM RI dengan Notaris dapat dilakukan melalui E-mail. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.

Cara kerja dan alur kerja SISMINBAKUM dalam menjalankan proses permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

- i. Setelah Notaris mendapat User ID dan Password, maka langkah pertama yang harus dilakukan Notaris adalah Pengecekan Nama Perseroan Terbatas. Pengecekan nama disini dimaksudkan untuk mengetahui apakah nama perseroan yang akan digunakan sudah atau belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bila nama tersebut belum terdaftar maka akan muncul item Pemesanan Nama yang merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Notaris.
- ii. Nama yang dipesan oleh Notaris tersebut kemudian akan dicek oleh pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana dalam hal ini merupakan wewenang Korektor, Kepala Seksi (Kasie) dan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit). Pengecekan tersebut dimaksudkan agar nama perseroan yang dipesan oleh Notaris tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- iii. Untuk mengecek apakah nama perseroan yang dipesan itu diterima atau tidak maka Notaris dapat melihatnya pada menu monitoring di komputer.

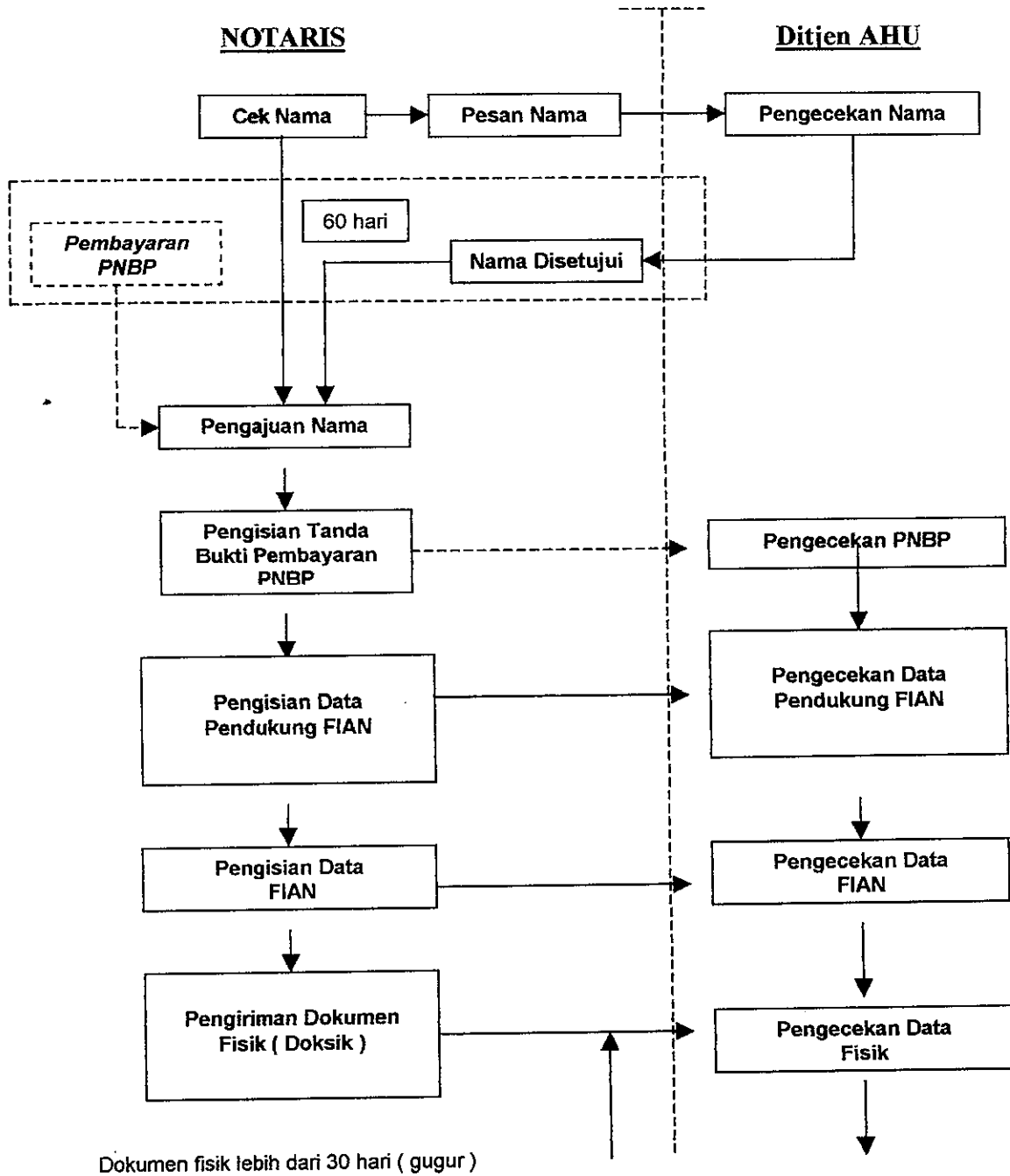
- Apabila nama yang dipesan tersebut mendapatkan persetujuan maka langkah berikut yang dilakukan Notaris adalah Pengajuan Nama dimana dalam menu ini Notaris mengisi tanggal setor PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Batas waktu sejak nama diterima hingga pengajuan nama adalah 60 (enampuluh) hari dimana batas waktu ini dimaksudkan memberikan kepada Notaris untuk melengkapi data pendukung perseroan yang bersangkutan.
- iv. Langkah selanjutnya yaitu proses Pengisian Pra-FIAN (Formulir Isian Akta Notaris). Pada menu Pra-FIAN ini Notaris akan mengisi data pendukung apa yang akan disertakan sebagai bukti fisik nantinya, antara lain seperti Bukti Setor Modal, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tanda Terima Pembayaran Uang Muka dari Berita Negara (TBN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neraca Akhir, Setoran Modal, dan untuk PT. PMA Surat Persetujuan BKPM. Setelah pengisian Pra-FIAN ini maka langkah berikutnya adalah Pengisian data FIAN.
- v. Pada menu FIAN ini data yang harus dilengkapi oleh Notaris adalah alamat perseroan, nomor dan tanggal akta pendirian, modal-saham, pendiri perseroan serta maksud-tujuan dan kegiatan usaha dari perseroan yang terkait. Setelah data terisi dengan lengkap dan benar maka Notaris harus mengirim data tersebut secara on line ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam hal ini yang berwenang memeriksa atas kebenaran

dan kelengkapan data tersebut adalah Korektor, Kasie, Kasubdit serta Direktur Perdata.

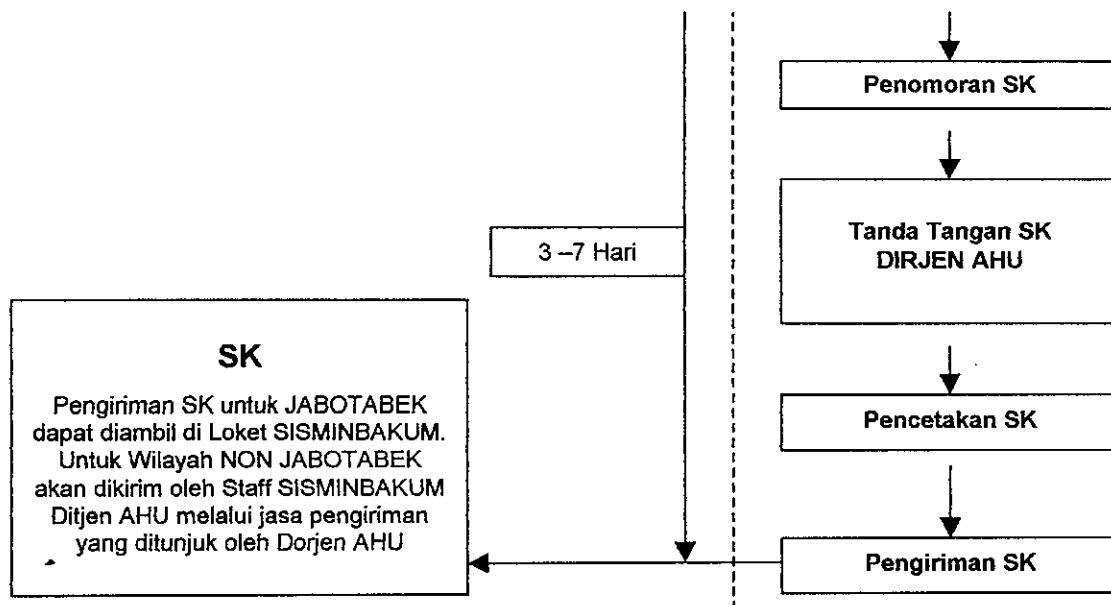
- vi. Notaris dapat mengecek perjalanan data ini melalui menu Monitoring. Bila ada koreksi dari data tersebut dapat terlihat pula dari menu Monitoring dan fasilitas E-mail untuk kemudian langsung dikoreksi dan dikirim lagi secara on line oleh Notaris. Bila data tersebut benar maka persetujuan akhir atas data tersebut yang dilakukan oleh Direktur Perdata akan tampak di menu Monitoring bahwa Notaris harus segera melaksanakan Penyerahan Dokumen Fisik. Penyerahan dokumen fisik ini diberikan batas waktu selama 30 (tigapuluh) hari. Penyerahan dokumen ini dapat dilakukan melalui Loker SISMINBAKUM atau melalui kotak pos.
- vii. Setelah dokumen fisik diserahkan oleh Notaris, maka dokumen fisik tersebut akan diteliti oleh Korektor Fisik, Kasie dan Kasubdit. Setelah klarifikasi dokumen fisik selesai selanjutnya dilakukan Penomoran Surat Keputusan oleh Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilanjutkan dengan Tanda Tangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara elektronis.
- viii. Akhir dari proses pengesahan akta Perseroan Terbatas ini adalah keluarnya format Surat Keputusan yang akan dikirimkan ke alamat Notaris yang bersangkutan melalui jasa kurir.

Untuk lebih jelasnya, cara kerja dan alur kerja SISMINBAKUM ini akan digambarkan di dalam skema berikut ini :

Skema Alur Proses SISMINBAKUM



Sambungan Skema Alur Proses SISMINBAKUM



Mekanisme kerja dengan SISMINBAKUM tersebut pada dasarnya mempunyai rangkaian atau alur kerja yang sama dengan sistem manual yaitu alur kerja yang panjang dan birokratis, hanya saja karena adanya pemanfaatan teknologi canggih yaitu peralatan komputer dan internet maka yang berbeda disini adalah kecepatan prosesnya.

Mengenai jangka waktu proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian, dimana di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari setelah permohonan diterima, maka mengenai jangka waktu ini dengan SISMINBAKUM sudah dapat diatasi, tentu saja dengan syarat bahwa

permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi sebenarnya permohonan yang tidak memenuhi persyaratan serta kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih saja ditemukan.

Dari sisi lain sebenarnya cara kerja SISMINBAKUM ini, sama dengan sistem manual dimana proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT tetap berbentuk kerucut atau *bottle neck*, karena penanda tangan Surat Keputusan sebagai hasil akhir dari proses penyelesaian ditangani oleh satu orang pejabat yang berwenang untuk menanda tangan Surat Keputusan atas nama Menteri Kehakiman dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam hal penandatanganan Surat Keputusan ini, perbedaannya dengan sistem manual adalah bahwa apabila dalam sistem manual Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum harus menandatangani secara langsung dengan tanda tangan basah pada ratusan berkas per hari rangkap empat yang berasal dari hasil kerja dari satu orang Kasubdit Badan Hukum dan empat Kepala Seksi, maka di dalam SISMINBAKUM tanda tangan seorang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak lagi tanda tangan basah yang harus ditandatangani akan tetapi diganti dengan *tanda tangan secara elektronik*.

Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01-HT.01.01 Tahun 2001 menegaskan bahwa permohonan

pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan secara elektronik. Dengan demikian Surat Keputusan yang ditandatangani secara elektronik tersebut dalam waktu singkat dapat menghasilkan ratusan tanda tangan.

Dasar hukum yang dipergunakan untuk menunjukkan bahwa tanda tangan Surat Keputusan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman secara elektronik adalah sah dan dapat dilakukan, yaitu dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Adapun dasar pemikiran tentang tanda tangan elektronik tersebut adalah bahwa dengan makin pesatnya tingkat perkembangan teknologi telah memungkinkan untuk melakukan berbagai transaksi, pembuatan, atau penerimaan dokumen dengan sarana elektronik. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dianggap tepat sebagai dasar hukum.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan pengertian “Dokumen Perusahaan” adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 ini dapat diketahui bahwa yang menjadi dokumen perusahaan tidak saja data, catatan atau keterangan yang dibuat dalam

rangka pelaksanaan kegiatannya, tetapi juga data, catatan atau keterangan yang diterima perusahaan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 2 bila dikaitkan dengan Pasal 4 serta penjelasannya dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, disebutkan bahwa “dokumen lainnya” antara lain adalah akta pendirian perusahaan. Sebagai suatu perusahaan yang berstatus badan hukum dianggap “Akta Pendirian Perusahaan” tersebut adalah akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

Berbeda dengan sistem manual yang dalam proses penyelesaian permohonan selalu ditemukan tunggakan maka di dalam SISMINBAKUM tunggakan pekerjaan hampir tidak ditemukan. Apabila ada kesalahan pada pengisian FIAN maka secara elektronik melalui jaringan internet akan dikirim kembali kepada Notaris untuk segera diperbaiki oleh Notaris yang bersangkutan agar proses selanjutnya dapat diteruskan. Notaris seharusnya segera mengirim kembali perbaikan sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga surat dinas sebagaimana yang ditemukan dalam sistem manual yang harus dibalas dengan surat juga secara manual oleh Notaris, tidak ada dalam SISMINBAKUM karena semua perbaikan diberitahukan melalui fasilitas e-mail.

Di dalam SISMINBAKUM tidak ada penggabungan berkas lama dengan berkas baru berkaitan dengan akta pendirian yang sedang dalam proses pengesahan tetapi ada kesalahan, karena akan segera dikirim lewat e-mail dan

dibalas oleh Notaris lewat e-mail juga atau langsung diperbaiki lewat monitor komputer Notaris untuk dikirim kembali ke Departemen Kehakiman secara on line.

Penggabungan berkas lama dengan berkas baru berkaitan dengan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, meskipun hal tersebut sangat penting dilakukan untuk melihat korum rapat apakah sudah sah atau sesuai dengan korum rapat yang terakhir yang disahkan Menteri Kehakiman, tetapi di dalam SISMINBAKUM penggabungan berkas sebagaimana tersebut di atas tidak lagi dilakukan karena korum rapat meskipun ternyata kemudian dalam pemeriksaan dokumen fisiknya tidak sesuai dengan korum rapat yang terakhir disahkan Departemen Kehakiman, dianggap menjadi tanggung jawab dari Notaris si pembuat akta.

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki SISMINBAKUM, yang didukung oleh adanya penggunaan perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet secara on line, maka sebenarnya kelebihan yang diperoleh adalah dalam hal cepatnya proses penyelesaian permohonan sehubungan dengan pemanfaatan teknologi tinggi melalui jaringan internet.

Untuk itu maka di bawah ini akan diperlihatkan tabel mengenai jumlah permohonan yang masuk baik permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT secara keseluruhan.

TABEL 6 Jumlah Permohonan Pengesahan Akte Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Melalui SISMINBAKUM Maret 2001 – Maret 2002.

Tahun	Bulan	Jumlah Permohonan
2001	Maret	9
	April	379
	Mei	1.041
	Juni	1.105
	Juli	1.647
	Agustus	2.938
	September	2.391
	Oktober	2.506
	Nopember	2.717
	Desember	1.518
Total		16.301
2002	Januari	1.695
	Pebruari	1.668
	Maret	1.731
Total		5.094

Sumber : Diolah dari data Dokumentasi Dep. Kehakiman Dan HAM RI.

Dari jumlah permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT melalui SISMINBAKUM sebagaimana tersebut di atas, maka dengan cara kerja SISMINBAKUM hasil yang dapat

diproses adalah tergambar dari tabel berikut ini :

**TABEL 7 Jumlah Permohonan Dan Hasil Proses Melalui SISMINBAKUM
Maret 2001 – Maret 2002.**

TAHUN	JUMLAH			HASIL		CATATAN
	PERMOHONAN	SISA PERMOHONAN TAHUN SEBELUMNYA	TOTAL	S K	SURAT (E-Mail)	
2001	16.301	Tidak ada *	16.301	16.301	5.075 **	* SISMINBAKUM di- mulai bulan Maret 2001. ** Surat (E-Mail) te- lah dibalas dan di- perbaiki Notaris se- hingga menjadi SK.
2002	5.094	Tidak ada *	5.094	5.094	1.273 **	* Surat (E-Mail) ta- hun 2001 telah menjadi SK ** Surat (E-Mail) te- lah dibalas dan di- perbaiki Notaris se- hingga menjadi SK.

Sumber : Diolah dari data Dokumentasi Dep. Kehakiman Dan HAM RI.

Dari tabel tersebut di atas maka kita dapat melihat bahwa hasil daripada proses terhadap permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT adalah berbeda dengan sistem manual, dimana perbedaan utama yang jelas terlihat adalah dapat dihindari adanya tunggakan pekerjaan, karena dari surat-surat yang dikirim lewat E-mail oleh Departemen Kehakiman Dan HAM RI kepada Notaris dalam rangka perbaikan

terhadap permohonan baik mengenai persyaratan administrasi maupun mengenai materi daripada anggaran dasar PT yang tertuang dalam akta, dapat dijawab oleh Notaris dalam waktu yang tidak lama lewat E-mail juga.

Dari surat-surat yang dikirim lewat E-mail oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris ada beberapa masalah sehingga Notaris perlu memperbaiki baik isian dalam FIAN maupun syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah-masalah tersebut selain berkenaan dengan permohonan-permohonan PT yang bukan dalam rangka PMA juga termasuk PT dalam rangka PMA, sebagaimana fokus penelitian dalam tesis ini.

Dari jumlah permohonan secara keseluruhan yang masuk lewat SISMINBAKUM sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6, maka sebagian adalah permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau PT. PMA.

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan jumlah permohonan pengesahan akta pendirian PT dalam rangka penanaman modal asing dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT dalam rangka penanaman modal asing dari tahun 2001 sampai dengan Maret 2002 melalui SISMINBAKUM, yaitu sebagai berikut :

TABEL 8 Jumlah Permohonan Pengesahan Akte Pendirian Dan Per-setujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PMA Melalui SISMINBAKUM Maret 2001 – Maret 2002.

Tahun	Bulan	Jumlah Permohonan
2001	Maret	2
	April	42
	Mei	104
	Juni	153
	Juli	209
	Agustus	258
	September	260
	Oktober	243
	Nopember	290
	Desember	131
Total		1.692
2002	Januari	197
	Pebruari	164
	Maret	191
Total		552

Sumber : Diolah dari data Dokumentasi Dep. Kehakiman Dan HAM RI.

Dengan pemanfaatan teknologi tinggi yaitu berupa penggunaan komputer dengan perangkat telepon yang berhubungan dengan internet sebagaimana keadaan yang diciptakan SISMINBAKUM maka pelayanan jasa hukum kepada

masyarakat dapat ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan masalah jangka waktu dan hasil yang dicapai dengan jangka waktu yang relatif singkat, dimana dari jumlah permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. PMA, dapat diselesaikan permohonan-permohonan tersebut sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini :

TABEL 9 Jumlah Permohonan PT. PMA Melalui SISMINBAKUM Dan Hasil Prosesnya Maret 2001 – Maret 2002.

TAHUN	J U M L A H			H A S I L		CATATAN
	PERMOHONAN	SISA PERMOHONAN TAHUN SEBELUMNYA	TOTAL	S K	SURAT (E-Mail)	
2001	1.692	Tidak ada *	1.692	1.692	507 **	* SISMINBAKUM dimulai bulan Maret 2001. ** Surat (E-Mail) telah dibalas dan diperbaiki Notaris sehingga menjadi SK.
2002	552	Tidak ada *	552	552	138 **	* Surat (E-Mail) tahun 2001 telah menjadi SK ** Surat (E-Mail) telah dibalas dan diperbaiki Notaris sehingga menjadi SK.

Sumber : Diolah dari data Dokumentasi Dep. Kehakiman Dan HAM RI.

Jika di dalam sistem manual ada kebijaksanaan prioritas untuk dikerjakan lebih dahulu bagi PT. PMA, karena menyadari betapa pentingnya peranan

penanaman modal asing di Indonesia yang mempunyai potensi untuk dapat dijadikan salah satu faktor peningkatan percepatan pembangunan ekonomi, maka dengan SISMINBAKUM kebijaksanaan prioritas tersebut tidak diperlukan lagi.

Namun demikian ada masalah penting yang menyebabkan tidak meratanya pemanfaatan SISMINBAKUM di Indonesia. Beberapa Notaris yang berada di wilayah terpencil di Indonesia tidak dapat memanfaatkan program SISMINBAKUM ini oleh karena jaringan telepon yang merupakan salah satu perangkat untuk mengakses ke SISMINBAKUM tidak menjangkau wilayah kerja Notaris tersebut.

SISMINBAKUM yang menerapkan on line sistem dengan teknologi tinggi melalui jaringan internet memerlukan biaya yang tidak murah. Memanfaatkan jaringan internet berarti Notaris harus menyediakan perangkat komputer yang memadai sehingga dapat dengan mudah untuk mengakses SISMINBAKUM.

Setelah Notaris mempunyai komputer, peralatan selanjutnya yang diperlukan adalah modem (modulator / demodulator), suatu alat yang memungkinkan komputer untuk mentransmisikan informasi melalui saluran telepon. Dengan demikian alat lain yang sangat diperlukan dan penting adalah jaringan telepon. Namun sayangnya tidak semua wilayah kerja Notaris di beberapa wilayah Indonesia mempunyai atau dapat terjangkau jaringan telepon.

Masalah lain yang amat penting adalah, apabila Notaris telah mempunyai

perangkat komputer untuk dapat akses ke SISMINBAKUM melalui jaringan internet, maka ada permasalahan lain yang muncul dikarenakan kualitas SDM Notaris di bidang teknologi komputer on line melalui jaringan internet tidak memadai, sementara kemampuan SDM menentukan sekali bagi kelancaran akses ke SISMINBAKUM.

Apabila kita melihat Tabel 9 yang menampilkan gambaran mengenai jumlah permohonan PT. PMA melalui SISMINBAKUM dan hasil prosesnya dari tahun 2001 sampai dengan Maret 2002, di kolom Surat (E-mail) tercantum jumlah surat e-mail yang dikirim Departem Kehakiman Dan HAM RI kepada Notaris.

Banyaknya surat lewat e-mail ini terjadi karena pada kenyataannya ternyata kemampuan antara satu Notaris dengan Notaris lain dan kemampuan Notaris di kota besar dan Notaris yang berasal dari kota kecil di wilayah Indonesia tidak sama satu dengan lain dalam hal memahami tata cara dan prosedur permohonan lewat SISMINBAKUM dan dalam hal memahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak Notaris di dalam mengisi FIAN mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun mengabaikan prosedur dan tata cara permohonan sehingga Departemen Kehakiman Dan HAM RI mengirim e-mail untuk diperbaiki. Notaris kemudian memperbaiki kesalahannya. Apabila kesalahan tersebut hanya mengenai tata cara dan prosedur permohonan dan telah

diperbaiki oleh Notaris maka hal tersebut tidak menimbulkan masalah.

Permasalahan muncul apabila kesalahan berkaitan dengan materi akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Notaris memperbaiki FIAN sehingga menjadi benar dalam tampilan di layar monitor tetapi tidak memperbaiki aktanya ataupun tidak membuat akta perbaikan. Hal ini dapat menyebabkan apa yang tercantum di dalam FIAN berbeda dengan apa yang ada dalam akta.

Perbedaan tersebut dapat dilihat oleh Korektor pada saat dokumen fisik diajukan oleh Notaris setelah FIAN disetujui karena tidak ada permasalahan lagi. Masalah tersebut menyebabkan proses lebih lanjut tidak dapat dilakukan dan untuk menyelesaikan hal tersebut maka Korektor akan menghubungi Notaris lewat e-mail memberitahukan bahwa proses tidak dapat lanjut karena apa yang tertuang dalam FIAN tidak sesuai dengan dokumen fisik yang dilampirkan.

Permasalahan lain di dalam SISMINBAKUM adalah bahwa apabila di dalam sistem manual untuk pemeriksaan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ataupun untuk memeriksa balasan dari Notaris terhadap surat dinas yang telah dikeluarkan, maka berkas lama dari PT yang dimohonkan harus disatukan dengan berkas yang baru, di dalam SISMINBAKUM memang lampiran berkas lama terutama untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT tidak dilakukan lagi.

Permasalahannya adalah, khusus untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, sebenarnya harus tetap diperiksa apakah korum rapat untuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang tertuang dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan tersebut sesuai dengan korum terakhir yang mendapat pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman atau tidak. Sering ditemukan bahwa korum rapat ternyata bukanlah didasarkan atas korum rapat yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman sebelumnya, sehingga sebenarnya rapat umum pemegang saham tidak sah, akan tetapi persetujuan atas perubahan anggaran dasar tersebut tetap dikeluarkan, karena menurut kebijaksanaan Dirjen. Administrasi Hukum Umum dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman tentang pasal-pasal tertentu saja yang diperiksa, maka korum rapat yang tidak sah dianggap menjadi tanggung jawab Notaris.

Dalam hal adanya penolakan terhadap permohonan pengesahan akta pendirian PT dari Departemen Kehakiman Dan HAM RI, Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu 60 (enampuluh) hari. Dengan SISMINBAKUM maka jangka waktu 60 (enampuluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dapat dipersingkat yaitu kurang dari 60 (enampuluh) hari dengan pemberitahuan lewat e-mail. Hal

ini sulit dicapai oleh permohonan-permohonan yang diajukan secara manual.

Di dalam SISMINBAKUM, sebagaimana juga dalam sistem manual, pemeriksaan terhadap pasal-pasal anggaran dasar perseroan yang dilakukan oleh Korektor maupun oleh Kepala Seksi serta oleh Kasubdit dibatasi hanya untuk beberapa pasal anggaran dasar perseroan saja.

Hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 7 ayat (1) Kep.Men. Keh. RI Nomor : M-01.HT.01.01.TH.2001 tanggal 31 Januari 2001 dimana dinyatakan bahwa pemeriksaan terhadap FIAN yang telah diisi oleh Notaris, ketentuan mengenai nama serta tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas (Pasal 1 anggaran dasar perseroan), jangka waktu (Pasal 2 anggaran dasar perseroan), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (Pasal 3 anggaran dasar perseroan), dan modal perseroan terbatas (Pasal 4 anggaran dasar perseroan) menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman Dan HAM RI.

Untuk pengisian Pasal 3 anggaran dasar perseroan yaitu mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, sudah diprogram suatu daftar lapangan usaha, sehingga format tersebut sudah baku. Khusus untuk PT. PMA maka Notaris dapat mengisi Pasal 3 anggaran dasar perseroan tanpa harus mengikuti daftar lapangan usaha tersebut tetapi disesuaikan dengan surat persetujuan BKPM.

Daftar lapangan usaha yang dimaksud dinamakan KLU (Kelompok Lapangan Usaha). KLU merupakan daftar lapangan usaha di Indonesia yang saat

ini menjadi acuan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. KLU dibuat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM RI, dimana KLU ini dipergunakan untuk mencari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sesuai dengan ruang lingkup usaha perseroan terbatas. Selain KLU, Notaris juga dapat melihat KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha di Indonesia) menurut Direktortat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian Dan Perdagangan RI.

Untuk PT yang didirikan dalam rangka PMA maupun PT yang merubah anggaran dasarnya dari PT non PMA menjadi PT. PMA, sebagaimana juga di dalam sistem manual ternyata dalam SISMINBAKUM masih tetap banyak ditemukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan pasal-pasal anggaran dasar perseroan terutama dari Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar perseroan.

Pasal 1 anggaran dasar perseroan mengatur mengenai nama dan domisili perseroan. Pasal 1 mengenai nama ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Banyak ditemukan baik di sistem manual maupun di SISMINBAKUM Pasal 1 anggaran dasar perseroan bertentangan dengan peraturan pemerintah tersebut.

Kemudian Pasal 3 anggaran dasar perseroan mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Pasal 3 ini sangat penting untuk

diperiksa, karena terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya selain juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, dan harus diteliti apakah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang usaha.

Mengenai bidang usaha ini yang dalam anggaran dasar diatur dalam Pasal 3, harus diperiksa dan diteliti apakah selaras dengan bidang usaha yang telah mendapat persetujuan sebagaimana tercantum surat persetujuan BKPM yang mengatur mengenai kegiatan usaha perseroan, dan juga harus diteliti apakah bidang usaha yang telah ditentukan dalam surat persetujuan BKPM tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Permodalan diatur di dalam Pasal 4 anggaran dasar perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Berkaitan dengan permodalan ini maka ketentuan-ketentuan modal perseroan harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Banyak ditemukan ketentuan mengenai permodalan ini yang tercantum di dalam anggaran dasar tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat persetujuan BKPM atau baik anggaran dasar maupun surat persetujuan BKPM mengenai permodalan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

Permasalahan-permasalahan permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dalam

rangka PMA sebagaimana tersebut di atas yang menyangkut Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar perseroan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangana yang berlaku akan dibahas secara khusus pada Bagian 2 (dua) dari hasil penelitian.

Pada mulanya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini semua permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus diajukan secara elektronik.

Kemudian Pasal 8 ayat (3) menegaskan lagi bahwa Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan yang diajukan secara manual. Ini berarti sejak diberlakukannya Kep.Men. Keh. RI ini secara efektif sebagaimana disebut dalam Pasal 10, yaitu tanggal 1 Maret 2001, tidak lagi menerima permohonan yang diajukan secara manual.

Tetapi melihat perkembangan di masyarakat ternyata diperlukan tenggang waktu yang cukup untuk bisa secara tunggal menerapkan SISMINBAKUM, karena penerapan SISMINBAKUM on line dengan Notaris melalui jaringan

internet belum dapat diakses oleh setiap Notaris di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberlakukan kembali penerimaan permohonan melalui sistem manual.

Dasar dari diberlakukannya kembali sistem manual disamping SISMINBAKUM adalah untuk memperluas pelayanan jasa hukum di bidang penyelesaian badan hukum kepada masyarakat, sehingga Pasal 1 Kep.Men. Keh. RI tersebut di atas menyatakan bahwa penyelesaian badan hukum meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilaksanakan melalui SISMINBAKUM dan Sistem Manual.

2. Sinkronisasi Penerapan Peraturan Perundang-undangan Dalam Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA.

Salah satu syarat utama yang harus ada dan harus terlampir dalam permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan serta harus tercantum dalam bagian premise akta

pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar perseroan adalah Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Badan Penanaman Modal (BKPM).

Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PMA, khususnya antara BKPM sebagai instansi koordinasi PMA dengan Departemen Kehakiman Dan HAM RI sebagai instansi yang mengesahkan akta pendirian dan menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan.

Ketidaksinkronan penerapan peraturan antara satu instansi dengan instansi lainnya yang terkait menimbulkan problematika atau permasalahan dalam proses pengesahan akta pendirian maupun proses persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.

BKPM mengeluarkan Persetujuan Penanaman Modal Asing dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Koordinasi Penanaman Modal mengatur Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing, yang telah berkali-kali dirubah terakhir dengan Keputusan Nomor : 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999.

Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing diberikan bagi permohonan untuk melakukan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) bagi penanam modal yang akan mendirikan atau berkehendak membentuk Perseroan Terbatas, yang dapat diajukan oleh warganegara asing dan / atau badan hukum asing dan / atau perusahaan PMA. Atau dapat juga diajukan oleh warganegara asing dan / atau badan hukum asing dan / atau perusahaan PMA bersama dengan warganegara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia.

Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip atau Ijin Usaha Sementara ⁵

Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah suatu lembaga Pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi utama BKPM dalam kaitannya dengan Presiden adalah membantu Presiden dalam menentukan kebijaksanaan di bidang penanaman modal serta penanaman pelaksanaan.

Tata cara permohonan Penanaman Modal Asing diatur dalam Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM Nomor : 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober

⁵ I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal – Pedoman Prosedur Mendirikan Dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal.32.

1999 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN Dan PMA.

Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM Nomor : 38 tersebut maka peraturan tentang tata cara permohonan PMA sebelumnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM Nomor : 30/SK/1998 tanggal 20 Oktober 1998 dinyatakan dicabut.

Dalam Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM Nomor : 38 tersebut ditentukan bahwa calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA, wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada Meninves / Kepala BKPM atau Kepala Perwakilan RI setempat atau Ketua BKPM Daerah.

Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian perijinan pelaksanaan modal, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di daerah Kabupaten dan daerah kota. Dan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut lebih lanjut, Menteri Luar Negeri menugaskan Kepala Perwakilan RI, sedangkan untuk pemberian perijinan pelaksanaan penanaman modal, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Penanaman Modal Asing mempelajari dahulu Daftar Bidang Usaha yang tertutup

bagi Penanaman Modal Asing dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM / BKPMMD atau Perwakilan RI.

Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD, atau Kepala Perwakilan RI dengan mempergunakan Tata Cara Permohonan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM.

Apabila permohonan mendapat persetujuan, Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD, atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal tersebut kepada calon penanam modal, yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip.

Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD, atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal tersebut kepada calon penanam modal, yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip.

Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD atau Kepala Perwakilan RI menyampaikan rekaman Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing kepada instansi pemerintah

terkait.

Dalam hal permohonan penanaman modal baru maka yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA adalah warganegara asing dan atau badan hukum asing dan atau perusahaan PMA, atau warganegara asing dan atau badan hukum asing dan atau perusahaan PMA bersama dengan warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.

Permohonan ditujukan kepada Meninves / Kepala BKPM atau Kepala Perwakilan RI setempat atau Ketua BKPMD setempat atau Meninvest / Kepala BKPM dalam hal permohonan penanaman modal baru yang berlokasi di dua propinsi atau lebih.

Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal, Meninvest / Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD setempat, mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). Persetujuan untuk permohonan sebagaimana disebutkan di atas diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu syarat penting yang harus ada dan merupakan bahan pertimbangan bagi dikeluarkannya Surat Keputusan atas pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran

dasar perseroan terbatas adalah surat persetujuan mengenai penanaman modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Permasalahan timbul apabila penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dalam rangka PMA khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 antara satu instansi dengan instansi lain yang terkait tidak sinkron satu sama lain, dalam hal ini terutama antara Departemen Kehakiman Dan HAM RI yang mengesahkan status badan hukum PT dalam rangka PMA dan BKPM yang merupakan instansi yang mengeluarkan surat persetujuan PMA.

Beberapa permasalahan yang timbul berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah terutama mengenai :

Nama Perseroan.

Di dalam surat persetujuan PMA dicantumkan nama perseroan. Pemakaian nama perseroan harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan.

Perseroan tidak boleh menggunakan nama PT yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa nama yang tercantum dalam surat persetujuan BKPM sering tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian berkaitan dengan nama perseroan adalah sebagai berikut :

- i Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 1166/I/PMA/2000 tanggal 20 Desember 2000 untuk PT. Namyang *Chemical* Indonesia, dimana bidang usaha adalah release paper, paper tape, sticker paper yang tidak sesuai dengan nama PT yang memakai “chemical” (kimia).
- ii Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 344/I/PMA/2001 tanggal 27 April 2001 untuk PT. Seal *Logistik Services*, dimana bidang usaha adalah konsultasi manajemen, distributor utama, ekspor barang dagangan, impor barang dagangan yang tidak sesuai dengan nama PT yang memakai “logistik” (pengadaan atau perbekalan).
- iii Surat Persetujuan Perubahan Rencana Proyek Penanaman Modal Nomor : 652/III/ PMA/2001 tanggal 31 Mei 2001 untuk PT. E.K. Prima *Ekspor* Indonesia, dimana bidang usaha adalah import barang dagangan dan distributor utama yang tidak sesuai dengan nama PT yang memakai “ekspor”.
- iv Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 277/II/PMA/2001 tanggal 29 Oktober 2001 untuk PT. *Health Care Of* Surabaya, dimana bidang

usaha adalah konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen, yang tidak sesuai dengan nama PT yang memakai “health care” (perawatan kesehatan).

- v. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 17/I/PMA/2002 tanggal 11 Januari 2002 untuk PT. PPH Indonesia *Display Design*, dimana bidang usaha adalah import barang dagangan, ekspor barang dagangan, distributor utama yang tidak sesuai dengan nama PT yang memakai “display design” (pameran model / pola).

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1998 tanggal 4 Pebruari 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan pada huruf g. menentukan bahwa permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Surat Persetujuan BKPM sebagaimana tersebut di atas ditolak karena nama-nama PT tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dimana yang dimaksud “tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan” dari Surat Persetujuan BKPM adalah, satu contoh misalnya, PT. E.K. Prima “*Ekspor*” Indonesia, yang ternyata bergerak di bidang perdagangan impor.

Bidang Usaha.

Dalam surat persetujuan BKPM tercantum pula bidang usaha yang mencerminkan

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh perseroan yang bersangkutan. Undang-undang perseroan terbatas menentukan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Permasalahannya, sering ditemukan bidang usaha yang tercantum dalam surat persetujuan BKPM semata-mata berpedoman pada bidang usaha yang tercantum dalam *negative list* yang terdapat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 96 dan Nomor 118 Tahun 2000, sementara ketentuan peraturan lain yang berkaitan khususnya PT dalam rangka PMA tidak diperhatikan. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian berkaitan dengan bidang usaha adalah sebagai berikut :

- i. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 696/I/PMA/1998 tanggal 16 Nopember 1998 untuk PT. Hakindah International, dimana bidang usaha adalah jasa konsultasi di bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), bidang usaha tersebut tergolong jasa konsultasi hukum yang tidak boleh dilakukan oleh suatu perseroan terbatas dan bidang tersebut merupakan bidang yang berkaitan dengan bidang kerja Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektuan (HAKI) Departemen Kehakiman Dan HAM RI.
- ii. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 569/I/PMA/1999 tanggal 25 Agustus 1999 untuk PT. Central Raya International, dimana salah satu kegiatan usahanya yang berkaitan dengan bidang usaha adalah konsultasi

keuangan, dimana bidang tersebut tidak dilakukan oleh suatu perseroan terbatas tetapi oleh suatu persekutuan perdata atau profesi di bidang akuntansi.

- iii. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 717/I/PMA/2000 tanggal 23 Agustus 2000 untuk PT. Astaga Tours Online, dimana bidang usaha adalah Biro Perjalanan Wisata tetapi uraian kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 67 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang secara khusus mengatur kegiatan usaha perjalanan wisata..
- iv. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 629/III/PMA/2001 tanggal 25 Mei 2001 untuk PT. Hyae Na Ko Bali, dimana bidang usaha adalah jasa akomodasi (Cottage) dan Biro Perjalanan Wisata, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 67 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kepariwisataaan dimana ditentukan bahwa usaha Biro Perjalanan Wisata merupakan usaha khusus yang tidak dapat dicampur dengan usaha lain. Artinya usaha Biro Perjalanan Wisata tidak dapat digabung dengan usaha Jasa Akomodasi (Cottage)
- v. Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor : 09/V/PMA/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 untuk PT. Prima Energi Indonesia, dimana bidang usaha adalah melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain padahal PT tersebut bukan PT didirikan sebagai Lembaga Pembiayaan, karena penyertaan modal

pada perusahaan lain adalah bidang usaha untuk Lembaga Pembiayaan.

Surat-surat Persetujuan BKPM tersebut di atas, bidang usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bidang usaha tersebut, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor : 67 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kepariwisata.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, jika kita melihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 khususnya Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut maka jelas bidang usaha yang tertuang dalam Surat Persetujuan BKPM tersebut di atas tidak memperhatikan atau tidak menerapkan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya sebagai contoh adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 67 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kepariwisata.

Surat Persetujuan BKPM tersebut di atas juga tidak memperhatikan bidang-bidang usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh perseroan terbatas tetapi seharusnya hanya dilakukan oleh persekutuan perdata misalnya konsultasi keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang akuntan. Demikian juga bidang usaha konsultasi di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dimana bidang usaha tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah. Jika dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

maka bidang usaha perseroan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, dimana ditentukan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Permodalan.

Dalam surat persetujuan BKPM tentang PMA tercantum juga mengenai modal perseroan yaitu modal dasar, modal ditempatkan serta modal disetor.

Mengenai modal perseroan ini juga sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa permodalan yang tercantum dalam surat persetujuan BKPM mengabaikan atau tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya prosentase mengenai modal yang ditempatkan dan disetor. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian berkaitan dengan permodalan adalah sebagai berikut :

- i. Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non PMA menjadi PMA Nomor : 98/V/PMA/2000 tanggal 17 Juli 2000 untuk PT. Sentosa Informatika Lestari, dimana modal disetor 50% dari modal yang dikeluarkan atau ditempatkan, padahal PT tersebut sudah sah sebagai badan hukum berstatus PT biasa.

- ii. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari BKPM Propinsi Jawa Barat Nomor : 20/02/I/PMA/2000 tanggal 11 Agustus 2000 untuk PT. Joil Mijaya Indah, dimana modal disetor kurang dari 50% dari modal yang ditempatkan sementara perseroan ini baru dalam proses pendirian.
- iii. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 933/I/PMA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 untuk PT. Bahtera Jaya Sentosa, dimana salah satu pemegang saham bukan badan hukum berbentuk PT tetapi badan usaha CV yaitu CV. Fahriesta Multi Kreasi.
- iv. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM Propinsi DKI Jakarta Nomor : 28/01/I/PMA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 untuk PT. Sumber Daya Telematika Indonesia, dimana salah satu pendiri atau pemegang saham belum berbadan hukum pada saat diajukan ke Departemen Kehakiman Dan HAM RI yaitu PT. Indo Cisc.
- v. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 346/II/ PMA/ 2000 tanggal 8 Desember 2000 untuk PT. Sutra Haelindo, dimana PT ini sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum akan tetapi modal disetor tidak 100% dari modal yang ditempatkan dan pemegang saham PT tersebut adalah pemegang saham tunggal.
- vi. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 35/I//PMA/2002 tanggal 16 Januari 2002 untuk PT. SC Indonesia, dimana PT ini dalam rangka pengesahan sebagai badan hukum akan tetapi modal disetor kurang dari 50%

dari modal ditempatkan.

- vii. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 23/II/PMA/2002 tanggal 28 Januari 2002 untuk PT. Ayakeh Team Indonesia, dimana PT ini sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum akan tetapi modal disetor masih 50% dari modal yang ditempatkan.

Surat Persetujuan BKPM tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut tiap kali harus disetor penuh.

Mengenai ketentuan tentang keharusan penysetoran penuh pengeluaran lebih lanjut, dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa sejak tanggal pengesahan tidak dimungkinkan penysetoran atas saham secara mengangsur. Kemungkinan mengangsur saham hanya dilakukan sebelum pengesahan diberikan. Surat Persetujuan BKPM Nomor : 98/V/PMA/2000 tanggal 17 Juli 2000 untuk PT. Sentosa Informatika Lestari dan Surat Persetujuan BKPM Nomor : 23/II/PMA/2002 tanggal 28 Januari 2002 untuk PT. Ayakeh Team Indonesia tidak sinkron atau bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut.

Surat Persetujuan BKPM Nomor : 36/II/PMA/2000 tanggal 8 Desember 2000 untuk PT. Sutra Haelindo dimana selain bertentangan dengan Pasal 26 ayat

(4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai penyetoran penuh atas PT yang sudah disahkan apabila merubah permodalannya dengan meningkatkan modal perseroan, juga bertentangan dengan ketentuan mengenai pemegang saham minimal 2 (dua) orang untuk PT yang sudah mendapat pengesahan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dalam penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pendirian perseroan harus 2 (dua) orang atau lebih menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Surat Persetujuan BKPM Nomor : 20/02/I/PMA/2000 tanggal 11 Agustus 2000 untuk PT. Joil Mijaya Indah dan Surat Persetujuan BKPM Nomor : 35/I/PMA/2002 tanggal 16 Januari 2002 untuk PT. SC Indonesia juga tidak sinkron atau bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dimana disebutkan setiap penempatan modal harus telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.

Surat Persetujuan BKPM Nomor : 933/I/PMA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 untuk PT. Bahtera Jaya Sentosa dimana pemegang saham adalah badan usaha berbentuk CV bukan badan hukum berbentuk PT, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

dimana di dalam penjelasan undang-undang tersebut menentukan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Demikian juga Surat Persetujuan BKPM Nomor : 28/01/I/PMA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 untuk PT. Sumber Daya Telematika Indonesia, dimana pemegang saham atau pendiri belum berbadan hukum atau akta pendiriannya belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan HAM RI sebagai badan hukum.

Direksi dan Komisaris.

. Direksi dan Komisaris merupakan organ penting dalam perseroan terbatas. Pencantuman Direksi dan Komisaris harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahannya, adalah bahwa pencantuman Direksi dan Komisaris dalam surat persetujuan BKPM tentang PMA tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan sering ditemukan dalam surat persetujuan BKPM tidak mencantumkan Komisaris baik WNI maupun WNA. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian berkaitan dengan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut :

- i. Surat Persetujuan BKPM tentang Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaan Nomor : 616/III/PMA/2000 tanggal 11 Mei 2000 untuk PT. Multi Pratama Interbuana Indonesia, dimana Dewan Komisaris dan Direksi tidak satupun

orang Indonesia, tetapi untuk Direksi ada catatan bahwa Direktur yang membidangi personalia dijabat oleh warganegara Indonesia.

- ii. Surat Persetujuan BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Status PMDN menjadi PMA Nomor : 14/24/III/PMA/2000 tanggal 19 Agustus 2000 untuk PT. Naga Permai, dimana Komisaris baik warganegara Indonesia maupun warganegara asing tidak tercantum.
- iii. Surat Persetujuan BKPM tentang Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Nomor : 622/III/PMA/2001 tanggal 22 Mei 2001 untuk PT. NTL Naigai Trans Line Indonesia, dimana Direksi seluruhnya adalah warganegara asing, tidak ada catatan bahwa untuk Direksi Personalia harus dijabat oleh warganegara Indonesia.
- iv. Surat Persetujuan BKPM tentang Perubahan Status Perusahaan dari Non PMA menjadi PMA Nomor : 13/V/PMA/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 untuk PT. Petroprima Geo Servis Nusantara, dimana Direksi warganegara Indonesia tidak ada akan tetapi ada catatan bahwa Direksi yang membawahi bidang Personalia harus dijabat oleh warganegara Indonesia.

Surat Persetujuan BKPM Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 14/24/III/PMA/2000 tanggal 19 Agustus 2000 untuk PT. Naga Permai, dimana tidak ditentukan Komisaris, maka hal tersebut bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun

1995. Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar.

Sedangkan Surat Persetujuan BKPM Nomor : 616/III/PMA/2000 tanggal 11 Mei 2000 untuk PT. Multi Pratama Interbuana Indonesia, Surat Persetujuan BKPM Nomor : 622/III/PMA/2001 tanggal 22 Mei 2001 untuk PT. NTL Naigai Trans Line Indonesia, Surat Persetujuan BKPM Nomor : 13/V/PMA/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 untuk PT. Petroprima Geo Servis Nusantara, dimana dalam Surat Persetujuan BKPM tersebut tidak ada seorangpun Direksi berkewarganegaraan Indonesia, namun untuk PT. PMA ada ketentuan bahwa Direksi Personalia harus warganegara Indonesia, maka seharusnya di dalam Surat Persetujuan BKPM tersebut untuk mengamankan posisi Direktur Personalia agar tidak diduduki warganegara asing harus sudah ditentukan ataupun tidak ditunjuk satu orang Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

3. Implikasi Problematika Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terhadap PT Dalam Rangka PMA.

Dari hasil penelitian mengenai proses penyelesaian permohonan, mekanisme kerja dengan sistem manual tersebut terlihat jelas mempunyai rangkaian atau alur kerja yang panjang dan birokratis, dan hal tersebut tentu saja mengakibatkan diperlukannya jangka waktu yang tidak singkat untuk sampai

pada tahapan akhir proses.

Akibat dari mekanisme kerja seperti ini hampir tidak memungkinkan proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian atau proses penyelesaian permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

Para investor asing baik secara langsung maupun melalui konsultan hukum sering mengeluhkan mekanisme kerja yang panjang dan birokratis tersebut, bahkan dalam sistem manual mekanisme dengan alur kerja yang panjang selalu diikuti dengan ketidaktransparanan penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.⁶

Undang-undang dengan jelas menentukan mengenai jangka waktu proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian, dimana Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan tegas menyatakan bahwa pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari setelah permohonan diterima. Jangka waktu 60 (enampuluh) hari tersebut menurut penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah dihitung sejak permohonan yang diajukan

⁶ Mauliate P. Situmeang, Konsultan Hukum, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 21 Januari 2002.

dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para investor asing adalah pelaku-pelaku bisnis yang berarti adalah juga pelaku-pelaku ekonomi yang sangat memperhitungkan waktu, dan waktu selalu diperhitungkan dengan biaya. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan dari waktu yang seharusnya telah ditentukan, berarti peningkatan biaya bahkan kerugian dapat terjadi pada investasi yang mereka tanamkan.

Meskipun ada kebijaksanaan dalam sistem manual bahwa untuk PT dalam rangka PMA pengerjaan proses permohonan pengesahan akta pendirian maupun proses persetujuan perubahan anggaran dasar didahulukan dari PT biasa yang bukan dalam rangka PMA. Itu artinya prinsip pengerjaan didasarkan atas urutan permohonan khusus untuk PT. PMA dapat dikesampingkan dan dikerjakan secara tersendiri, akan tetapi tetap hal-hal tersebut terbentur pada alur kerja yang panjang dan birokratis, sehingga percepatan proses hanya kasuistik saja, artinya hanya apabila para investor asing tersebut melalui kuasa hukumnya atau melalui Notaris pembuat akta datang memohon percepatan berhubung jangka waktu 60 (enampuluh) hari untuk proses penyelesaian telah lampau. ⁷

Permasalahan yang muncul yang turut andil dalam memperlambat proses penyelesaian adalah kenyataan bahwa kemampuan antara satu Notaris dengan

Notaris lainnya dan kemampuan Notaris di kota besar dan Notaris di kota kecil tidak sama dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PT dalam rangka PMA.

Dampak daripada ketidakmampuan tersebut menyebabkan masih banyak permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT termasuk PT dalam rangka PMA tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga banyak permohonan yang ditolak dan dikirim kembali dengan surat dinas dari Departemen Kehakiman ke Notaris yang bersangkutan untuk diperbaiki atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidaksamaan kemampuan dalam memahami peraturan perundang-undangan antara satu Notaris dengan Notaris lainnya berkaitan dengan perseroan terbatas baik secara administratif maupun materi, menimbulkan permasalahan meskipun sistem kerja yang telah dipergunakan oleh Departemen Kehakiman Dan HAM RI adalah sistem yang memanfaatkan teknologi tinggi melalui SISMINBAKUM, karena proses yang seharusnya dapat cepat menjadi terhambat karena masalah tersebut.

Koordinasi antara satu instansi dengan instansi lain yang berkaitan dengan PMA, dalam hal ini antara BKPM dengan Departemen Kehakiman Dan HAM RI

⁷ Robert Purba, Notaris Jakarta, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 21 Januari 2002.

penting dan ditingkatkan. Ketidaksinkronan antar instansi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan mempunyai dampak negatif bagi investor asing.

Kepala Bagian Hukum BKPM menyatakan bahwa memang saat ini BKPM dalam menjalankan fungsinya sebagai Koordinator di bidang penanaman modal asing belum dapat sepenuhnya untuk bisa melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana mestinya secara utuh, berhubung pekerjaan yang menumpuk tetapi harus segera ada pelayanan yang memadai agar investor tidak menemui hambatan pertama kali waktu mengadakan pengurusan di BKPM.⁸

Selama ini investor asing berfikir bahwa permasalahan PMA cukup ditangani oleh BKPM karena BKPM merupakan lembaga koordinator sehingga mereka beranggapan bahwa BKPM pasti telah melakukan tugasnya sebagai koordinator dengan instansi lain yang terkait termasuk mengenai proses pengesahan akta pendirian maupun persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penanaman modal asing.⁹

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang penulis lakukan di Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya di Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata yang menangani proses

⁸ Kepala Bagian Hukum BKPM, *Wawancara Pribadi*, BKPM, Jakarta, 22 Nopember 2001.

⁹ Mauliate P. Situmeang, Konsultan Hukum, *Wawancara Pribadi*.

permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disebut PMA), dan penelitian di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan Surat Persetujuan berkaitan dengan PMA sebagai salah satu syarat pengesahan akta pendirian maupun persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PMA, maka dapat disajikan pembahasan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA.

Pengesahan terhadap akta pendirian perseroan terbatas dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang terkait.

Hal tersebut berlaku juga untuk proses serta prosedur pengesahan terhadap akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PMA juga dilakukan dengan didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan lain yang terkait.

Instansi yang menangani proses tersebut adalah instansi pemerintah dimana penanganan proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan

anggaran dasar ditangani oleh Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (dahulu bernama Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan).

Dalam menangani proses tersebut, pada saat ini ada dua sistem yang dipergunakan dalam memproses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yaitu dengan **Sistem Manual** dan dengan **Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)**.

Mengenai tata cara permohonan, untuk sistem manual Departemen Kehakiman Dan HAM RI mengeluarkan ketentuan mengenai “Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Kemudian, untuk perubahan anggaran dasar dalam sistem manual tersebut Departemen Kehakiman Dan HAM RI mengeluarkan ketentuan mengenai “Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas” diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Apabila kita melihat kembali Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.08.01.Th.1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, banyak lampiran yang harus diajukan, yaitu :

- Satu salinan akta pendirian perseroan bermeterai dan akta perubahan pendirian bermeterai (apabila ada) yang dibuat sesuai dengan standar akta yang telah ditentukan.
- Data akta pendirian yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di atas kertas bermeterai.
- Bukti setoran modal dari Bank (apabila berbentuk fotokopi wajib dibubuhi keterangan dan ditandatangani oleh Notaris bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya / fotokopi yang dilegalisir Notaris).
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan (fotokopi dilegalisir Notaris).
- Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam Tambahan Berita Negara dari kantor Percetakan Negara dari kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1993.

- Fotokopi surat persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi dilegalisir Notaris).
- Apabila penyeteran saham dalam bentuk bukan uang, melampirkan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat pengumuman tentang penyeteran saham selain uang.
- Dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian juga untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR.08.01.Th.1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, syarat-syarat yang diperlukan sangatlah banyak yaitu :

- 1 (satu) salinan akta bermeterai mengenai Berita Acara Rapat atau salinan akta bermeterai mengenai Pernyataan Keputusan Rapat, mengenai perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuat sesuai dengan standar akta yang telah ditentukan.
- notula rapat perubahan anggaran dasar dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat.

- data akta perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di atas kertas bermeterai.
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan.
- bukti pembayaran uang muka pengumuman akta perubahan anggaran dasar dalam Tambahan Berita Negara dari kantor Percetakan Negara RI.
- bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1993.
- * - fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) khusus bagi PT dengan fasilitas Penanaman Modal Asing yang belum berproduksi komersial atau perubahan PT non fasilitas menjadi PT dengan fasilitas penanaman modal.
- iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang membuat pengumuman tentang penyetoran saham selain uang.
- dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari lampiran-lampiran yang diajukan oleh Notaris tersebut baik untuk lampiran pengesahan akta pendirian maupun lampiran untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, sebenarnya ada beberapa persyaratan yang tidak perlu dilampirkan, misalnya data akta pendirian,

bukti setoran modal dari bank, foto copy NPWP dan bukti pembayaran uang muka dari Percetakan Negara. Syarat-syarat tersebut ada yang memang tidak disyaratkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, ada pula syarat yang bukan merupakan hal yang penting atau bukan kewajiban Departemen Kehakiman Dan HAM RI untuk mensyaratkannya.

Untuk “data akta”, apabila kita melihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa akta Notaris merupakan syarat utama yang diperlukan. Kemudian Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Menteri. Dengan demikian jelas terlihat yang merupakan syarat utama adalah akta dan bukan data akta.

Dari hasil penelitian ternyata data akta juga merupakan salah satu penyebab lamanya proses pemeriksaan karena banyak ditemukan oleh Korektor bahwa ternyata apa yang tercantum di dalam data akta yang sebenarnya merupakan rangkuman dari isi akta berbeda dengan aktanya untuk pasal-pasal anggaran dasar tertentu.

Perbedaan antara isi data akta dengan akta apabila ditemukan oleh Korektor maka oleh Korektor tidak dapat mengabaikan begitu saja perbedaan

tersebut sehingga yang terjadi adalah adanya pemeriksaan dua kali yang memperlambat pemeriksaan karena ini berarti memeriksa akta dan juga data akta..

Kemudian “bukti setoran modal dari bank” pada dasarnya tidak perlu dijadikan syarat untuk dilampirkan karena pada dasarnya bukti tersebut lebih merupakan tanggung jawab Notaris karena hal tersebut menyangkut kebenaran atas bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh para pendiri atau pemegang saham perseroan. Karena apabila bukti setor dari bank ternyata tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta maka hal tersebut juga merupakan salah satu hal yang menghambat proses penyelesaian permohonan.

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)” adalah juga merupakan syarat yang tidak perlu ditentukan oleh Departemen Kehakiman Dan HAM RI karena permasalahan wajib pajak lebih tepat apabila diawasi oleh instansi yang tepat yaitu Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Demikian juga mengenai “bukti pembayaran uang muka pengumuman Tambahan Berita Negara”, karena hal tersebut jelas merupakan tanggung jawab Direksi. Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri dan akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri. Kemudian Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Permohonan pengumuman perseroan dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pendaftaran.

Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut yang dilakukan secara manual mempunyai tahap-tahap prosedur atau alur kerja yang panjang.

Alur kerja yang panjang dan kurangnya pemanfaatan teknologi berupa sistem jaringan komputer on line menyebabkan timbulnya problem yang akhirnya berdampak buruk bagi kinerja aparatur negara yang cenderung birokratis.

Bentuk organisasi birokrasi pada masa-masa sekarang sudah saatnya untuk ditinjau kembali dan diarahkan kepada bentuk organisasi yang terbuka atau fleksibel, ramping atau pipih (flat), efisien dan rasional serta terdesentralisasi.¹⁰

Permasalahan yang langsung dapat ditemukan dari mekanisme kerja sistem manual tersebut adalah tidak terjangkaunya jangka waktu proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian maupun proses persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan yaitu 60 (enampuluh) hari, sehingga dampak lain yang muncul adalah adanya tunggakan pekerjaan.

¹⁰ Sularso Sopater, Bambang Subandrijo dan Jakob Tobing (Penyunting), *Seri Membangun Bangsa : Pemberdayaan Birokrasi Dalam Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal.11.

Mekanisme sistem kerja manual seharusnya dapat diperpendek dan diikuti dengan pemakaian teknologi canggih berupa perangkat komputer yang on line baik di tingkat Korektor, Kepala Seksi, Kepala Subdit Badan Hukum, Direktur Perdata maupun Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk itu inti pekerjaan ada pada Seksi Dokumentasi untuk mempermudah proses selanjutnya dalam hal penelitian berkas. Mekanismenya adalah sebagai berikut :

- a. penerimaan berkas dan pembayaran PNBPN di loket.
- b. pendataan dengan menggunakan aplikasi komputer. Kemudian pengambilan berkas lama untuk digabungkan dengan berkas baru. Pengecekan nama PT dengan menggunakan aplikasi komputer. Pada proses ini sudah ada Korektor khusus untuk memasukkan data di komputer mengenai kelengkapan administrasi dan pemeriksaan terhadap pasal-pasal tertentu saja dalam anggaran dasar PT yaitu Pasal 1 mengenai nama PT, Pasal 2 mengenai jangka waktu, Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan Pasal 4 mengenai permodalan.
- c. kemudian oleh Korektor data tersebut ditransfer secara on line kepada Kepala Seksi Dokumentasi melalui komputer disertai dengan lembar pengesahan atau persetujuan untuk PT yang dapat dikonsep surat keputusannya karena tidak bermasalah, atau lembar penolakan untuk PT yang masih bermasalah. Kepala Seksi Dokumentasi kemudian mentransfer hasil pemeriksaannya ke Kepala Seksi Teknis, tanpa perlu disertai berkas PT.

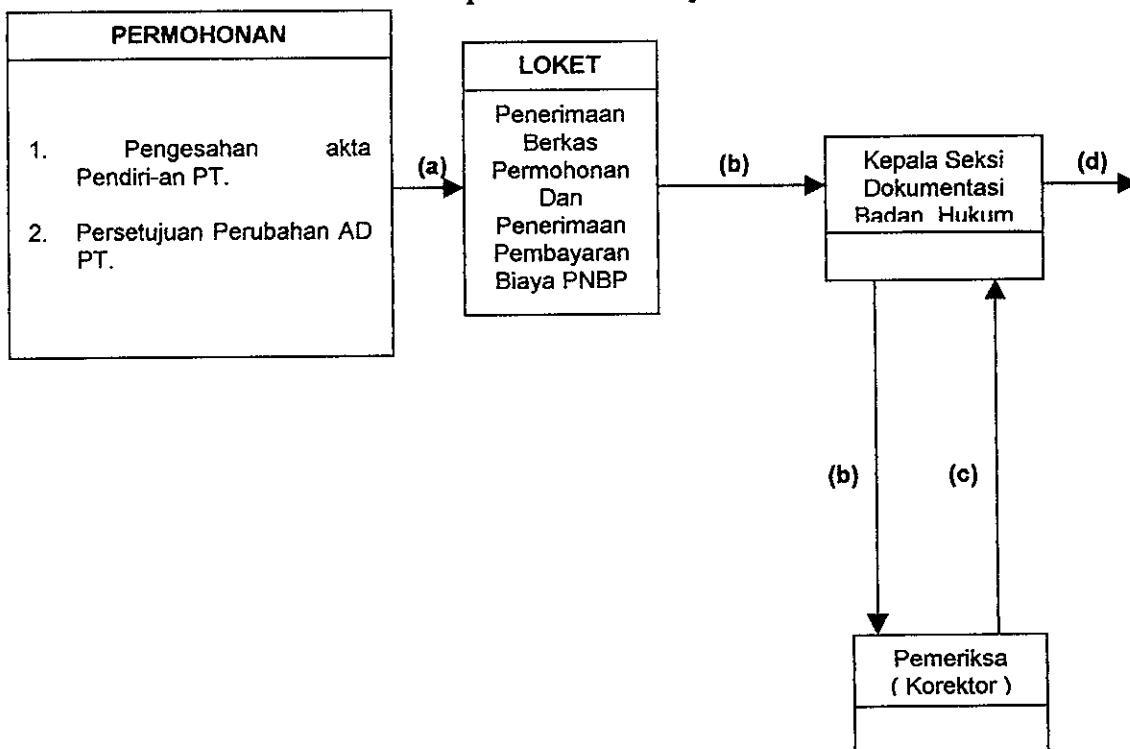
- d. melalui layar monitor komputer, Kepala Seksi Teknis meneliti ulang hasil pemeriksaan Korektor, selanjutnya mentransfer secara on line kepada Kasubdit Badan Hukum untuk diteliti ulang disertai dengan konsep surat keputusan pengesahan atau konsep surat keputusan persetujuan serta konsep surat penolakan. Konsep-konsep tersebut formatnya sudah ada di layar monitor Kepala Seksi dan tinggal diisi untuk kemudian ditransfer kepada Kasubdit.
- e. melalui layar monitor komputer, Kasubdit meneliti ulang hasil pemeriksaan Kepala Seksi serta meneliti konsep surat keputusan dan konsep surat penolakan. Untuk konsep surat penolakan maka Kasubdit langsung menandatangani dengan tanda tangan elektronik dan kemudian ditransfer secara on line ke bagian Dokumentasi kembali yaitu bagian pencetakan surat. Untuk konsep surat keputusan pengesahan akta pendirian maupun surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus ditransfer secara on line oleh Kasubdit kepada Direktur Perdata untuk ditandatangani secara elektronik.
- f. Direktur Perdata meneliti ulang konsep surat keputusan yang telah diperiksa oleh Kasubdit. Kemudian surat-surat keputusan tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Direktur dan dikirim secara on line ke bagian Dokumentasi untuk dicetak oleh bagian pencetakan. Penandatanganan surat keputusan

cukup dilakukan oleh Direktur Perdata tidak perlu sampai tingkat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

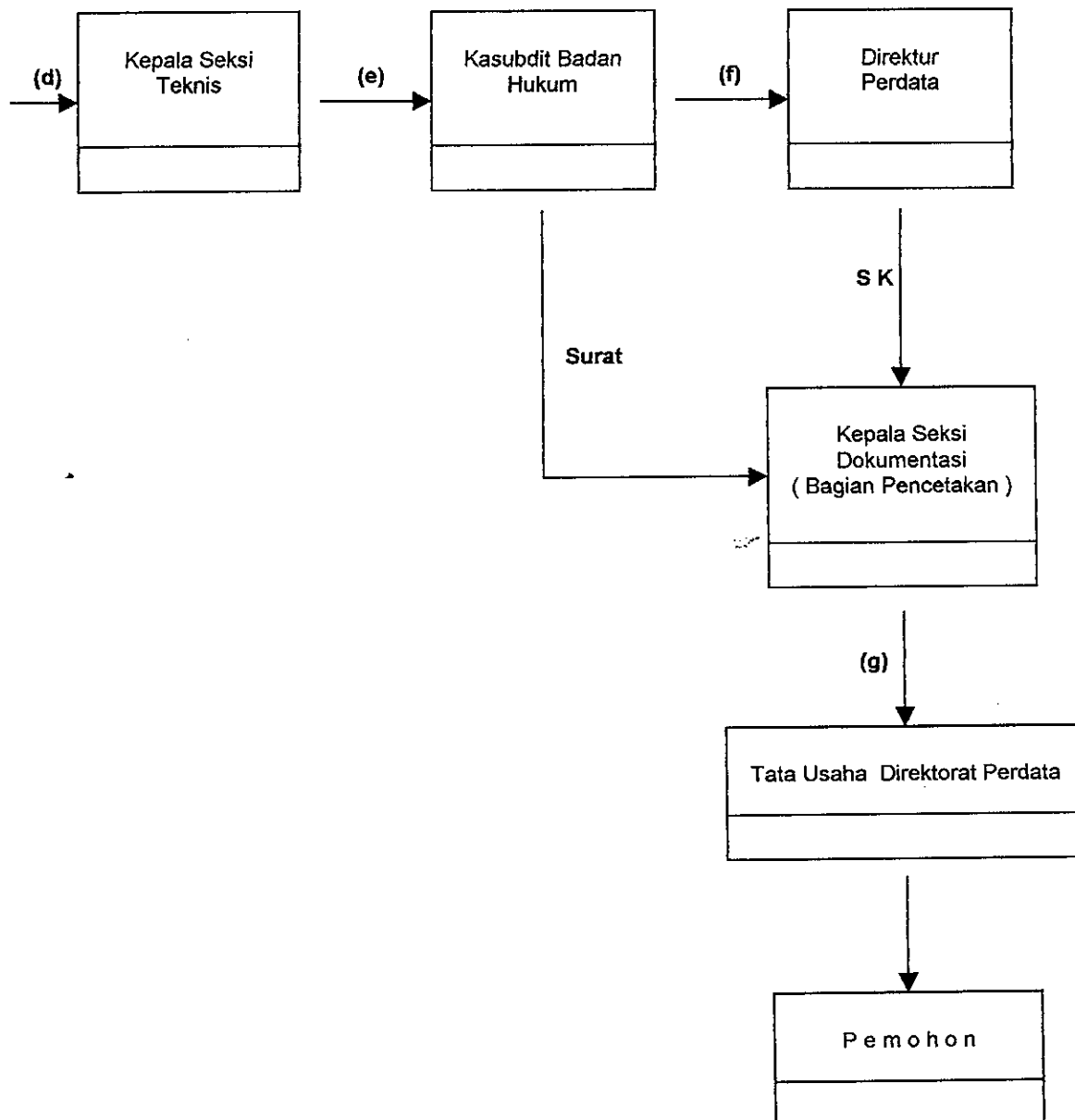
- g. bagian pencetakan akan mengirim hasil cetakan baik berupa surat penolakan yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Kasubdit dan surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur ke bagian Tata Usaha Direktorat Perdata untuk dikirim kepada Notaris yang bersangkutan.

Berikut ini skema mekanisme kerja yang seharusnya dapat diperpendek dengan pemanfaatan teknologi komputer on line system antara satu dengan lainnya.

Alur Kerja Proses Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Yang Disederhanakan Dengan Pemanfaatan Teknologi Komputer On Line System



Sambungan Alur Kerja Proses Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Yang Disederhanakan Dengan Pemanfaatan Teknologi Komputer On Line System



Untuk memperpendek alur birokrasi, maka penandatanganan surat keputusan Menteri atas pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas cukup di tingkat Direktur (Eselon II) dengan tanda tangan elektronik. Untuk memberi dasar hukum terhadap tanda tangan elektronik oleh Direktur Perdata maka harus dibuat secara khusus undang-undang tersebut.

Penandatanganan di tingkat Direktur tersebut dimungkinkan karena berdasarkan Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman, pada Bab VI tentang Administrasi Tata Persuratan Tata Kearsipan Dan Pelaporan, Bagian 2.1.1. mengenai Naskah yang berbentuk peraturan perundang-undangan – huruf c, bahwa keputusan Menteri Kehakiman ditandatangani oleh Menteri Kehakiman; atau atas nama Menteri oleh pejabat Eselon I atau pejabat lain (termasuk Eselon II) yang mendapat delegasi wewenang dari Menteri. ¹¹

Dengan alur birokrasi yang diperpendek tersebut dimana tanda tangan hanya sampai tingkat Direktur dan dengan cara kerja yang memanfaatkan jaringan komputer yang on line satu sama lain maka jangka waktu penyelesaian proses dapat dicapai sehingga dapat dihindari adanya tunggakan pekerjaan yang berarti tidak perlu mengadakan crash program yang memakan waktu dan biaya

¹¹ Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman*, Tahun 1996, hal.277.

tinggi.

Menyadari bahwa permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas datang dan berasal dari seluruh wilayah negara Indonesia diseluruh kerja Notaris, maka seharusnya proses permohonan tersebut tidak dipusatkan di Jakarta yaitu di kantor pusat Departemen Kehakiman Dan HAM RI, tetapi harus dapat dilimpahkan ke daerah propinsi.

Dimasa yang akan datang penyelenggaraan urusan pemerintah hendaknya dititikberatkan kepada kapasitas dan peranserta masyarakat di tingkat daerah atau wilayah. Sehubungan dengan hal ini, maka pada waktu-waktu mendatang, perencanaan pembangunan wilayah akan lebih banyak mendapat perhatian serta diprioritaskan sebagai salah satu dimensi strategi dalam rangka pendayagunaan administrasi publik, khususnya di daerah.¹²

Upaya lain yang telah dilakukan dalam sistem manual untuk menyelesaikan masalah proses penyelesaian permohonan adalah dengan membuat “standar akta”. Standar akta dibuat pada mulanya untuk mempermudah Korektor memeriksa akta-akta yang masuk karena sebelum ada standar akta banyak model akta yang beraneka ragam yang dibuat oleh Notaris dimana satu dengan lainnya berbeda, sehingga memperlambat pemeriksaan.

¹² Sularso Sopater, Bambang Subandrijo, Jakob Tobing (Penyunting), op.cit., hal.11.

Dengan adanya standar akta tersebut maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa standar akta dapat mengurangi kebebasan untuk mengadakan perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila kita lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan prinsip dasar bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian (karena perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih).

Pada prinsipnya dasar dari perjanjian adalah kebebasan untuk berkontrak atau membuat perjanjian antara para pihak. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1338 KUH.Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Rutten asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH.Perdata terdiri dari Asas Konsensualisme yaitu bahwa perjanjian dibuat berdasarkan persetujuan kehendak; Asas Kekuatan Mengikat dari perjanjian dimana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak; serta Asas Kebebasan Berkontrak yaitu orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya, syarat-syarat, bentuknya, undang-undang mana yang dipakai. Dari ketiga asas tersebut maka asas kebebasan

berkontrak adalah yang paling penting dan merupakan tiang hukum perdata.¹³

Namun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut harus dilandasi oleh asas itikad baik. Itikad baik dan kepatutan kebanyakan disebut secara senafas. Volmar dalam bukunya menerangkan Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUH.Perdata dalam satu hal yaitu antara lain bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1339 KUH.Perdata yang menentukan bahwa perjanjian juga mengikat berdasarkan kepatutan.¹⁴

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas maka pembuatan standar akta telah mengurangi asas kebebasan berkontrak dengan syarat asas itikad baik tersebut. Seharusnya tidak perlu dibuat standar akta, sehingga selama ini Korektor memeriksa pasal-pasal tertentu saja dari anggaran dasar yang berasal dari standar akta, dimana nantinya tidak perlu lagi bagi Notaris mengikuti standar akta. Untuk itu perlu peningkatan pemahaman tentang masalah-masalah perjanjian di tingkat Korektor.

Permasalahan lain adalah apabila ternyata pembuatan materi akta yang dilakukan oleh Notaris bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang terkait.

¹³ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986, hal.2 – 3.

¹⁴ Ibid, hal.8.

Penyebab dari hal tersebut adalah kenyataan bahwa kemampuan antara satu Notaris dengan Notaris lainnya dan kemampuan Notaris di kota besar dan Notaris di wilayah kota kecil tidak sama dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PT dalam rangka PMA.

Ketidakmampuan Notaris tersebut menyebabkan masih banyak permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT termasuk PT dalam rangka PMA tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga banyak permohonan yang ditolak dan dikirim kembali dengan surat dinas dari Departemen Kehakiman ke Notaris yang bersangkutan untuk diperbaiki atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan kemampuan satu Notaris dengan Notaris lain yang tidak sama dan juga kemampuan Notaris kota besar dan kota kecil yang berbeda satu sama lain dalam pemahaman peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perseroan terbatas, dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu permasalahan atau problematika dalam proses penyelesaian permohonan. Untuk mengatasi hal tersebut sudah selayaknya ada suatu standar pendidikan kenotariatan yang harus diterapkan diseluruh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kenotariatan dan harus ada peranan yang lebih aktif lagi dari Ikatan Notaris Indonesia (I N I) untuk memajukan anggotanya dan menyebarkan ilmu yang didapat keseluruh Notaris sebagai anggotanya.

Departemen Kehakiman Dan HAM RI menyadari bahwa sistem manual banyak mempunyai kelemahan, kemudian diberlakukan **SISMINBAKUM** dalam penanganan proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian dan penanganan proses persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, dimana perbedaan utama dari sistem manual adalah bahwa dalam **SISMINBAKUM** permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diajukan oleh Notaris sebagai pemohon secara elektronik dengan menggunakan komputer melalui pemanfaatan jaringan internet.

Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis. Internet adalah sebuah contoh investasi, dedikasi, dan komitmen yang sukses untuk sebuah riset yang dilakukan oleh pemerintah Amerika yang kemudian mulai dikembangkan oleh industri dan akhirnya akademi telah mengembangkan dan menyebarkan hal baru ini.¹⁵

Sejarah berkembangnya teknologi ini melibatkan empat aspek berbeda yang saling terintegrasi yakni :¹⁶

¹⁵ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Fair Use Dan Kompleksitas Permasalahan Penanganan Pelanggaran Hak Cipta Di Internet*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 18, Maret 2002, hal.44.

¹⁶ Ibid.

- a. aspek teknologi, yaitu diawali dengan sebuah riset dalam packet switching dari ARPANET (dan teknologi yang terkait) kemudian diikuti oleh pengembangan infrastruktur untuk berbagai macam dimensi, seperti ukuran, kinerja dan fungsi-fungsi tingkat lainnya.
- b. aspek operasional dan manajemen, yaitu untuk mengatur secara operasional infrastruktur yang kompleks dan bekerja secara global.
- c. aspek sosial, yaitu aspek ini menghasilkan suatu komunitas internet yang luas tempat mereka saling bekerjasama untuk mengembangkan teknologi baru.
- d. aspek komersialisasi, yaitu dengan menghasilkan suatu perubahan yang sangat efektif dari sebuah penelitian menjadi sebuah infrastruktur penyedia dan penyebar informasi yang dapat mencakup wilayah yang luas.

Pengaruh internet tidak hanya menyentuh mereka yang berada di bidang teknologi informasi dan komputer, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat yang telah memanfaatkan internet sebagai alat on line untuk menyelesaikan berbagai tugas mereka. ¹⁷

Sebenarnya antara sistem manual dan sistem dengan cara SISMINBAKUM secara umum tahapan proses pengolahan data dan prosedurnya adalah sama. Jadi sesungguhnya tahapan pengolahan data antara yang manual dan yang elektronik adalah sama, tetapi yang akan berbeda adalah kecepatan

¹⁷ Riyeke Ustadianto, *Frame Work E - Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 1 – 2.

prosesnya, dimana SISMINBAKUM prosesnya lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi tinggi.

Perihal persyaratan utama mengenai cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian serta persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui SISMINBAKUM tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan untuk permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang diajukan melalui SISMINBAKUM hampir sama dengan sistem manual, terutama pada saat penyampaian dokumen fisik, karena setelah FIAN disetujui langkah selanjutnya yang harus dilakukan Notaris adalah bahwa dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan HAM RI atau pejabat yang ditunjuk, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas beserta *dokumen pendukung* yang meliputi :

- (1) salinan akta pendirian perseroan.
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan.

- (3) bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam Tambahan Berita Negara RI dari kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
- (4) bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (5) bukti setor modal dari Bank.

Untuk permohonan pengesahan akta pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PT. PMA, maka dalam SISMINBAKUM ini tetap diperlukan sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dilengkapi selain melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas, dimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) Kep.Men. Keh. Dan HAM RI tersebut.

Sebagaimana juga lampiran yang disyaratkan dalam sistem manual, maka lampiran-lampiran yang diajukan oleh Notaris dalam menyampaikan dokumen fisik tersebut di atas baik untuk lampiran pengesahan akta pendirian maupun lampiran untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, ada beberapa persyaratan yang juga sebenarnya tidak perlu dilampirkan, misalnya bukti setoran modal dari bank, foto copy NPWP dan bukti pembayaran uang muka dari Percetakan Negara.

Pada dasarnya bukti setoran modal dari bank tidak perlu dijadikan syarat untuk dilampirkan karena bukti tersebut lebih merupakan tanggung jawab Notaris

karena hal tersebut menyangkut kebenaran atas bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh para pendiri atau pemegang saham perseroan. Apabila bukti setor dari bank ternyata tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta maka hal tersebut juga merupakan salah satu yang menghambat proses.

Syarat lain yang tidak perlu adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan syarat yang tidak perlu ditentukan oleh Departemen Kehakiman instansi yang tepat yaitu Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Bukti pembayaran uang muka pengumuman Tambahan Berita Negara juga tidak perlu disyaratkan karena hal tersebut jelas merupakan tanggung jawab Direksi. Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri dan akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Permohonan pengumuman perseroan dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pendaftaran.

Alur birokrasi pada SISMINBAKUM pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem manual. Oleh karena itu untuk memperpendek birokrasi maka tanda tangan surat keputusan pengesahan akta pendirian maupun persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas cukup oleh Direktur Perdata saja.

Dalam SISMINBAKUM maka tanda tangan Surat Keputusan Menteri adalah tanda tangan secara elektronik (digital signature). Permasalahan tanda tangan elektronik ini harus diperhatikan aspek hukumnya. Amerika Serikat yang terkenal sebagai negara yang pertama kali mengembangkan teknologi internet, saat ini telah memiliki perangkat hukum yang mengatur masalah digital signature. Perangkat ini disebut Electronic Signatures in Global and National Commerce Act yang ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton pada bulan Juni 2001 secara efektif berlaku pada bulan Oktober. ¹⁸

Undang-undang ini memberikan tuntunan bagaimana mengesahkan tanda tangan elektronik dan memberikan persyaratan secara rinci bagaimana menyimpan data-data atau catatan-catatan elektronik. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang tidak dapat melepaskan dirinya dari pemanfaatan media internet ini sudah selayaknya memiliki aturan tentang digital signature. Hal ini penting mengingat transaksi E-Commerce melalui media internet saat ini kecenderungannya semakin meningkat. ¹⁹

Tanda tangan digital memang bukanlah merupakan satu-satunya pendekatan untuk melakukan otentikasi pribadi dalam dunia perdagangan digital.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Pengakuan Dan Keabsahan Digital Signature Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 18, Maret 2002, hal.32.

¹⁹ Ibid.

Namun teknologi tanda tangan digital merupakan teknologi yang paling umum digunakan dalam tanda tangan elektronik.²⁰

Pada saat ini penandatanganan surat keputusan secara elektronik adalah tetap oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dasar hukum yang dipergunakan untuk menunjukkan bahwa tanda tangan Surat Keputusan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman secara elektronik adalah sah dan dapat dilakukan, yaitu dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Dasar hukum yang dipakai tersebut di atas yang dipakai sebagai dasar hukum untuk sahnya tanda tangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan adalah tidak tepat, karena undang-undang tersebut jelas-jelas diperuntukkan untuk dokumen perusahaan. Sementara surat keputusan pengesahan akta pendirian maupun surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan adalah produk hukum dari suatu instansi pemerintah yang tidak dapat disamakan dengan dokumen perusahaan.

Untuk memberikan dasar hukum yang tepat atas tanda tangan secara elektronik oleh pejabat pemerintah yang menandatangani surat keputusan sebagai suatu produk hukum, maka harus dibuatkan undang-undang tersendiri untuk hal

²⁰ Ibid.

tersebut.

Oleh karena permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas datang dan berasal dari seluruh wilayah negara Indonesia diseluruh kerja Notaris, maka dengan semangat otonomi daerah dan pemberian kewenangan yang lebih besar untuk daerah dalam melakukan pembangunan, seharusnya proses permohonan tersebut tidak dipusatkan di Jakarta yaitu di kantor pusat Departemen Kehakiman Dan HAM RI, tetapi harus dapat dilimpahkan ke daerah propinsi. Untuk pusat, dapat diatur bahwa hanya untuk PT. PMA dengan modal investasi pada jumlah tertentu saja yang ditangani oleh pusat.

Apabila dalam sistem manual ada standar akta yang sudah ditentukan maka dalam SISMINBAKUM ada kelompok KLU dan KLUI yang sudah baku yang harus diikuti Notaris dalam mengisi FIAN khususnya untuk materi Pasal 3 anggaran dasar perseroan.

Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila kita lihat sekali lagi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan prinsip dasar bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian (karena perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih).

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.²¹

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.²²

Prinsip dasar dari perjanjian adalah kebebasan untuk berkontrak atau membuat perjanjian antara para pihak, dimana hal tersebut tercermin dalam Pasal 1338 KUH.Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat, sebagai berikut : Asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998, hal.1.

²² Ibid.

pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.²³

Tentang pemberlakuan dua sistem yaitu sistem manual dan SISMINBAKUM atas dasar adanya perkembangan di masyarakat dimana ternyata diperlukan tenggang waktu yang cukup untuk bisa secara tunggal menerapkan SISMINBAKUM, berhubung penerapan SISMINBAKUM dengan jaringan internet belum dapat diakses oleh setiap Notaris di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana keputusan Menteri ini memberlakukan kembali penerimaan permohonan melalui sistem manual.

Pemberlakuan dua sistem dalam penyelesaian proses pengesahan akta pendirian dan penyelesaian proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yaitu sistem manual dan sistem administrasi badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor : M-04.HT.01.01.TH.2001 tanggal 29 Juni 2001 mempunyai dampak hukum yang

²³ Mariam. D. Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Aluumni, Bandung, 1944, hal.45.

tidak menguntungkan yaitu : terdapat dualisme penyelesaian badan hukum secara administratif serta adanya penerbitan Surat Keputusan pengesahan badan hukum yang berasal dari dualisme proses penyelesaiannya maka kurang menjamin kepastian hukum mengenai penerbitan Surat Keputusan tersebut karena berarti di masyarakat beredar dua Surat Keputusan yang berbeda yaitu produk SISMINBAKUM dan Surat Keputusan produk sistem manual.

Kemudian, bagi para petugas pemeriksa dalam hal ini Korektor, dengan diberlakukannya dua sistem tersebut, ketelitian dan kecermatan dalam pemeriksaan substansi serta dalam pelaksanaan tugas pekerjaan menjadi kurang maksimal dan tidak memadai karena konsentrasi menjadi terpecah antara penanganan SISMINBAKUM dan penanganan sistem manual. Terutama mengenai pengecekan nama PT akan menemui kesulitan karena pemeriksaan nama harus dilakukan silang baik melalui SISMINBAKUM maupun manual, padahal cepatnya proses antara kedua sistem tersebut berbeda satu dengan lainnya.

2. Sinkronisasi Penerapan Peraturan Perundang-undangan Dalam Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA.

Sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam proses pengesahan akta pendirian dan proses persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PMA sangat penting artinya dalam upaya untuk

menciptakan adanya kepastian hukum terutama bagi investor asing yang menanamkan investasinya dengan cara membentuk PT dalam rangka PMA.

Perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri karena : ²⁴

Pertama, mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya.

Kedua, mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya.

Ketiga, dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional.

Oleh karena itu pemanfaatan PT dalam rangka PMA, sebagai salah satu upaya menarik investor asing, harus benar-benar didukung oleh penerapan hukum yang selaras dan seimbang antara satu instansi dengan instansi lain yang terkait dengan bidang penanaman modal asing. Ketidaksinkronan sangat mengganggu proses lebih lanjut untuk dapatnya PT. PMA tersebut segera beroperasi.

Beberapa contoh ketidaksinkronan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku antar satu instansi dengan instansi lain yang terkait, dalam hal ini antara Departemen Kehakiman Dan HAM RI dengan BKPM, sangatlah merugikan citra aparatur negara dikedua instansi pemerintah tersebut yang terlibat

²⁴ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.4.

dalam permasalahan penanaman modal asing dan bahkan lebih dari itu merugikan citra Indonesia sendiri secara umum dalam pergaulan masyarakat dunia.

Apabila kita melihat kembali permasalahan-permasalahan yang ada yang timbul dari tidak adanya koordinasi antar suatu instansi dengan instansi lain, dimana permasalahan-permasalahan tersebut menyangkut nama perseroan, bidang usaha, permodalan, dan Direksi dan Komisaris, maka terlihat jalinan yang baik dalam membangun suatu sistem koordinasi tidak terlihat sebagaimana mestinya.

Surat persetujuan PMA berkaitan dengan Pasal 1 anggaran dasar perseroan mencantumkan nama perseroan. Pemakaian nama perseroan harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan. Perseroan tidak boleh menggunakan nama PT yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Nama bagi suatu perseroan, sebagaimana halnya nama bagi individu orang perorangan merupakan salah satu bentuk jatidiri dari perseroan tersebut, yang membedakannya dari perseroan yang lain. ²⁵

²⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.18.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas juga secara tidak langsung memproteksi kepentingan dari para pemilik merek terkenal. Perseroan secara tidak langsung dilarang untuk memakai nama yang sama, mirip maupun berkonotasi dengan merek-merek terkenal, kecuali penggunaan nama tersebut telah disetujui oleh pemegang hak (milik) yang sah dari merek bersangkutan. Hal tersebut tidak hanya diterapkan dan diberlakukan bagi perseroan yang akan didirikan, namun juga bagi perseroan yang telah ada dan berdiri saat ini. ²⁶

Pemakaian nama yang jelas serta terang juga dianjurkan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 melarang disetujuinya nama yang hanya terdiri dari rangkaian angka atau huruf yang tidak memiliki makna. Demikian juga nama-nama yang dikutip dari bidang usaha, nama tempat tertentu, atau yang berkonotasi dengan nama instansi atau institusi tertentu, atau yang mirip dengan nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan, atau yang tidak mencerminkan kegiatan perseroan yang sebenarnya, tidak diperkenankan untuk dipergunakan sebagai nama perseroan. ²⁷

Ketidaksinkronan penerapan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dimana bahwa nama yang tercantum dalam surat persetujuan

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, hal.19.

BKPM sering tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang usaha yang mencerminkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh perseroan yang bersangkutan dengan Pasal 3 anggaran dasar perseroan di dalam surat persetujuan BKPM tercantum pula. Undang-undang perseroan terbatas menentukan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan ditentukan bahwa permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut hanya menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja, kecuali ada tambahan lain.

Ketidaksinkronan penerapan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan, dimana sering ditemukan bidang usaha yang tercantum dalam surat persetujuan BKPM semata-mata berpedoman pada bidang usaha yang tercantum dalam *negative list* yang terdapat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 96 dan Nomor 118 Tahun 2000, ketentuan peraturan lain berkaitan dengan PMA khususnya PT dalam rangka PMA tidak diperhatikan.

Di dalam Surat persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penanaman Modal Asing mencantumkan pula mengenai modal perseroan yaitu yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan serta modal disetor. Mengenai

modal perseroan ini juga sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa modal dalam pengertian yang sangat luas merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan berusaha dalam bentuk apapun dan yang dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada faktor modal tersebut.²⁸

Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap kegiatan berusaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-badan usaha pada umumnya dalam melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pada bidang usaha, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha.²⁹

Ketidaksinkronan menyebabkan muncul permasalahan yaitu bahwa permodalan yang tercantum dalam surat persetujuan BKPM mengabaikan atau tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya prosentase mengenai modal yang ditempatkan dan disetor.

Organ penting dalam perseroan terbatas salah satunya adalah Direksi dan Komisaris. Pencantuman Direksi dan Komisaris harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ Sri Redjeki Hartono, op.cit., hal.1.

Dalam hubungan dengan itu, menurut ajaran, pengurusan pada perseroan terbatas harus dilakukan oleh suatu "organ". Apa artinya oleh suatu organ, maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.³⁰

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, dinyatakan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Dalam ayat (3) nya dinyatakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Dalam ayat (4) nya dinyatakan Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedang Komisaris, menurut ayat (4) nya adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.³¹

Dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas memutuskan Direksi dan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.

²⁹ Ibid.

³⁰ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.16.

³¹ Ibid, hal.17.

Sekali lagi ditentukan dalam Pasal 82 Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.³²

Ketidaksinkronan penerapan peraturan perundang-undangan menyebabkan timbulnya permasalahan, dimana bahwa pencantuman Direksi dan Komisaris dalam surat persetujuan BKPM tentang PMA tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan sering ditemukan dalam surat persetujuan BKPM tidak mencantumkan Komisaris baik WNI maupun WNA.

Salah seorang Notaris di Jakarta, yaitu Robert Purba, SH., menyatakan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Departemen Kehakiman Dan HAM RI amat penting, sebab jika tidak ada koordinasi yang baik antara satu instansi dengan instansi lainnya, akan selalu menimbulkan permasalahan yang dapat menyebabkan investor asing yang akan membuat akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar dalam rangka PMA menjadi kurang berminat untuk meneruskan investasinya. Berdasarkan pengalamannya, banyak investor asing tiba-tiba mengurungkan niatnya atau menunda untuk membuat akta pendirian karena akta pendirian PT. PMA milik rekan senegara mereka bermasalah dan belum disahkan karena apa yang dicantumkan di surat persetujuan Badan Koordinasi Penanaman

³² Ibid, hal.26.

Modal ternyata ditolak di Departemen Kehakiman Dan HAM RI karena tidak menerapkan peraturan perundang-undangnya.³³

Oleh karena sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan sangat penting terutama antar instansi yang terkait maka sangat diperlukan suatu koordinasi dimana koordinasi tersebut harus memanfaatkan teknologi canggih melalui jaringan internet sehingga menghemat waktu dan mempercepat proses pelayanan.

3. Implikasi Problematika Proses Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PMA yang kurang menjamin kepastian hukum dan kurang dapat diprediksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron antara satu instansi dengan instansi lain terutama Departemen Kehakiman dengan BKPM yang berkaitan dengan PMA mempunyai dampak yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan kemajuan investasi di Indonesia serta secara umum pada percepatan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

³³ Robert Purba, Notaris Jakarta, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 21 Januari 2002.

Keberadaan dan kehadiran birokrasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mengorganisir suatu program pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah modern untuk pelaksanaan tugas-tugasnya dengan sistem administrasi yang baik yang dijalankan aparatur pemerintah, bukan untuk menambah permasalahan-permasalahan baru dengan birokrasi yang berbelit.

Salah satu ilmuwan yang mempunyai sumbangan besar dalam studi tentang birokrasi adalah Max Weber. Max Weber melihat bahwa perkembangan dunia modern ditandai dengan semakin besarnya pengaruh birokrasi. Menurut Weber nilai-nilai universal yang harus ada dalam suatu birokrasi modern adalah pembagian tugas secara tegas, pengorganisasian kantor berdasarkan prinsip hirarki, pelaksanaan tugas berdasarkan sistem, melaksanakan tugas secara formal dan tidak bersifat pribadi, pekerjaan didasarkan pada kualifikasi teknis, adanya keahlian-keahlian tertentu yang diterapkan secara giat dan rasional.³⁴

Kita tahu bahwa pemanfaatan teknologi dan perampingan birokrasi dapat memberi peluang untuk menarik investor asing. Pemanfaatan teknologi modern melalui penggunaan jaringan internet harus sudah dilakukan. Indonesia berada dalam era globalisasi yang harus dapat memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin.

³⁴ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern (Terjemahan)*, UI – Press, Jakarta, 1987, hal.27.

Perkembangan teknologi informasi melalui jaringan internet yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai aspek yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan-perbuatan hukum baru.

Era globalisasi dengan perkembangan globalisasi informasi mau tidak mau telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan Indonesia mempersiapkan perangkat hukumnya, seperti pengaturan tentang tanda tangan elektronik (digital signature).

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka menghadapi arus globalisasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi agar benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan.

Implikasi problematika proses pengesahan akta pendirian dan proses persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing terhadap kurangnya dukungan atas percepatan pertumbuhan perekonomian dengan cara memanfaatkan investor asing dapat dicegah dengan pemanfaatan teknologi yang didasarkan atas landasan hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa teknologi komunikasi sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi internasional maupun lokal / nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun bersifat semu yang akhirnya menjadi sangat terpuruk mempunyai pengaruh yang luas terhadap perkembangan hukum nasional.³⁵

Jika kita berharap bahwa investor asing dapat kita manfaatkan sebagai salah satu faktor yang mendorong kegiatan ekonomi, berarti kita juga harus melihat sekali lagi pada perangkat hukum terutama perangkat hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Kendala-kendala berupa birokrasi yang panjang dan berbelit serta rendahnya pemanfaatan teknologi tinggi serta belum adanya landasan hukum yang kokoh untuk menunjang penerapan teknologi dalam bidang hukum, harus segera dicari solusinya dan dihilangkan permasalahan tersebut.

Berangkat dari tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ekonomi maupun kegiatan menjalankan perusahaan, maka hukum ekonomi dapat diartikan sebagai : “setiap perangkat hukum (undang-undang atau peraturan lain) yang mengatur setiap kegiatan menjalankan perusahaan”. Jadi hukum ekonomi adalah setiap perangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum para pelaku ekonomi / atau para pihak yang menjalankan perusahaan.³⁶

³⁵ Sri Redjeki Hartono, *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Berwawasan Asas Keseimbangan*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 5, 1998, hal.67.

³⁶ Ibid, hal.72.

Pada kenyataannya kegiatan menjalankan perusahaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat kompleks dan tidak terputus-putus, dengan demikian hukum ekonomi harusnya mampu untuk selalu menyediakan berbagai perangkat peraturan yang dibutuhkan oleh kegiatan berusaha di dalam masyarakat yang secara terus-menerus selalu berkembang dan bertambah. ³⁷

Para investor dalam menghadapi permasalahan ini banyak bertanya mengapa sebagai investor asing yang membawa modalnya ke Indonesia dan akan melakukan usaha dengan membentuk perseroan terbatas harus mendapat kesulitan birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian hukum.

Kita berharap bahwa penanaman modal asing juga dapat kita manfaatkan untuk masuknya teknologi. Pemerintah mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing dan berbagai peraturan pelaksanaannya adalah dalam rangka mengundang masuknya modal dan teknologi asing dengan harapan bahwa teknologi akan menyebar ke berbagai sektor kehidupan. ³⁸

Modal dan teknologi asing ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dan kehilangan sumbangan sektor pertanian kepada pendapatan nasional kita. Tidak heran jika untuk mencapai tujuan itu alih teknologi berjalan dengan sangat bebas, dimana semua teknologi dapat masuk. Dan nyatanya teknologi apa saja telah masuk dan bahkan masuk ke negeri ini, tidak ada hambatan dalam masuknya

³⁷ Ibid.

teknologi ke Indonesia, sehingga sebetulnya Indonesia adalah surga bagi masuknya teknologi asing.³⁹

Dampak dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak investor asing menyebabkan minat untuk menanam modalnya menjadi berkurang dan pemanfaatan yang akan kita dapat berupa investasi dan alih teknologi semakin sulit.

Koordinasi antar instansi dalam kaitannya dengan PMA, terutama antara BKPM dan Departemen Kehakiman Dan HAM RI tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga banyak menimbulkan kendala-kendala sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya.

Untuk dapat melaksanakan koordinasi yang baik dan cepat maka diperlukan teknologi canggih berupa jaringan internet yang dapat menghubungkan antara Departemen Kehakiman Dan HAM RI dengan BKPM secara on line, sehingga sesegera mungkin dapat diatur apabila ada permasalahan yang muncul. Namun untuk mengadakan koordinasi dengan cara on line system melalui jaringan internet memerlukan biaya yang amat tinggi. Tetapi mau tidak mau kita harus menuju kesana dalam menghadapi era globalisasi.

³⁸ T. Mulya Lubis, *Hukum Dan Ekonomi : Beberapa Pilihan Masalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal.124.

³⁹ Ibid, hal.125.

Problematika tersebut di atas merupakan salah satu hal dari banyak masalah yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang oleh investor asing dikategorikan sebagai *high risk country*.

Salah satu dampak yang muncul adalah adanya pengalihan investasi di Indonesia ke negara lain. Pimpinan Kamar Dagang dan Industri Jepang Shoichi Kameyama, mengatakan di Filipina, Selasa (7 / 8), investasi Jepang di Vietnam telah melonjak tiga kali lipat lebih dalam enam bulan pertama tahun 2001, dibandingkan tahun lalu. Investasi yang menyerbu Vietnam ini sebenarnya semula akan ditujukan ke Indonesia dan Filipina, namun batal karena investor Jepang khawatir dengan situasi politik, hukum, dan ketenagakerjaan yang tidak stabil di kedua negara. ⁴⁰

Untuk menghindari implikasi problematika pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas maka salah satunya adalah dengan juga mengadakan pembaharuan hukum yang sangat diperlukan. Pembaharuan hukum yang berkaitan dengan ekonomi adalah untuk mencapai *predictability* (kepastian), *fairness* (keadilan) dan *efficiency* (efisiensi). Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting. ⁴¹

⁴⁰ Kompas, 8 Agustus, 2001, hal.13.

⁴¹ Moh. Mahfud MD. (Editor), *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal.289.

Kemudian hukum dalam perkembangannya juga harus mampu memberi solusi atas setiap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita membutuhkan seperangkat peraturan yang dapat mendukung dan memberi landasan hukum dalam penerapan teknologi di bidang kehidupan perekonomian.

Secara rinci, hukum akan menampakkan diri sebagai seperangkat peraturan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai mengenai antara lain : ⁴²

- pemanfaatan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) secara maksimal yang tidak membahayakan manusia dan kehidupan ;
- tidak melanggar kepentingan dan hak-hak pribadi maupun hak-hak publik / masyarakat ;
- pengakuan dan prosedur pengakuan hak oleh negara di bidang hak milik intelektual ;
- pengaturan tentang / mengenai keseimbangan kepentingan publik terhadap kepentingan individu, kepentingan publik dan sebagainya, sebagai keseimbangan kepentingan para pihak.

Perangkat hukum yang tidak menciptakan kepastian hukum, ditambah lagi dengan keadaan sosial Indonesia yang tidak stabil dimana keadaan tersebut tidak mendukung investasi di Indonesia, menyebabkan banyak investor asing membatalkan atau menunda investasinya ke Indonesia, sementara kita tahu

⁴² Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, hal.31.

bahwa investasi asing penting artinya sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi Indonesia.

Dimasa yang akan datang peran pemerintah harus lebih berkurang dan lebih fleksibel di dalam masalah perekonomian dan peran swasta harus lebih banyak ditonjolkan. Untuk itu harus ada revisi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas khususnya mengenai peran Menteri Kehakiman dalam hal ini adalah lembaganya yaitu Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.

Dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan, baik mengenai sistem manual maupun mengenai SISMINBAKUM yang keduanya berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ternyata masih ditemukan adanya kendala-kendala terutama pada sistem manual dan juga SISMINBAKUM. Peran Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI dalam masalah perseroan terbatas sebaiknya ditinjau kembali agar lebih dapat mempermudah dan memperlancar masuknya investor asing dengan cara membentuk PT dalam rangka PMA.

Oleh karena itu untuk mengurangi timbulnya permasalahan atau problematika dalam proses penyelesaian pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, maka sebaiknya peranan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI tidak lagi dalam posisi memberikan pengesahan atas akta pendirian maupun memberikan persetujuan

atas perubahan anggaran dasar, tetapi cukup sebagai tempat pendaftaran badan hukum perseroan terbatas saja. Artinya suatu anggaran dasar perseroan terbatas yang pada dasarnya adalah perjanjian yang mempunyai prinsip kebebasan berkontrak, baru dapat dianggap sebagai badan hukum apabila telah didaftarkan di Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI dan mendapatkan nomor registrasi perseroan terbatas di Departemen Kehakiman oleh Menteri Kehakiman.

Jadi dengan demikian undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas tetap mengatur segala ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perseroan terbatas, namun peranan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI disini diubah sedemikian rupa sehingga perannya hanya sebatas pada fungsi pendaftaran saja.

Pendaftaran perseroan terbatas sebagai badan hukum tersebut tetap harus memanfaatkan teknologi tinggi melalui jaringan internet dengan on line system, tidak saja on line dengan instansi yang terkait dengan masalah penanaman modal asing seperti BKPM, tetapi juga dengan pemerintah daerah yang perannya harus lebih menonjol dimasa mendatang dalam membangun daerahnya dengan cara memanfaatkan modal asing yang membentuk PT. PMA.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Penanganan proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. PMA di Departemen Kehakiman dengan sistem manual menjadi panjang dan berbelit-belit, sehingga tidak dapat diprediksi dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Penggunaan teknologi modern untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirian maupun persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka PMA tidak memadai pada sistem manual sementara penggunaan teknologi canggih dengan SISMINBAKUM ternyata belum dapat dinikmati atau dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Notaris sebab ternyata SISMINBAKUM belum dapat diakses secara menyeluruh oleh Notaris di seluruh Indonesia karena keterbatasan daerah-daerah tertentu, dimana jangkauan jaringan telepon sebagai salah satu syarat utama untuk dapat akses ke SISMINBAKUM belum menyentuh daerah kerja Notaris yang bersangkutan..

Pemberlakuan dua sistem yaitu Sistem Manual dan SISMINBAKUM memang baik untuk menampung kebutuhan masyarakat dengan memberi pilihan, akan tetapi pemberlakuan dua sistem tersebut mengabaikan hal yang

paling penting yaitu kepastian hukum karena adanya dua Surat Keputusan yang berbeda yang beredar di masyarakat yang berasal dari instansi yang sama.

Kualitas sumber daya manusia dalam penanganan proses penyelesaian permohonan baik untuk pengesahan maupun persetujuan anggaran dasar PT di Departemen Kehakiman belum memadai. Demikian juga kualitas sumber daya manusia di bidang kenotariatan yaitu para Notaris satu sama lain berbeda atau tidak merata dalam penguasaan atau pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan akta pendirian maupun persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Penerapan teknologi canggih melalui pemanfaatan jaringan internet akan menjadi kurang optimal apabila penguasaan materi Notaris atas peraturan perundang-undangan berkaitan PT. PMA tidak memadai, sehingga akan tetap menjadi kendala bagi penyelesaian proses pengesahan akta pendirian maupun proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT dalam rangka PMA.

2. Penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron satu sama lain antara Departemen Kehakiman dan BKPM menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang terkait dalam satu bidang yang sama tidak berjalan dengan baik sehingga menambah problematika yang ada. Oleh karena sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan sangat penting terutama antar

instansi yang terkait maka sangat diperlukan suatu koordinasi dimana koordinasi tersebut harus memanfaatkan teknologi canggih melalui jaringan internet sehingga menghemat waktu dan mempercepat proses pelayanan.

3. Implikasi dari problematika dalam proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terhadap investor asing mempunyai dampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan investasi di Indonesia.

Perubahan-perubahan paradigma terhadap penanganan proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dengan meningkatkan penghayatan hakikat dari “pelayanan” dan pemanfaatan teknologi canggih setahap demi setahap secara merata, perampingan birokrasi, persyaratan proses yang tetap dengan pola transparansi sistem serta prosedur dan pelayanan yang maksimal dan profesional, akan dapat mengurangi dampak yang timbul akibat permasalahan proses penanganan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing.

Dengan demikian upaya percepatan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan investor asing melalui penanaman modal asing dengan membentuk perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

B. S a r a n

Penanaman Modal Asing merupakan salah satu faktor amat penting untuk dapat dimanfaatkan agar secepatnya dapat melaksanakan dan mewujudkan pembangunan ekonomi dalam keadaan keterbatasan finansial, teknologi, skil dan kemampuan manajemen, karena untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional kita harus mempunyai modal dasar, dimana salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar tersebut adalah para investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk PT dalam rangka penanaman modal asing.

Menyadari betapa pentingnya peranan PMA tersebut dalam upaya membantu mempercepat pembangunan ekonomi, maka harus diciptakan suasana yang kondusif untuk dapat menarik investor asing menanamkan investasinya dalam bentuk pendirian PT. PMA ataupun investor memanfaatkan PT yang sudah berbadan hukum yang berada di Indonesia dengan merubah statusnya menjadi PT. PMA.

Birokrasi yang panjang dan berbelit harus segera dihilangkan dengan merampingkan jalur birokrasi. Peranan birokrasi harus diarahkan pada kondisi yang menciptakan suasana yang turut serta membantu dan mempercepat proses penyelesaiannya, sehingga birokrasi bukan menjadi salah satu faktor penghambat.

Untuk itu sudah selayaknya peranan birokrasi dioptimalkan dibarengi dengan pemanfaatan teknologi canggih dengan sistem on line melalui jaringan

internet, dan pemanfaatan teknologi canggih tersebut juga dalam rangka melakukan koordinasi antara satu instansi dengan instansi lainnya, dalam rangka pelayanan kepada publik khususnya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Peranan daerah dengan semangat otonomi yang positif diharapkan dapat membantu memperlancar pelayanan birokrasi dalam kaitannya dengan PMA. Sehingga pelayanan untuk pembentukan PT dalam rangka PMA dapat merata diseluruh Indonesia dan tingkat koordinasi antar pusat dan daerah dengan pemanfaatan teknologi canggih melalui jaringan internet harus segera dibangun, diikuti dengan pelimpahan wewenang penanganan proses dari kantor pusat ke daerah.

Kemudian, oleh karena pada prinsipnya akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah merupakan "*perjanjian*" antara para pihak yang membuat akta tersebut, maka pada dasarnya mereka bebas melakukan perjanjian dengan tetap tunduk pada hukum perjanjian serta undang-undang perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Untuk itu maka peranan Departemen Kehakiman dimasa mendatang harus dirubah sedemikian rupa sehingga dalam proses pengesahan akta pendirian maupun persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, peranannya dibatasi sehingga cukup hanya sebagai instansi registrasi saja yang menerima

pendaftaran pengesahan akta pendirian dan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Dengan demikian, pengesahan akta pendirian sebagai badan hukum menjadi sah apabila telah didaftarkan di Departemen Kehakiman, demikian juga akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah sah dan berlaku apabila telah didaftarkan di Departemen Kehakiman.

Dengan peran yang baru tersebut, maka kendala-kendala yang ditemukan di dalam penelitian ini yang menghambat proses pengesahan ataupun perubahan anggaran dasar PT dalam rangka PMA dapat dihindari, dengan syarat bahwa pemanfaatan teknologi yang canggih harus semaksimal mungkin diterapkan supaya dapat mendukung kelancaran proses tersebut di atas, yang pada akhirnya nanti dapat membantu memperlancar investor asing masuk ke Indonesia dengan cara membentuk PT dalam rangka PMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Ali Rido, R., *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan-Perkumpulan-Koperasi-Yayasan-Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001.
- Amirizal, *Hukum Bisnis Deregulasi Dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Anoraga, Panji, *Perusahaan Multinasional dan PMA*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.
- Arief, Sritua dan Adi Sasono, *Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (Sixth Edition), West Publishing Co, St.Paul, Minnesota, U.S.A, 1990.
- Blau, Peter M dan Marshall W Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Moderen*, (Terjemahan), UI Press, Jakarta, 1987.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Collin, S.M.H., *Dictionary of Personal Computing and The Internet*, Peter Collin Publishing, Middlesex, 1998.
- Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman*, Tahun 1996.
- Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono (Editor), *Problema Globalisasi-Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi Dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan H. Hadi Waryan, *Hukum Ekonomi*, Karya Abditama, Surabaya, 1997.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Undang-Undang PT (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Hadhikusuma, RT. Sutantya R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Harahap, M. Yahya, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Hardiwinoto, Soekotjo, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Hartono, CFG Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke Duapuluh*, Alumni, Bandung, 1994
-, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
-, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam PMA di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1972.
- Hartono, Sri Redjeki, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1985.
-, *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Berwawasan Asas Keseimbangan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998.
-, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
-, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Heilbroner, David M, *Runtuhnya Peradaban Kapitalis*, (Terjemahan), Bumi Aksara, Bandung, 1984.
- Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (Tanpa Tahun) Serta Ubahannya Tertanggal 28 Januari 1998 : A.

Format Tesis (halaman 18 – lampiran), B. Format Proposal (halaman 2 – lampiran).

Ichsan, Ahmad, *Dunia Usaha Untuk Indonesia : Segi Hukum, Segi Manajemen Struktur / Bentuk Hukum Kebijaksanaan Pemerintah*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Kansil, CST, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

....., *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Kansil, CST. dan Christine ST. Kansil, *Kitab Undang Undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Kartasapoetra, G, *Debirokratisasi dan Deregulasi*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1956.

Keraf, Gorys, *Diksi dan Gaya, Bahasa Sari Retorika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Khairandy, Ridwan, *Pengakuan Dan Keabsahan Digital Signature Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 18, Maret 2002.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Kuntjoro Jakti, Dorodjatun, *Birokrasi di Dunia Ketiga : Alat Rakyat, Alat Penguasa Atau Pengusaha ?*, dalam Prisma No. 10 Bulan Oktober 1980.

Latief, Dochak, *Pembangunan Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Global*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.

Lubis, T. Mulya dan Richard M Buxbaum (Penyunting), *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.

- Lubis, T. Mulya, *Hukum Dan Ekonomi : Beberapa Pilihan Masalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Mahfud MD., Moh., *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
-, (Editor), *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
-, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Qlong, Mochtar, *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA*, BPHN, Jakarta, 2000.
- Panglaykim, *Investasi Langsung Jepang Di Kawasan Asean*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
- Patrik, Purwahid, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Prasodjo, Ratnawati, *Prosedur Pendirian Dan Pengesahan Perseroan Terbatas*, Seminar Apindo dengan ILMI, Jakarta, 14 Juni 1995.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Radjagukguk, Erman, *Hukum Investasi Di Indonesia, Peraturan Perundang-undangan Dan Keputusan Pengadilan*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1996.
-, *Hukum Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

-, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Ramli, Ahmad M., *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Regar, Moenaf H., *Dewan Komisaris (Peranannya Sebagai Organ Perseroan)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Riswandi, Budi Agus, *Doktrin Fair Use Dan Kompleksitas Permasalahan Penanganan Pelanggaran Hak Cipta Di Internet*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 18, Maret 2002.
- Ritzer, George, (Penyadur : Alimandan), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern)*, Seksi Hukum Dagang, FH UGM, Yogyakarta, 1994.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi Dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001.
- S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Otje Salman, *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas-Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.

- Sopater, Sularso, Bambang Subandrijo dan Jakob Tobing (Penyunting), *Seri Membangun Bangsa : Pemberdayaan Birokrasi Dalam Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
-, *Kitab Undang Undang Hukum Dagang Dan Undang Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
-, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasar Modal*, Binacipta, Jakarta, 1989.
-, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi, Dalam Pembangunan Nasional*, Gramedia, Jakarta, 1987.
-, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984.
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedomanan Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Pustaka Gramedia, Jakarta, 1996.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sunny, Ismail dan Hudioro Rochmat, *UU PMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1968.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Suprptomo, Heru, *Hukum Dan Komputer*, Alumni, Bandung, 1996.
- Thoha, Miftah dan Agus Dharma (Editor), *Menyoal Birokrasi Publik*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Tunggul, Iman Sjahputra dan Amin Wijaya Tunggul, *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 1999.

Ustadianto, Riyeke, *Frame Work E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001.

Widjaja, I.G. Rai, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

....., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

....., *Penanaman Modal – Pedoman Prosedur Mendirikan Dan Menjalankan PMA Dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997.